

BUKU REFERENSI

ARSITEKTUR KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

(TINJAUAN DALAM POLITIK, TATA KELOLA, DAN IMPLEMENTASINYA)

Dr. Ardhana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP.



ARSITEKTUR KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK (Tinjauan dalam Politik, Tata Kelola, dan Implementasinya)

Ditulis oleh:

Dr. Ardhana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978 – 634 – 316 – 000 – 7

V + 243 hlm; 18,2 x 25,7cm.

Cetakan I, Mei 2026

Desain Cover dan Tata Letak:

Muhammad Rasya Aiman Hafizh

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membentuk karakter dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kebijakan publik yang melibatkan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi yang kompleks. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan suatu bangsa.

Buku referensi ini merupakan kelanjutan dari karya penulis sebelumnya (2025) yang berjudul Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Administrasi Publik (Teori dan Praktik), yang menjadi landasan awal dalam pengembangan pemikiran mengenai kebijakan pendidikan. Buku referensi ini membahas secara komprehensif mengenai arsitektur kebijakan pendidikan dalam perspektif administrasi publik, meliputi konsep dasar kebijakan pendidikan, dinamika politik yang memengaruhi perumusan kebijakan, serta prinsip-prinsip tata kelola yang efektif. Selain itu, buku referensi ini membahas peran aktor dan jejaring kebijakan, proses implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Buku referensi ini juga membahas strategi perancangan kebijakan yang adaptif, berbasis bukti, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas sistem pendidikan.

Semoga buku referensi ini dapat menambah wawasan dalam pengembangan kebijakan pendidikan dan administrasi publik.

Salam Hangat

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I	PENDIDIKAN SEBAGAI RANAH KEBIJAKAN PUBLIK	1
A.	Pendidikan dalam Tradisi Administrasi Publik	1
B.	Pendidikan sebagai Barang Publik dan Hak Sosial	5
C.	Rasionalitas, Nilai, dan Tujuan Kebijakan Pendidikan	9
D.	Pendidikan dalam Arena Politik dan Relasi Kekuasaan....	14
E.	Dampak Kebijakan terhadap Struktur Sosial dan Pembelajaran.....	18

BAB II	EVOLUSI PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN.	24
A.	Administrasi Publik Klasik dan Model Birokratik	25
B.	<i>New Public Management</i> dan Logika Efisiensi.....	28
C.	<i>New Public Governance</i> dan <i>Multi-Level Governance</i>	33
D.	Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Fragmentasi Otoritas	38
E.	Transformasi Tata Kelola Pendidikan di Era Global.....	42

BAB III	ARSITEKTUR KEBIJAKAN SEBAGAI KERANGKA ANALITIS.....	47
A.	Konseptualisasi Arsitektur Kebijakan	47
B.	<i>Policy Design, Policy Mix, dan Instrument Choice</i>	52
C.	Institusionalisme Baru dan Desain Kebijakan	56
D.	Aktor, Struktur, dan Mekanisme Koordinasi.....	61
E.	Arsitektur Kebijakan Pendidikan sebagai Model Sintesis.	65

BAB IV	POLITIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	71
A.	Pendidikan dalam Kontestasi Kepentingan	71
B.	Negara, Legitimasi, dan Distribusi Kekuasaan.....	76

C.	Politik Anggaran dan Prioritas Publik	80
D.	Kebijakan Nasional dan Dinamika Lokal.....	84
E.	Politik Simbolik dan Produksi Wacana Pendidikan	88
BAB V	AKTOR NEGARA DAN BIROKRASI PENDIDIKAN	
		92
A.	Pemerintah Pusat dan Desain Kebijakan Nasional.....	92
B.	Pemerintah Daerah dan Implementasi Otonom.....	95
C.	Birokrasi Pendidikan sebagai <i>Policy Executor</i>	99
D.	Sekolah sebagai Organisasi Publik.....	103
E.	Guru sebagai <i>Street-Level Bureaucrats</i>	106
BAB VI	AKTOR NON-NEGARA DAN HIBRIDISASI	
	KEBIJAKAN	109
A.	Organisasi Keagamaan dan Sosial.....	109
B.	Komunitas Lokal dan Lembaga Adat	112
C.	Dunia Usaha, Filantropi, dan Pasar Pendidikan	115
D.	Media dan Produksi Opini Publik	119
E.	Hibridisasi Nilai dalam Tata Kelola Pendidikan	121
BAB VII	JEJARING KEBIJAKAN DAN DISTRIBUSI	
	KEKUASAAN.....	125
A.	<i>Policy Network</i> dan <i>Governance Network</i>	125
B.	Relasi Kekuasaan dalam Jejaring Kebijakan.....	129
C.	Kolaborasi, Konflik, dan Negosiasi.....	131
D.	Jejaring dan Produksi Inovasi Kebijakan	134
E.	Dampak Jejaring terhadap Kinerja Pendidikan	137
BAB VIII	TATA KELOLA KOLABORATIF DAN KO-	
	PRODUKSI LAYANAN PENDIDIKAN	141
A.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Administrasi Publik...	141
B.	Kemitraan Pemerintah–Masyarakat–Institusi.....	144
C.	Ko-Produksi Kebijakan dan Layanan.....	147
D.	Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal	150
E.	Model Tata Kelola Partisipatif.....	153

BAB IX	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI PROSES POLITIK.....	159
A.	Teori Implementasi Kebijakan	160
B.	Implementasi sebagai Arena Diskresi	163
C.	Hambatan Struktural dan Kultural.....	167
D.	Adaptasi Lokal terhadap Kebijakan Nasional	170
E.	Implementasi dan Kualitas Pendidikan	174
 BAB X	 EVALUASI DAN FRAGMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	 178
A.	Model Evaluasi Kebijakan Publik	178
B.	Fragmentasi dan Koordinasi Antar Aktor.....	184
C.	Ketimpangan Akses dan Mutu Pendidikan	189
D.	Dampak Kebijakan terhadap Guru dan Peserta Didik.....	194
E.	Tantangan Evaluasi di Era Desentralisasi.....	197
 BAB XI	 MERANCANG ULANG ARSITEKTUR KEBIJAKAN PENDIDIKAN	 201
A.	Pembelajaran dari Praktik Kebijakan	201
B.	Prinsip Arsitektur Adaptif dan Responsif.....	205
C.	Kebijakan Berbasis Bukti (<i>Evidence-Based Policy</i>).....	207
D.	Integrasi Politik, Tata Kelola, dan Implementasi	210
E.	Pendidikan sebagai Tanggung Jawab Publik dan Keadilan Sosial	213
 BAB XII	 REORIENTASI TEORETIK DAN AGENDA RISET MASA DEPAN.....	 217
A.	Sintesis Teoretik Administrasi Publik dan Pendidikan ...	217
B.	Model Arsitektur Kebijakan yang Integratif.....	221
C.	Agenda Riset Kebijakan Pendidikan Kontemporer	224
D.	Implikasi bagi Reformasi Administrasi Publik	228
E.	Pendidikan dan Masa Depan Tata Kelola Negara	231

DAFTAR PUSTAKA	236
GLOSARIUM.....	236
INDEKS	244
BIOGRAFI PENULIS.....	246
SINOPSIS	247

BAB I

PENDIDIKAN SEBAGAI RANAH KEBIJAKAN PUBLIK

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam kebijakan publik karena berkaitan langsung dengan pembangunan manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pedagogis di ruang kelas, tetapi juga sebagai bagian dari proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga sektor swasta. Kebijakan pendidikan mencerminkan prioritas pembangunan negara serta menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesempatan belajar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mahardhani, 2023). Selain itu, pendekatan pemerintahan kolaboratif menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan modern menuntut sinergi antara berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan (Mahardhani, 2024). Oleh karena itu, memahami pendidikan sebagai ranah kebijakan publik menjadi penting untuk melihat bagaimana nilai, kepentingan politik, dan dinamika sosial memengaruhi arah pembangunan pendidikan serta dampaknya terhadap struktur sosial dan proses pembelajaran dalam masyarakat (Howlett & Ramesh, 2022).

A. Pendidikan dalam Tradisi Administrasi Publik

Pendidikan dalam perspektif administrasi publik dipahami sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan layanan publik yang dirancang dan dikelola oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga sebagai hasil dari

kebijakan, regulasi, serta tata kelola institusi publik yang melibatkan berbagai aktor dan tingkat pemerintahan.

1. Pendidikan sebagai Bagian dari Pelayanan Publik

Pendidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang paling fundamental dalam penyelenggaraan negara. Sebagai pelayanan publik, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas belajar mengajar di lembaga sekolah, tetapi juga sebagai sistem layanan yang disediakan negara untuk memenuhi hak dasar warga negara. Dalam perspektif administrasi publik, layanan pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta diselenggarakan dengan kualitas yang memadai dan berkelanjutan.

Pada kerangka administrasi publik, pendidikan ditempatkan sejajar dengan layanan publik penting lainnya seperti kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Keempat sektor ini merupakan pilar utama dalam penyediaan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendidikan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat karena melalui pendidikan individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari pelayanan publik, penyelenggaraan pendidikan memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang dilakukan melalui mekanisme administrasi publik. Negara harus merancang kebijakan pendidikan yang mampu menjamin ketersediaan lembaga pendidikan, tenaga pendidik yang profesional, kurikulum yang relevan, serta sistem pembiayaan yang memadai. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa layanan pendidikan dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kelompok sosial yang kurang beruntung. Upaya ini penting

untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan serta meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah.

2. Pendidikan sebagai Instrumen Pembangunan Nasional

Pendidikan dalam perspektif administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai layanan sosial bagi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Negara memanfaatkan kebijakan pendidikan sebagai sarana untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang mampu mendukung proses pembangunan di berbagai sektor. Melalui sistem pendidikan yang terencana dan terkelola dengan baik, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kapasitas intelektual yang diperlukan untuk menghadapi tantangan pembangunan modern. Oleh karena itu, pendidikan menjadi bagian penting dalam agenda kebijakan publik karena memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan kemajuan negara.

Pada kerangka kebijakan publik, pendidikan sering dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan nasional. Pemerintah merancang berbagai kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Upaya tersebut bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mempersiapkan individu agar mampu berkontribusi secara produktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Pendidikan juga memiliki peran penting dalam memperkuat daya saing ekonomi suatu negara. Dalam Era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan suatu negara dalam bersaing di tingkat global. Melalui kebijakan pendidikan yang tepat, negara dapat mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, inovasi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar kerja. Pendidikan yang berkualitas memungkinkan

lahirnya tenaga kerja yang produktif, kreatif, dan mampu menciptakan berbagai inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan

Peran negara dalam tata kelola pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam perspektif administrasi publik. Dalam tradisi administrasi publik klasik, negara dipandang sebagai aktor utama yang memiliki otoritas dominan dalam mengatur dan menyelenggarakan layanan pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai sektor strategis yang berkaitan langsung dengan pembangunan bangsa, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan secara terarah, terorganisasi, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui kewenangan yang dimiliki, pemerintah dapat merancang kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan secara nasional.

Salah satu peran utama negara dalam tata kelola pendidikan adalah merumuskan kebijakan pendidikan. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh lembaga pendidikan dalam menjalankan proses pendidikan sesuai dengan tujuan nasional. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sistem pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Kebijakan tersebut biasanya dirumuskan melalui proses politik dan administratif yang melibatkan berbagai institusi pemerintah, lembaga legislatif, serta pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Negara juga memiliki kewenangan untuk mengatur kurikulum nasional. Kurikulum menjadi instrumen penting dalam sistem pendidikan karena menentukan arah pembelajaran, materi yang diajarkan, serta kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Dengan adanya kurikulum nasional, pemerintah berupaya memastikan bahwa proses pendidikan di berbagai daerah memiliki standar yang relatif seragam serta sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Kurikulum juga menjadi sarana bagi negara untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, pengetahuan ilmiah, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Peran negara dalam tata kelola pendidikan juga tercermin melalui penyediaan anggaran pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan keberlangsungan dan kualitas layanan pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung operasional lembaga pendidikan, pengembangan infrastruktur sekolah, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta pengembangan program-program pendidikan lainnya. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, sistem pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan layanan yang berkualitas bagi masyarakat.

B. Pendidikan sebagai Barang Publik dan Hak Sosial

Pendidikan dalam kajian kebijakan publik sering dipahami sebagai barang publik (*public good*) sekaligus hak sosial (*social right*). Kedua konsep ini menjadi dasar normatif dan konseptual bagi negara dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Dalam perspektif administrasi publik, pemahaman terhadap pendidikan sebagai barang publik dan hak sosial membantu menjelaskan mengapa negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin akses pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan.

1. Pengertian Pendidikan sebagai Barang Publik

Pendidikan sering dipahami sebagai salah satu bentuk barang publik karena memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh individu yang menerimanya, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Ketika seseorang memperoleh pendidikan yang baik, dampaknya tidak hanya meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan individu tersebut, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara keseluruhan. Individu yang terdidik cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis, produktivitas kerja yang lebih tinggi, serta partisipasi sosial dan politik yang lebih aktif. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memiliki efek eksternal positif yang melampaui kepentingan pribadi, sehingga keberadaannya penting bagi kepentingan publik.

Pada teori ekonomi publik, konsep barang publik digunakan untuk menjelaskan jenis barang atau layanan yang memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya sulit disediakan sepenuhnya melalui mekanisme pasar. Secara umum, barang publik memiliki dua karakteristik utama, yaitu *non-rivalry* dan *non-excludability*. Karakteristik *non-rivalry* berarti bahwa penggunaan suatu barang oleh satu individu tidak mengurangi kesempatan individu lain untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Sementara itu, *non-excludability* berarti bahwa sulit atau bahkan tidak mungkin untuk membatasi siapa saja yang dapat menikmati manfaat dari barang tersebut. Contoh klasik dari barang publik adalah pertahanan negara atau penerangan jalan, di mana manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang tanpa mengurangi manfaat bagi orang lain.

Pada konteks pendidikan, kedua karakteristik tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi secara sempurna. Pendidikan memiliki unsur persaingan dalam penggunaan sumber daya tertentu, seperti keterbatasan ruang kelas, jumlah guru, atau fasilitas pendidikan yang tersedia. Artinya, jika kapasitas lembaga pendidikan terbatas, maka tidak semua individu dapat memperoleh layanan pendidikan pada waktu yang bersamaan. Selain itu, pendidikan juga memiliki unsur eksklusivitas karena akses terhadap pendidikan sering kali dibatasi oleh berbagai faktor, seperti biaya pendidikan, seleksi akademik, atau kebijakan institusi tertentu.

2. Manfaat Kolektif Pendidikan bagi Masyarakat

Pendidikan memiliki manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengikutinya, tetapi juga memberikan dampak kolektif yang luas bagi masyarakat. Dalam perspektif pembangunan sosial dan ekonomi, pendidikan berperan sebagai salah satu faktor utama yang menentukan kualitas sumber daya manusia serta kapasitas suatu masyarakat untuk berkembang. Melalui pendidikan, masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang memungkinkan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, manfaat pendidikan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menghasilkan dampak sosial yang lebih luas yang mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu manfaat kolektif pendidikan yang paling penting adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja. Individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya memiliki keterampilan yang lebih baik, kemampuan berpikir analitis, serta kapasitas untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan kerja. Hal ini memungkinkan untuk bekerja secara lebih efektif dan menghasilkan output yang lebih tinggi. Ketika sebagian besar anggota masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang baik, maka kualitas tenaga kerja secara keseluruhan juga meningkat, sehingga mendorong peningkatan produktivitas ekonomi di tingkat nasional.

Pendidikan juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem pendidikan yang berkualitas mampu menghasilkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh berbagai sektor ekonomi, termasuk industri, teknologi, dan jasa. Pendidikan juga mendorong munculnya inovasi dan kreativitas yang menjadi dasar perkembangan ekonomi modern. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, suatu negara memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengembangkan sektor ekonomi yang produktif dan meningkatkan daya saing di tingkat global.

Pendidikan juga memberikan kontribusi penting terhadap stabilitas sosial dalam masyarakat. Individu yang memiliki pendidikan yang baik cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai nilai-nilai sosial, hukum, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih toleran, terbuka terhadap perbedaan, dan mampu menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Individu yang terdidik biasanya lebih aktif dalam mengikuti perkembangan politik, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta berpartisipasi dalam berbagai proses pengambilan keputusan publik.

3. Peran Negara dalam Penyediaan Pendidikan sebagai Barang Publik

Pendidikan sebagai barang publik memiliki manfaat sosial yang luas bagi masyarakat, sehingga negara memiliki tanggung jawab yang penting dalam memastikan bahwa layanan pendidikan tersedia dan dapat

diakses oleh seluruh warga negara. Dalam perspektif kebijakan publik, pendidikan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar karena terdapat risiko munculnya ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Jika penyediaan pendidikan hanya bergantung pada kemampuan ekonomi individu, maka kelompok masyarakat yang kurang mampu berpotensi mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, intervensi negara menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa pendidikan dapat dinikmati secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu bentuk peran negara dalam penyediaan pendidikan sebagai barang publik adalah melalui penyediaan anggaran pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang memadai guna mendukung berbagai kegiatan dalam sistem pendidikan. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai operasional lembaga pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, pengadaan fasilitas pembelajaran, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Dukungan pembiayaan dari negara memungkinkan lembaga pendidikan untuk menjalankan proses pembelajaran secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Negara juga memiliki tanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan meliputi berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas teknologi pendidikan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas proses pendidikan. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berperan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses pendidikan.

Peran negara lainnya adalah menetapkan standar mutu pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan. Standar mutu ini mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, kualifikasi tenaga pendidik, sistem evaluasi pembelajaran, serta pengelolaan lembaga pendidikan. Melalui penetapan standar tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan mampu memberikan

layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional. Pengawasan terhadap penerapan standar mutu juga dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas pendidikan di berbagai tingkat pendidikan.

C. Rasionalitas, Nilai, dan Tujuan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan bagian penting dari kebijakan publik yang dirancang untuk mengatur sistem pendidikan dalam suatu negara. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan pendidikan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis atau rasionalitas administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, ideologi politik, serta tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan selalu berada pada persimpangan antara rasionalitas kebijakan, nilai normatif, dan tujuan strategis negara dalam pembangunan manusia.

1. Konsep Rasionalitas dalam Kebijakan Pendidikan

Konsep rasionalitas dalam kebijakan pendidikan merujuk pada penggunaan proses analisis yang sistematis, logis, dan berbasis data dalam merumuskan keputusan kebijakan. Dalam perspektif analisis kebijakan publik, rasionalitas menekankan bahwa kebijakan tidak seharusnya disusun secara intuitif atau semata-mata berdasarkan pertimbangan politik, melainkan melalui proses pemikiran yang terstruktur dengan mempertimbangkan berbagai informasi yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab permasalahan yang ada serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, rasionalitas menjadi salah satu prinsip penting dalam proses perumusan kebijakan pendidikan karena membantu pembuat kebijakan mengambil keputusan yang lebih tepat dan terukur.

Pada pendekatan rasional, proses penyusunan kebijakan pendidikan biasanya dimulai dengan identifikasi masalah yang dihadapi oleh sistem pendidikan. Setelah masalah tersebut dipahami secara jelas, pembuat kebijakan kemudian mengumpulkan berbagai jenis informasi yang dapat digunakan sebagai dasar analisis. Informasi tersebut dapat

berupa data statistik pendidikan yang menggambarkan kondisi pendidikan secara empiris, seperti tingkat partisipasi sekolah, angka putus sekolah, kualitas hasil belajar, maupun distribusi tenaga pendidik di berbagai wilayah. Data statistik ini memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi nyata sistem pendidikan sehingga dapat membantu pemerintah memahami permasalahan secara lebih akurat.

Pembuat kebijakan juga memanfaatkan hasil penelitian akademik sebagai sumber informasi penting dalam proses perumusan kebijakan pendidikan. Penelitian akademik biasanya memberikan analisis yang mendalam mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, efektivitas program pendidikan, serta berbagai model kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja sistem pendidikan. Dengan memanfaatkan hasil penelitian tersebut, kebijakan pendidikan dapat dirancang berdasarkan bukti empiris yang telah diuji secara ilmiah.

Evaluasi terhadap program-program pendidikan yang telah dilaksanakan sebelumnya juga menjadi bagian penting dari pendekatan rasional dalam kebijakan pendidikan. Melalui evaluasi program, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan serta mengidentifikasi berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki. Informasi yang diperoleh dari evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki atau merancang kebijakan baru yang lebih efektif.

Analisis biaya dan manfaat (*Cost-Benefit Analysis*) juga sering digunakan dalam proses perumusan kebijakan pendidikan. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan antara biaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Dengan menggunakan analisis ini, pembuat kebijakan dapat menentukan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat terbesar dengan penggunaan sumber daya yang paling efisien. Menurut William N. Dunn dalam *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (2018), pendekatan rasional dalam analisis kebijakan membantu pemerintah memilih alternatif kebijakan yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan publik. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan

yang diambil benar-benar mampu meningkatkan kualitas sistem pendidikan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Gambar 1. *Cost-Benefit Analysis*



Sumber: *UVI Consultant*

2. Model Rasional dalam Analisis Kebijakan

Model rasional dalam analisis kebijakan merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam studi kebijakan publik untuk menjelaskan bagaimana keputusan kebijakan seharusnya diambil secara sistematis dan terstruktur. Model ini menekankan bahwa proses pengambilan keputusan kebijakan perlu dilakukan melalui tahapan analisis yang logis dan berbasis informasi yang memadai. Dalam konteks kebijakan pendidikan, model rasional bertujuan untuk membantu pemerintah merancang kebijakan yang mampu menjawab berbagai permasalahan pendidikan secara efektif dengan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi yang tersedia. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya penggunaan data, penelitian, dan evaluasi kebijakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan.

Tahap pertama dalam model rasional adalah identifikasi masalah pendidikan. Pada tahap ini, pembuat kebijakan berupaya memahami secara jelas berbagai permasalahan yang terjadi dalam sistem pendidikan, seperti rendahnya kualitas pembelajaran, ketimpangan akses pendidikan, atau tingginya angka putus sekolah. Identifikasi masalah biasanya dilakukan melalui analisis data statistik pendidikan, laporan evaluasi program, serta berbagai studi akademik yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Pemahaman yang tepat mengenai masalah menjadi langkah awal yang sangat penting karena akan menentukan arah kebijakan yang akan dirumuskan.

Tahap berikutnya adalah perumusan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan berfungsi sebagai arah yang ingin dicapai melalui intervensi kebijakan yang dirancang oleh pemerintah. Dalam kebijakan pendidikan, tujuan tersebut dapat berupa peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, atau penguatan sistem pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perumusan tujuan yang jelas dan terukur sangat penting agar kebijakan yang dirancang dapat dievaluasi secara objektif.

Tahap selanjutnya adalah pengembangan berbagai alternatif kebijakan. Pada tahap ini, pembuat kebijakan merancang beberapa opsi kebijakan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap alternatif kebijakan memiliki pendekatan, strategi, serta konsekuensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, berbagai alternatif tersebut perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui kelebihan dan keterbatasannya.

Tahap berikutnya adalah evaluasi dampak dari setiap alternatif. Dalam tahap ini, pembuat kebijakan menilai kemungkinan dampak yang akan muncul dari masing-masing alternatif kebijakan, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun dampak sosialnya. Analisis ini sering melibatkan penggunaan berbagai metode analisis kebijakan seperti analisis biaya dan manfaat, analisis dampak kebijakan, serta kajian terhadap pengalaman kebijakan serupa di tempat lain.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pembuat kebijakan kemudian melakukan pemilihan alternatif kebijakan yang paling optimal. Alternatif yang dipilih biasanya merupakan opsi yang dianggap paling mampu mencapai tujuan kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang paling efisien serta memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Setelah alternatif kebijakan dipilih, tahap berikutnya adalah implementasi kebijakan, yaitu proses pelaksanaan kebijakan oleh berbagai institusi pemerintah dan lembaga pendidikan yang terkait.

Tahap terakhir dalam model rasional adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan yang ada atau merancang kebijakan baru yang lebih efektif. Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, model rasional membantu

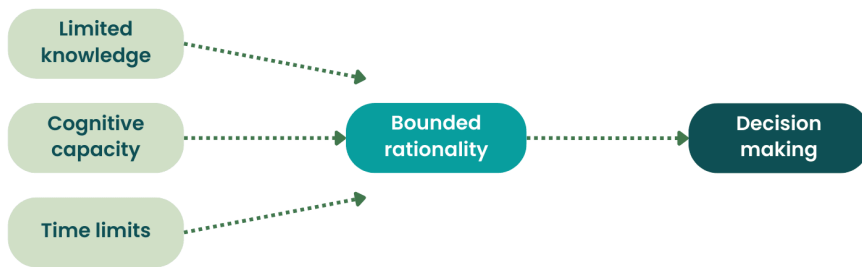
memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan politik semata, tetapi juga didasarkan pada analisis yang sistematis serta bukti empiris yang kuat.

3. Keterbatasan Rasionalitas dalam Kebijakan Pendidikan

Meskipun pendekatan rasional sangat penting dalam proses perumusan kebijakan pendidikan, dalam praktiknya pengambilan keputusan kebijakan sering kali menghadapi berbagai keterbatasan. Model rasional mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan memiliki informasi yang lengkap, waktu yang cukup, serta kemampuan analisis yang memadai untuk mengevaluasi semua alternatif kebijakan yang tersedia. Namun dalam realitas pemerintahan, kondisi tersebut jarang terpenuhi secara sempurna. Proses kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan, sering berlangsung dalam situasi yang penuh ketidakpastian, keterbatasan informasi, serta berbagai tekanan politik dan administratif. Akibatnya, keputusan kebijakan yang diambil tidak selalu sepenuhnya rasional dalam arti ideal sebagaimana digambarkan dalam model rasional.

Salah satu konsep yang menjelaskan keterbatasan tersebut adalah *bounded rationality* atau rasionalitas terbatas yang diperkenalkan oleh Herbert A. Simon. Dalam karya klasiknya *Administrative Behavior* (1997), Simon menjelaskan bahwa kemampuan individu dalam mengambil keputusan rasional dibatasi oleh keterbatasan informasi, keterbatasan waktu, serta keterbatasan kapasitas kognitif dalam memproses berbagai alternatif keputusan. Oleh karena itu, dalam banyak situasi pembuat kebijakan tidak mencari keputusan yang paling optimal secara teoritis, melainkan memilih keputusan yang dianggap cukup memadai atau *satisficing*. Konsep ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan kebijakan publik sering kali merupakan proses yang pragmatis dan adaptif terhadap berbagai keterbatasan yang ada.

Gambar 2. *Rounded Rationality Works*



Sumber: *WallStreetMojo*

Pada konteks kebijakan pendidikan, keterbatasan rasionalitas dapat muncul karena kompleksitas sistem pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan melibatkan berbagai komponen yang saling berkaitan, seperti kurikulum, tenaga pendidik, infrastruktur pendidikan, pembiayaan, serta karakteristik sosial budaya masyarakat. Kompleksitas tersebut membuat proses analisis kebijakan menjadi lebih sulit karena setiap kebijakan yang diambil dapat menghasilkan dampak yang beragam dan tidak selalu mudah diprediksi. Selain itu, data yang tersedia sering kali tidak sepenuhnya mampu menggambarkan seluruh dinamika yang terjadi dalam sistem pendidikan.

Keterbatasan rasionalitas juga dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan antar aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Kebijakan pendidikan biasanya melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi profesi guru, masyarakat, serta kelompok kepentingan lainnya. Setiap aktor tersebut memiliki kepentingan, nilai, dan perspektif yang berbeda terhadap kebijakan pendidikan. Perbedaan kepentingan ini sering menimbulkan proses negosiasi dan kompromi yang mempengaruhi hasil akhir kebijakan.

D. Pendidikan dalam Arena Politik dan Relasi Kekuasaan

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan relasi kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik dan administrasi publik, pendidikan merupakan arena strategis yang sering menjadi ruang kontestasi kepentingan berbagai aktor, baik negara, masyarakat, maupun kelompok kepentingan lainnya. Kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan

Arsitektur Kebijakan Pendidikan Dalam Administrasi Publik **14**

teknokratis atau pedagogis, tetapi juga dipengaruhi oleh proses politik, distribusi kekuasaan, serta ideologi yang dianut oleh pemerintah dan masyarakat.

1. Pendidikan sebagai Arena Politik Publik

Pendidikan dapat dipahami sebagai salah satu arena penting dalam politik publik karena memiliki peran strategis dalam membentuk generasi masa depan suatu bangsa. Sistem pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan politik yang mempengaruhi nilai, sikap, dan orientasi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai keputusan yang berkaitan dengan pendidikan sering kali menjadi bagian dari agenda politik negara. Pemerintah dan aktor politik memandang pendidikan sebagai sektor kebijakan yang sangat penting karena melalui pendidikannya dapat mempengaruhi arah pembangunan bangsa serta membentuk karakter warga negara di masa depan.

Pada praktiknya, berbagai isu pendidikan sering menjadi bahan perdebatan dalam proses politik publik. Salah satu isu yang sering menimbulkan diskusi politik adalah kurikulum nasional. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan kepada peserta didik, nilai-nilai yang ditanamkan, serta kompetensi yang diharapkan dari lulusan sistem pendidikan. Karena kurikulum berkaitan langsung dengan pembentukan pengetahuan dan cara berpikir generasi muda, perubahan kurikulum sering kali menjadi keputusan politik yang dipengaruhi oleh visi dan prioritas pemerintah yang sedang berkuasa. Perdebatan mengenai kurikulum dapat mencakup berbagai aspek, seperti penekanan pada pendidikan karakter, penguatan sains dan teknologi, atau integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam proses pembelajaran.

Isu lain yang sering menjadi perdebatan politik adalah ideologi pendidikan. Sistem pendidikan tidak pernah sepenuhnya netral karena selalu mencerminkan nilai-nilai dan pandangan ideologis tertentu yang dianut oleh suatu negara atau pemerintahan. Melalui pendidikan, negara dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan, prinsip-prinsip demokrasi, maupun pandangan tertentu mengenai hubungan antara individu dan masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ideologis dalam

masyarakat sering kali tercermin dalam perdebatan mengenai arah dan tujuan pendidikan nasional.

Anggaran pendidikan juga menjadi salah satu isu politik yang penting. Alokasi anggaran pendidikan mencerminkan prioritas pemerintah dalam pembangunan nasional. Perdebatan mengenai anggaran pendidikan biasanya berkaitan dengan besarnya dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, distribusi anggaran antara berbagai tingkat pendidikan, serta efektivitas penggunaan dana pendidikan. Keputusan mengenai anggaran pendidikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan pertimbangan politik mengenai prioritas pembangunan dan distribusi sumber daya publik.

2. Relasi Kekuasaan dalam Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan tidak hanya merupakan hasil dari analisis teknis dan perencanaan administratif, tetapi juga merupakan produk dari relasi kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor dalam proses kebijakan publik. Dalam perspektif ilmu politik dan administrasi publik, proses perumusan kebijakan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh interaksi, negosiasi, dan bahkan konflik kepentingan antara berbagai pihak yang memiliki peran dalam sistem pendidikan. Setiap aktor yang terlibat dalam proses kebijakan membawa kepentingan, nilai, serta agenda yang berbeda-beda, sehingga arah kebijakan pendidikan yang dihasilkan sering merupakan hasil dari dinamika kekuasaan di antara para aktor tersebut.

Salah satu aktor utama dalam relasi kekuasaan kebijakan pendidikan adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat biasanya memiliki kewenangan strategis dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional, menetapkan standar pendidikan, serta menentukan arah pengembangan sistem pendidikan secara keseluruhan. Melalui kementerian yang membidangi pendidikan, pemerintah pusat merancang berbagai regulasi, program nasional, serta kebijakan strategis yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah negara. Karena memiliki kewenangan formal yang besar, pemerintah pusat sering menjadi aktor dominan dalam proses perumusan kebijakan pendidikan.

Pada banyak sistem pemerintahan modern, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam implementasi dan pengelolaan pendidikan. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah sering diberi kewenangan untuk mengelola lembaga pendidikan di wilayahnya, mengatur distribusi sumber daya pendidikan, serta menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan lokal. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sering mencerminkan dinamika kekuasaan dalam sistem pendidikan, terutama dalam hal pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan.

Parlemen juga berperan penting dalam proses kebijakan pendidikan. Parlemen memiliki fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam bidang pendidikan. Melalui proses legislasi, parlemen dapat menetapkan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional, menentukan prioritas kebijakan pendidikan, serta mengawasi penggunaan anggaran pendidikan. Oleh karena itu, keputusan-keputusan terkait pendidikan sering kali melibatkan proses politik yang berlangsung di lembaga legislatif.

3. Peran Negara dalam Mengatur Sistem Pendidikan

Negara memiliki peran utama dalam mengatur dan mengarahkan sistem pendidikan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diselenggarakan secara teratur, berkualitas, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam perspektif administrasi publik, pendidikan merupakan salah satu sektor strategis yang memerlukan pengaturan negara karena berkaitan langsung dengan pembentukan sumber daya manusia serta perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merancang kerangka kebijakan yang mampu mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan sistem pendidikan hingga pengawasan terhadap kualitas layanan pendidikan.

Salah satu peran penting negara dalam sistem pendidikan adalah menetapkan kurikulum nasional. Kurikulum merupakan pedoman utama yang mengatur proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Melalui kurikulum, pemerintah menentukan materi pembelajaran, kompetensi

yang harus dicapai oleh peserta didik, serta nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam sistem pendidikan. Penetapan kurikulum nasional bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan di berbagai wilayah memiliki standar yang relatif seragam serta sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, kurikulum juga menjadi sarana bagi negara untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai kebangsaan ke dalam proses pendidikan.

Negara juga memiliki peran dalam menentukan standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan. Standar pendidikan biasanya mencakup berbagai aspek seperti standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar tenaga pendidik, serta standar sarana dan prasarana pendidikan. Dengan adanya standar tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap institusi pendidikan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penetapan standar pendidikan juga berfungsi sebagai acuan bagi proses evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di berbagai tingkat pendidikan.

Peran negara juga terlihat dalam pengaturan sistem pendanaan pendidikan. Pembiayaan merupakan faktor penting yang menentukan keberlangsungan dan kualitas sistem pendidikan. Pemerintah biasanya bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran pendidikan yang memadai guna mendukung berbagai kegiatan pendidikan, seperti pembangunan infrastruktur sekolah, penyediaan fasilitas pembelajaran, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Selain itu, negara juga mengatur mekanisme distribusi dana pendidikan agar dapat digunakan secara efektif dan menjangkau berbagai wilayah serta kelompok masyarakat.

E. Dampak Kebijakan terhadap Struktur Sosial dan Pembelajaran

Kebijakan pendidikan memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap kehidupan sosial masyarakat serta terhadap proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Dalam perspektif kebijakan publik

dan administrasi publik, kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif untuk mengatur sistem pendidikan, tetapi juga sebagai mekanisme yang dapat membentuk struktur sosial, mobilitas sosial, serta kualitas proses belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan yang dirumuskan oleh pemerintah akan menghasilkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan pedagogis yang signifikan.

1. Kebijakan Pendidikan sebagai Instrumen Perubahan Sosial

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh negara untuk mendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai mekanisme strategis yang dapat mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat. Melalui kebijakan pendidikan, pemerintah dapat merancang berbagai program dan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta menciptakan perubahan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pendidikan sering dipandang sebagai salah satu sektor kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap arah perkembangan masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu bentuk perubahan sosial yang dapat didorong melalui kebijakan pendidikan adalah perubahan dalam pola distribusi kesempatan pendidikan. Kebijakan pendidikan dapat dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses. Pemerintah dapat mengembangkan berbagai program seperti pembangunan sekolah di daerah terpencil, pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih merata di berbagai wilayah. Melalui kebijakan tersebut, negara berupaya menciptakan distribusi kesempatan pendidikan yang lebih adil sehingga setiap individu memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi dirinya.

Kebijakan pendidikan juga berperan dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Mobilitas sosial merujuk pada kemampuan

individu atau kelompok untuk berpindah dari satu posisi sosial ke posisi sosial lainnya, terutama dalam hal status ekonomi dan sosial. Pendidikan sering dianggap sebagai salah satu jalur utama yang memungkinkan terjadinya mobilitas sosial tersebut. Dengan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas, individu memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik serta meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya. Dalam jangka panjang, peningkatan mobilitas sosial melalui pendidikan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Kebijakan pendidikan juga memiliki dampak penting terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui sistem pendidikan yang terstruktur, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan berpikir yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Individu yang memiliki pendidikan yang baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu negara.

2. Pendidikan dan Mobilitas Sosial

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Mobilitas sosial merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk berpindah dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya, baik secara vertikal (naik atau turun dalam status sosial) maupun horizontal. Dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan pendidikan menjadi instrumen strategis yang dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonominya. Ketika negara mampu menyediakan sistem pendidikan yang adil, terbuka, dan inklusif, maka pendidikan dapat berfungsi sebagai “tangga sosial” yang memungkinkan individu dari latar belakang ekonomi rendah memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik. Melalui proses pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang

dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja yang lebih produktif dan memiliki pendapatan yang lebih tinggi.

Kebijakan pendidikan yang dirancang secara tepat dapat memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan belajar. Hal ini penting karena ketimpangan akses pendidikan sering menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah biasanya menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang kurang mampu tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Kebijakan seperti program beasiswa, pendidikan gratis, serta pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan merupakan contoh upaya nyata negara dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Program beasiswa, misalnya, memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, hambatan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang utama bagi seseorang untuk meraih pendidikan yang berkualitas.

Kebijakan pendidikan gratis juga memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan. Ketika biaya pendidikan dapat ditekan atau bahkan dihilangkan pada tingkat tertentu, lebih banyak keluarga yang mampu menyekolahkan anak-anaknya. Hal ini pada akhirnya meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan dan membuka peluang mobilitas sosial bagi generasi muda. Pemerataan akses pendidikan juga menjadi aspek yang sangat penting, terutama di negara yang memiliki kesenjangan pembangunan antarwilayah. Pembangunan sekolah di daerah terpencil, penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta penguatan infrastruktur pendidikan merupakan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan belajar yang sama.

3. Pendidikan dan Reproduksi Ketimpangan Sosial

Pendidikan pada dasarnya sering dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan mobilitas sosial dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya sistem pendidikan tidak selalu mampu menjalankan fungsi tersebut secara merata. Dalam beberapa kondisi, pendidikan justru dapat memperkuat dan mereproduksi ketimpangan sosial yang sudah ada di dalam masyarakat. Hal ini terjadi

ketika akses terhadap pendidikan berkualitas tidak tersedia secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih besar biasanya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Akibatnya, sistem pendidikan secara tidak langsung dapat mempertahankan struktur ketimpangan sosial yang telah ada sebelumnya.

Gambar 3. Ketimpangan Sosial



Sumber: *Tirto.id*

Salah satu faktor yang menyebabkan reproduksi ketimpangan sosial dalam pendidikan adalah terbatasnya akses terhadap institusi pendidikan berkualitas. Sekolah-sekolah dengan fasilitas yang baik, tenaga pengajar yang berkualitas, serta lingkungan belajar yang mendukung sering kali berada di wilayah perkotaan atau hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu. Sebaliknya, banyak sekolah di daerah terpencil atau di wilayah dengan kondisi ekonomi rendah yang memiliki keterbatasan fasilitas, kekurangan tenaga pendidik, serta kualitas pembelajaran yang kurang optimal. Perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam hasil belajar siswa, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peluang dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja.

Tingginya biaya pendidikan juga dapat menjadi faktor yang memperkuat ketimpangan sosial. Meskipun pemerintah telah berupaya menyediakan berbagai program bantuan pendidikan, pada kenyataannya banyak keluarga dari kelompok ekonomi rendah yang masih menghadapi kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Biaya pendidikan tidak hanya mencakup uang sekolah, tetapi juga biaya buku, transportasi, seragam, serta kebutuhan pendukung lainnya. Ketika biaya pendidikan menjadi terlalu tinggi, keluarga miskin sering kali harus mengambil keputusan sulit, seperti menghentikan pendidikan anak atau membatasi jenjang pendidikan yang dapat ditempuh. Kondisi ini menyebabkan peluang pendidikan yang tidak seimbang antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.

BAB II

EVOLUSI PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN

Evolusi paradigma administrasi publik menunjukkan perubahan cara negara mengelola kebijakan dan pelayanan publik seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi global. Perkembangan tersebut dimulai dari paradigma administrasi publik klasik yang menekankan struktur birokrasi dan hierarki organisasi, kemudian berkembang menuju pendekatan *New Public Management* yang menekankan efisiensi, kinerja, dan prinsip manajerial dalam sektor publik, hingga paradigma *New Public Governance* yang menekankan kolaborasi, jejaring kebijakan, dan keterlibatan berbagai aktor dalam tata kelola publik (Osborne, 2018; Denhardt & Denhardt, 2020). Perubahan paradigma ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengelolaan sektor pendidikan, karena sistem pendidikan tidak lagi dikelola secara sentralistik oleh negara, tetapi melibatkan berbagai tingkat pemerintahan, lembaga pendidikan, masyarakat, serta organisasi internasional dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Menurut Mahardhani (2023), evolusi paradigma administrasi publik mendorong transformasi tata kelola pendidikan menuju sistem yang lebih adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan global. Oleh karena itu, memahami perkembangan paradigma administrasi publik menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pendidikan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks tata kelola publik modern.

A. Administrasi Publik Klasik dan Model Birokratik

Administrasi publik klasik merupakan fondasi awal dalam perkembangan ilmu administrasi publik yang membentuk cara negara mengelola organisasi pemerintahan, termasuk sektor pendidikan. Paradigma ini berkembang pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 dan menekankan pentingnya struktur birokrasi yang rasional, sistematis, dan berbasis aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka ini, organisasi publik dipandang sebagai sistem formal yang harus diatur melalui hierarki yang jelas, pembagian kerja yang tegas, serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjamin efisiensi dan stabilitas administrasi negara (Denhardt & Denhardt, 2020; Frederickson *et al.*, 2018). Berikut beberapa karakteristik utama administrasi publik klasik dan model birokratik serta implikasinya terhadap pengelolaan pendidikan.

1. Konsep Dasar Administrasi Publik Klasik

Konsep dasar administrasi publik klasik merupakan salah satu paradigma awal dalam kajian administrasi publik yang menekankan pentingnya rasionalitas organisasi dalam pengelolaan pemerintahan. Rasionalitas organisasi dalam paradigma ini merujuk pada pengelolaan organisasi berdasarkan prinsip logika, aturan formal, pembagian tugas yang jelas, serta prosedur kerja yang sistematis. Administrasi publik klasik muncul seiring dengan berkembangnya negara modern yang menghadapi tuntutan pengelolaan organisasi pemerintahan yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya fungsi dan tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan publik, dibutuhkan sistem administrasi yang mampu mengatur berbagai aktivitas pemerintahan secara terstruktur, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pendekatan administrasi publik klasik menekankan pentingnya struktur birokrasi yang jelas, hierarki kewenangan yang tegas, serta standar operasional yang baku dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pada kerangka administrasi publik klasik, tujuan utama dari pengelolaan birokrasi adalah menciptakan sistem administrasi yang efisien, stabil, dan dapat diprediksi dalam menjalankan kebijakan publik.

Efisiensi dipandang sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang optimal, sementara stabilitas merujuk pada keberlangsungan sistem administrasi yang konsisten dan tidak mudah berubah. Prediktabilitas menjadi aspek penting karena organisasi pemerintahan harus mampu memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, administrasi publik klasik menekankan pentingnya aturan formal, prosedur kerja yang baku, serta pembagian tugas yang jelas di antara aparatur birokrasi. Dengan adanya aturan dan prosedur yang sistematis, setiap pegawai pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan terhindar dari tindakan yang bersifat subjektif.

Paradigma administrasi publik klasik juga memandang bahwa proses perumusan kebijakan publik sebaiknya dilakukan secara terpusat oleh otoritas pemerintah yang memiliki kewenangan. Setelah kebijakan dirumuskan, pelaksanaannya kemudian diserahkan kepada aparat birokrasi yang bekerja berdasarkan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam sistem ini, birokrasi berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang bertugas menerjemahkan keputusan pemerintah ke dalam berbagai program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di lapangan. Struktur birokrasi yang hierarkis memungkinkan adanya mekanisme koordinasi dan pengawasan yang jelas, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara teratur dan terkendali.

2. Model Birokrasi Rasional

Model birokrasi rasional merupakan salah satu konsep penting dalam teori administrasi publik klasik yang dikembangkan oleh Max Weber. Weber menjelaskan bahwa birokrasi adalah bentuk organisasi yang paling efektif dan rasional untuk mengelola administrasi negara yang semakin kompleks. Dalam pandangannya, organisasi pemerintahan membutuhkan sistem kerja yang terstruktur, jelas, dan berbasis aturan agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara konsisten. Birokrasi rasional dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan administrasi berjalan secara sistematis, terkoordinasi, dan bebas dari kepentingan pribadi. Oleh karena itu, model ini menekankan pentingnya

aturan formal, pembagian tugas yang jelas, serta sistem manajemen yang profesional dalam organisasi pemerintahan.

Menurut Weber (2019), birokrasi modern memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari bentuk organisasi tradisional. Pertama, adanya hierarki kewenangan yang jelas dalam struktur organisasi. Setiap posisi dalam birokrasi memiliki tingkat kewenangan tertentu yang tersusun secara berjenjang, sehingga alur komando dan tanggung jawab dapat berjalan secara teratur. Hierarki ini memungkinkan proses pengambilan keputusan dan pengawasan dilakukan secara sistematis. Kedua, birokrasi memiliki pembagian tugas yang spesifik. Setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan adanya spesialisasi kerja ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas administrasi.

Ciri berikutnya adalah adanya sistem aturan formal yang mengatur perilaku organisasi. Dalam birokrasi rasional, setiap kegiatan administrasi harus mengikuti prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan. Aturan formal ini berfungsi untuk menciptakan keteraturan dalam organisasi serta memberikan pedoman yang jelas bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, birokrasi juga menerapkan sistem pengangkatan pegawai berdasarkan kompetensi. Artinya, pegawai direkrut dan dipromosikan berdasarkan kualifikasi, kemampuan, serta prestasi kerja, bukan karena hubungan pribadi atau kedekatan politik. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi diisi oleh tenaga profesional yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugasnya.

3. Pemisahan Politik dan Administrasi

Salah satu gagasan penting dalam perkembangan administrasi publik klasik adalah konsep pemisahan antara politik dan administrasi. Konsep ini diperkenalkan oleh Woodrow Wilson yang dalam tulisannya menjelaskan bahwa fungsi politik dan fungsi administrasi seharusnya dipisahkan secara jelas dalam sistem pemerintahan modern. Menurut Wilson (2017), politik memiliki peran utama dalam menentukan arah dan tujuan kebijakan publik, sedangkan administrasi bertugas untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara profesional, efisien, dan

berdasarkan prinsip manajemen yang rasional. Dengan kata lain, aktor politik seperti pemerintah dan lembaga legislatif bertanggung jawab dalam proses perumusan kebijakan, sementara aparat birokrasi berperan sebagai pelaksana kebijakan yang bekerja berdasarkan aturan dan prosedur administratif yang telah ditetapkan.

Gagasan pemisahan antara politik dan administrasi muncul sebagai respons terhadap praktik pemerintahan pada masa sebelumnya yang sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, patronase, dan hubungan pribadi. Pada masa tersebut, jabatan birokrasi sering diberikan berdasarkan kedekatan politik dengan penguasa, bukan berdasarkan kemampuan atau kompetensi. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti rendahnya profesionalisme aparatur pemerintah serta ketidakefisienan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Oleh karena itu, konsep pemisahan politik dan administrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang netral, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya pemisahan tersebut, birokrasi diharapkan dapat bekerja secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek.

Pada kerangka administrasi publik klasik, birokrasi dipandang sebagai organisasi yang harus menjalankan tugas secara teknis dan profesional. Aparatur birokrasi tidak seharusnya terlibat dalam proses politik praktis, melainkan fokus pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin politik. Hal ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas administrasi pemerintahan serta memastikan bahwa kebijakan publik dapat dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, pemisahan antara politik dan administrasi juga diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan, karena masing-masing aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas.

B. *New Public Management* dan Logika Efisiensi

New Public Management (NPM) merupakan paradigma administrasi publik yang muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap berbagai kelemahan model birokrasi klasik. Paradigma ini berkembang terutama pada tahun 1980-an di negara-negara Barat seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. NPM lahir dari

kritik bahwa birokrasi tradisional terlalu kaku, lambat, tidak efisien, serta kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini berusaha mereformasi sektor publik dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta, seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas kinerja, dan orientasi pada hasil (Hood, 1991; Osborne, 2018; Denhardt & Denhardt, 2020).

Pada paradigma ini, organisasi publik tidak lagi dipandang hanya sebagai institusi administratif yang menjalankan aturan, tetapi sebagai organisasi manajerial yang harus menghasilkan kinerja yang terukur dan memberikan layanan publik yang berkualitas. NPM menekankan bahwa pemerintah harus mengelola sumber daya publik secara lebih efisien serta memastikan bahwa kebijakan publik menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam sektor pendidikan, pendekatan ini memengaruhi berbagai reformasi manajemen pendidikan, termasuk desentralisasi pengelolaan sekolah, evaluasi berbasis kinerja, serta peningkatan akuntabilitas lembaga pendidikan (OECD, 2023). Berikut beberapa aspek utama *New Public Management* dan implikasinya terhadap kebijakan dan tata kelola pendidikan.

1. Latar Belakang Munculnya *New Public Management*

Munculnya paradigma *New Public Management* (NPM) pada akhir abad ke-20 tidak terlepas dari berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi cara pemerintah mengelola administrasi publik. Paradigma ini berkembang sebagai respons terhadap berbagai kelemahan yang dianggap melekat pada model administrasi publik tradisional yang berbasis birokrasi klasik. Pada masa sebelumnya, sistem birokrasi pemerintahan sering dikritik karena dianggap terlalu besar, kaku, serta kurang efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Struktur birokrasi yang hierarkis dan sangat bergantung pada aturan formal sering kali membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Akibatnya, banyak kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan mulai mencari pendekatan baru yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sektor publik.

Salah satu faktor penting yang mendorong lahirnya paradigma *New Public Management* adalah kritik terhadap birokrasi tradisional.

Model birokrasi klasik yang menekankan prosedur administratif yang ketat sering dianggap tidak mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial yang cepat. Dalam banyak kasus, birokrasi dinilai terlalu fokus pada kepatuhan terhadap aturan dibandingkan pada hasil atau kinerja pelayanan publik. Kondisi ini memunculkan tuntutan agar organisasi pemerintah lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada hasil dalam menjalankan tugasnya.

Munculnya NPM juga dipengaruhi oleh krisis fiskal yang dialami banyak negara pada akhir abad ke-20. Pada periode tersebut, banyak pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran akibat perlambatan ekonomi, meningkatnya pengeluaran publik, serta tekanan dari berbagai program kesejahteraan sosial. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mencari cara baru dalam mengelola sumber daya publik agar lebih efisien. reformasi administrasi kemudian diarahkan pada upaya mengurangi pemborosan anggaran, meningkatkan produktivitas sektor publik, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Faktor lain yang turut mempengaruhi munculnya paradigma *New Public Management* adalah pengaruh teori ekonomi pasar, khususnya gagasan ekonomi neoliberal yang berkembang pada periode tersebut. Pendekatan ini mendorong penggunaan mekanisme pasar dalam penyediaan layanan publik, seperti kompetisi antar penyedia layanan, kontraktualisasi layanan publik, serta keterlibatan sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah. Dengan adanya unsur kompetisi dan efisiensi seperti dalam sektor bisnis, diharapkan organisasi publik dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Prinsip Utama *New Public Management*

New Public Management (NPM) merupakan paradigma administrasi publik yang menekankan pendekatan manajerial modern dalam pengelolaan organisasi pemerintah. Paradigma ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan birokrasi tradisional yang dianggap terlalu kaku, berorientasi pada prosedur, dan kurang memperhatikan hasil kebijakan. Oleh karena itu, NPM menawarkan berbagai prinsip yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya

orientasi pada hasil, manajemen berbasis kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, kompetisi dalam penyediaan layanan publik, serta desentralisasi manajemen dalam organisasi pemerintahan.

Salah satu prinsip utama *New Public Management* adalah orientasi pada hasil (*results-oriented management*). Dalam pendekatan ini, organisasi publik tidak lagi hanya dinilai dari kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga dari hasil nyata yang dihasilkan oleh kebijakan atau program pemerintah. Artinya, keberhasilan suatu lembaga publik diukur berdasarkan dampak yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur output dan outcome dari setiap program yang dijalankan. Dengan adanya sistem pengukuran hasil tersebut, organisasi publik dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Prinsip berikutnya adalah manajemen berbasis kinerja. Dalam kerangka ini, setiap unit organisasi publik diharapkan memiliki target kinerja yang terukur dan realistis. Target tersebut kemudian menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi maupun individu yang bekerja di dalamnya. Evaluasi kinerja dilakukan secara sistematis dan berkala untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang dilaksanakan berjalan secara efektif. Pendekatan ini juga mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja secara lebih profesional karena kinerjanya dinilai berdasarkan capaian yang dapat diukur secara objektif.

New Public Management juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Pemerintah diharapkan mampu mengelola anggaran publik secara hemat, produktif, dan bertanggung jawab. Setiap program yang dijalankan harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat serta menggunakan sumber daya secara optimal. Jika suatu program dinilai tidak efektif atau tidak memberikan hasil yang signifikan, maka program tersebut perlu dievaluasi atau bahkan dihentikan. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari pemborosan anggaran serta memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat guna.

3. Transformasi Peran Pemerintah dalam Paradigma NPM

Pada paradigma *New Public Management* (NPM), terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam cara pemerintah menjalankan perannya dalam penyelenggaraan layanan publik. Jika dalam paradigma administrasi publik klasik pemerintah berperan sebagai penyedia utama layanan publik yang mengelola seluruh proses secara langsung melalui birokrasi, maka dalam paradigma NPM peran tersebut mengalami transformasi. Pemerintah tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya aktor yang harus menyediakan seluruh layanan kepada masyarakat, tetapi lebih berfungsi sebagai pengatur, pengarah, dan pengawas dalam sistem pelayanan publik. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, serta kualitas pelayanan publik di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Pada kerangka NPM, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa layanan publik dapat diakses oleh masyarakat secara adil dan berkualitas. Namun, cara pemerintah menjalankan tanggung jawab tersebut mengalami perubahan. Pemerintah lebih menekankan fungsi regulasi dan pengawasan dibandingkan dengan pelaksanaan langsung layanan publik. Artinya, pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan, standar pelayanan, serta aturan yang harus dipatuhi oleh berbagai penyedia layanan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi kinerja serta memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah tetap memiliki kontrol terhadap sistem pelayanan publik meskipun tidak selalu menjadi pelaksana langsung dari layanan tersebut.

Transformasi peran ini juga membuka peluang bagi keterlibatan berbagai aktor non-pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Dalam paradigma NPM, layanan publik dapat diselenggarakan melalui kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga independen lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya, inovasi, serta keahlian yang dimiliki oleh berbagai pihak di luar pemerintah. Melalui kemitraan tersebut, diharapkan penyediaan layanan publik dapat dilakukan secara lebih efisien, kompetitif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam sektor pendidikan, misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan swasta, organisasi non-profit, maupun lembaga masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas.

Konsep perubahan peran pemerintah dalam paradigma NPM sering dijelaskan melalui prinsip “*Steering rather than rowing*”, yang diperkenalkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam karyanya pada tahun 1992. Prinsip ini menggambarkan bahwa pemerintah seharusnya lebih berperan dalam mengemudikan arah kebijakan (*Steering*) daripada mengayuh secara langsung seluruh kegiatan pelayanan publik (*rowing*). Dengan kata lain, pemerintah berfungsi sebagai pengarah yang menentukan visi, tujuan, serta kerangka regulasi, sementara pelaksanaan layanan dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai. Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik karena memungkinkan adanya inovasi serta kompetisi di antara penyedia layanan.

C. *New Public Governance* dan *Multi-Level Governance*

Perkembangan administrasi publik pada akhir abad ke-20 menunjukkan bahwa paradigma *New Public Management* (NPM) tidak sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas masalah publik yang semakin meningkat. Meskipun NPM berhasil meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam sektor publik, pendekatan ini sering dikritik karena terlalu menekankan logika pasar dan manajemen bisnis dalam pengelolaan pelayanan publik. Dalam konteks ini, muncul paradigma baru yang dikenal sebagai *New Public Governance* (NPG) yang menekankan pentingnya kolaborasi, jaringan kebijakan, serta partisipasi berbagai aktor dalam proses pemerintahan (Osborne, 2018; Torfing *et al.*, 2020).

Paradigma *New Public Governance* memandang bahwa pemerintahan modern tidak lagi dapat dijalankan hanya oleh pemerintah sebagai aktor tunggal. Sebaliknya, penyelenggaraan kebijakan publik melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi sosial, serta lembaga internasional. Oleh karena itu, tata kelola

publik modern lebih bersifat kolaboratif, jaringan, dan multi-aktor. Dalam sektor pendidikan, pendekatan ini menjadi sangat penting karena kebijakan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat, organisasi pendidikan, dunia usaha, serta lembaga internasional (Mahardhani, 2024). Berikut penjelasan beberapa aspek utama *New Public Governance* dan konsep *Multi-Level Governance* dalam tata kelola pendidikan.

1. Konsep Dasar *New Public Governance*

Konsep *New Public Governance* (NPG) merupakan salah satu paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara berbagai aktor dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Paradigma ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan administrasi publik sebelumnya, yaitu birokrasi klasik dan *New Public Management* (NPM). Birokrasi klasik dianggap terlalu kaku dan terpusat pada pemerintah, sedangkan NPM dinilai terlalu menekankan efisiensi manajerial dan mekanisme pasar. Dalam menghadapi berbagai persoalan publik yang semakin kompleks, kedua pendekatan tersebut sering kali tidak cukup mampu menjawab kebutuhan tata kelola pemerintahan modern. Oleh karena itu, *New Public Governance* berkembang dengan menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berbasis jaringan dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik.

Pada paradigma *New Public Governance*, pemerintah tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya aktor yang memiliki kewenangan penuh dalam merancang dan melaksanakan kebijakan. Sebaliknya, pemerintah lebih berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan penghubung di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses tata kelola pemerintahan. Aktor-aktor tersebut dapat berasal dari sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, komunitas lokal, maupun berbagai institusi lainnya yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak tersebut, proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik menjadi lebih inklusif dan mampu mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara lebih luas.

Menurut Stephen P. Osborne (2018), *New Public Governance* menekankan bahwa pelayanan publik pada dasarnya tidak hanya dihasilkan oleh organisasi pemerintah semata, tetapi merupakan hasil dari interaksi dan kerja sama antara berbagai organisasi dalam jaringan tata kelola (*Governance Networks*). Jaringan ini menciptakan hubungan yang saling bergantung antara berbagai aktor yang memiliki peran, sumber daya, dan kepentingan yang berbeda. Melalui koordinasi dalam jaringan tersebut, berbagai organisasi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan tidak lagi hanya didasarkan pada struktur birokrasi yang hierarkis, tetapi juga melibatkan mekanisme koordinasi yang lebih fleksibel melalui jejaring kebijakan.

2. Pemerintahan Kolaboratif dalam Tata Kelola Publik

Salah satu konsep penting dalam paradigma *New Public Governance* adalah *Collaborative Governance* atau pemerintahan kolaboratif. Pendekatan ini menekankan bahwa penyelesaian masalah publik tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah secara sendiri, melainkan memerlukan kerja sama antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan sumber daya yang berbeda. Permasalahan publik modern, termasuk dalam bidang pendidikan, sering kali bersifat kompleks, multidimensional, dan saling berkaitan dengan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi penting karena memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja bersama dalam merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Menurut Ansell dan Gash (2008), *Collaborative Governance* merupakan suatu proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta, dalam suatu forum bersama yang bersifat formal dan berorientasi pada pencapaian kesepakatan atau konsensus. Dalam proses ini, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, serta kontribusi yang dapat mendukung keberhasilan suatu kebijakan. Melalui dialog, negosiasi, dan kerja sama yang berkelanjutan, para aktor tersebut berupaya mencapai keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, pemerintahan kolaboratif tidak

hanya menekankan pada hasil kebijakan, tetapi juga pada proses interaksi dan partisipasi yang terjadi dalam perumusan kebijakan tersebut.

Pada sektor pendidikan, pendekatan *Collaborative Governance* dapat dilihat melalui berbagai bentuk kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pihak di masyarakat. Salah satu contohnya adalah kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Dalam beberapa sistem pendidikan, masyarakat dilibatkan melalui komite sekolah atau forum partisipasi publik yang berperan dalam memberikan masukan terhadap pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan. Partisipasi masyarakat ini dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta relevansi program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pemerintahan kolaboratif dalam pendidikan juga tercermin dalam kerja sama antara lembaga pendidikan dan dunia usaha. Kolaborasi ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui kemitraan tersebut, lembaga pendidikan dapat memperoleh dukungan dalam bentuk program magang, pelatihan keterampilan, maupun pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, lulusan lembaga pendidikan diharapkan memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

3. Konsep *Multi-Level Governance*

Konsep *Multi-Level Governance* merupakan salah satu elemen penting dalam paradigma *New Public Governance* yang menekankan bahwa proses pengambilan keputusan publik tidak hanya terjadi pada satu tingkat pemerintahan saja. Dalam pendekatan ini, kebijakan publik dipahami sebagai hasil dari interaksi berbagai level pemerintahan yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam mengelola suatu isu publik. Perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks membuat banyak persoalan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu otoritas pemerintahan. Oleh karena itu, koordinasi antar berbagai tingkat pemerintahan menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan secara efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

Istilah *Multi-Level Governance* banyak digunakan dalam studi kebijakan publik, khususnya dalam kajian integrasi regional dan tata kelola pemerintahan modern. Konsep ini menjelaskan bahwa kekuasaan dan kewenangan dalam proses pembuatan kebijakan tidak sepenuhnya terpusat pada pemerintah nasional, melainkan tersebar pada berbagai tingkat pemerintahan. Dengan demikian, setiap level pemerintahan memiliki peran tertentu dalam proses perumusan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan tidak lagi bersifat hierarkis semata, tetapi lebih bersifat jaringan yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga pada tingkat yang berbeda.

Pada kerangka *Multi-Level Governance*, terdapat beberapa tingkat pemerintahan yang saling berinteraksi dalam proses kebijakan publik. Pertama adalah tingkat lokal, yang meliputi pemerintah daerah, pemerintah kota atau kabupaten, serta komunitas lokal yang berada di dalam masyarakat. Pada tingkat ini, kebijakan sering kali berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Kedua adalah tingkat nasional, yaitu pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan nasional serta menetapkan kerangka regulasi yang menjadi acuan bagi pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Terdapat pula tingkat regional, yang berkaitan dengan kerja sama antar negara dalam suatu kawasan tertentu. Pada tingkat ini, negara-negara dapat bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan bersama yang berkaitan dengan berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, maupun pembangunan sosial. Kerja sama regional ini sering dilakukan melalui organisasi atau forum antar negara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan koordinasi kebijakan. Tingkat yang lebih luas lagi adalah tingkat global, yang melibatkan organisasi internasional seperti lembaga-lembaga global yang memberikan rekomendasi, standar, maupun dukungan terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat internasional.

D. Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Fragmentasi Otoritas

Desentralisasi merupakan salah satu reformasi penting dalam administrasi publik modern yang bertujuan mendistribusikan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini berkembang luas sejak akhir abad ke-20 sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pemerintahan, memperkuat demokrasi lokal, serta meningkatkan responsivitas kebijakan publik terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam sektor pendidikan, desentralisasi membawa perubahan signifikan terhadap struktur pengambilan keputusan, tata kelola lembaga pendidikan, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan (Faguet, 2020; OECD, 2023).

Pada konteks administrasi publik, desentralisasi tidak hanya berkaitan dengan pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga menyangkut perubahan dalam distribusi kekuasaan, pengelolaan sumber daya, serta pola hubungan antara aktor-aktor dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, implementasi desentralisasi seringkali menghasilkan dinamika baru dalam tata kelola kebijakan pendidikan, termasuk munculnya fenomena fragmentasi otoritas yang dapat memengaruhi efektivitas koordinasi kebijakan (Mahardhani, 2023). Berikut beberapa aspek penting terkait desentralisasi, otonomi daerah, dan fragmentasi otoritas dalam kebijakan pendidikan.

1. Konsep Dasar Desentralisasi dalam Administrasi Publik

Konsep desentralisasi dalam administrasi publik merujuk pada proses pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan ini mencakup berbagai aspek pemerintahan, seperti pengelolaan kebijakan publik, penyediaan layanan masyarakat, hingga pengelolaan sumber daya dan anggaran di tingkat daerah. Desentralisasi berkembang sebagai bagian dari upaya reformasi administrasi publik untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan demokratis. Dalam sistem pemerintahan yang terlalu terpusat, pemerintah pusat sering menghadapi kesulitan dalam memahami secara mendalam kebutuhan masyarakat di berbagai daerah yang memiliki karakteristik sosial,

ekonomi, dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, desentralisasi dianggap sebagai mekanisme yang dapat mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pada kerangka administrasi publik modern, desentralisasi dipandang sebagai strategi penting untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan fleksibel karena tidak selalu harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi wilayahnya, sehingga dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, desentralisasi juga memungkinkan adanya inovasi dalam pengelolaan pemerintahan karena pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan berbagai program dan kebijakan yang sesuai dengan potensi daerahnya.

Desentralisasi juga bertujuan untuk memperkuat demokrasi lokal. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar di tingkat daerah, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pemilihan kepala daerah, forum musyawarah pembangunan, maupun keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program pemerintah daerah. Melalui proses tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi serta kebutuhannya secara langsung kepada pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam mengelola kebijakan di wilayahnya.

Tujuan penting lainnya dari desentralisasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menyediakan layanan publik yang lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, desentralisasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, karena masyarakat dapat secara langsung memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah di wilayahnya. Dengan adanya kedekatan antara pemerintah daerah dan masyarakat, mekanisme pengawasan publik dapat berjalan secara lebih efektif.

2. Bentuk-Bentuk Desentralisasi dalam Kebijakan Publik

Pada kajian administrasi publik, konsep desentralisasi tidak hanya dipahami sebagai pelimpahan kewenangan secara umum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga memiliki beberapa bentuk yang berbeda sesuai dengan jenis kewenangan yang dialihkan. Para ahli administrasi publik biasanya membedakan desentralisasi ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi politik. Ketiga bentuk ini memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, namun dalam praktik pemerintahan modern sering kali diterapkan secara bersamaan untuk menciptakan sistem tata kelola yang lebih efektif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bentuk pertama adalah desentralisasi administratif, yaitu pelimpahan kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada unit pemerintahan di tingkat daerah atau lokal. Dalam bentuk ini, pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk mengelola berbagai program publik serta menjalankan administrasi pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan kewenangan administratif memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayahnya. Misalnya, pemerintah daerah dapat mengelola pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur lokal, serta berbagai program pembangunan daerah lainnya. Dengan adanya desentralisasi administratif, proses pelayanan publik dapat menjadi lebih cepat dan efisien karena keputusan tidak selalu harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.

Bentuk kedua adalah desentralisasi fiskal, yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan atau anggaran publik kepada pemerintah daerah. Dalam sistem ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki, baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun dari transfer dana pemerintah pusat. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah masing-masing. Dengan adanya kewenangan dalam pengelolaan anggaran, pemerintah daerah dapat merancang program pembangunan

yang lebih sesuai dengan prioritas lokal serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Selain itu, desentralisasi fiskal juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran publik secara transparan dan akuntabel.

Bentuk ketiga adalah desentralisasi politik, yang berkaitan dengan pemberian kewenangan politik kepada pemerintah daerah melalui lembaga perwakilan lokal. Dalam sistem ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin daerah serta wakil rakyat di tingkat lokal melalui mekanisme demokrasi. Desentralisasi politik bertujuan untuk memperkuat demokrasi lokal dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan adanya lembaga perwakilan lokal, kebijakan publik di daerah dapat dirumuskan melalui proses politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, desentralisasi politik juga meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah daerah karena kebijakan tersebut dihasilkan melalui mekanisme demokratis.

3. Otonomi Daerah dalam Tata Kelola Pendidikan

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk implementasi desentralisasi dalam sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai sektor publik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Dalam konteks pendidikan, otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif dalam mengatur, mengelola, serta mengembangkan sistem pendidikan di wilayahnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan karena pemerintah daerah dianggap memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat dibandingkan dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat dirancang secara lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Pada sistem pendidikan yang terdesentralisasi, pemerintah daerah memiliki beberapa peran penting dalam tata kelola pendidikan. Salah satu peran utama adalah pengelolaan sekolah di wilayahnya. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memastikan bahwa lembaga pendidikan dapat beroperasi dengan baik, mulai dari

pengelolaan administrasi, penyediaan fasilitas pendidikan, hingga pengaturan tenaga pendidik. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam pengalokasian anggaran pendidikan yang digunakan untuk mendukung berbagai program pendidikan di tingkat lokal. Melalui pengelolaan anggaran tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Pemerintah daerah juga berperan dalam pengembangan program pendidikan lokal. Program-program ini dapat dirancang untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan potensi dan karakteristik daerah, seperti pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal, program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi ekonomi daerah, maupun program pendidikan yang mendukung pembangunan sosial masyarakat setempat. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan lembaga pendidikan di wilayahnya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah nasional.

Menurut Ardhana Januar Mahardhani dalam buku Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Administrasi Publik: Teori dan Praktik (2023), otonomi daerah dalam sektor pendidikan dapat meningkatkan fleksibilitas kebijakan karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi masyarakat di wilayahnya. Fleksibilitas ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan lokal tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kebijakan yang bersifat seragam dari pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi tersebut, daerah dapat lebih kreatif dalam merancang berbagai program pendidikan yang relevan dengan kondisi lokal.

E. Transformasi Tata Kelola Pendidikan di Era Global

Transformasi tata kelola pendidikan di Era global merupakan fenomena yang muncul seiring dengan meningkatnya interaksi antarnegara, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan dalam struktur ekonomi global. Globalisasi telah mengubah cara negara mengelola berbagai sektor publik, termasuk pendidikan. Dalam konteks

ini, pendidikan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai urusan domestik suatu negara, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika global yang melibatkan berbagai aktor, institusi internasional, serta jaringan kebijakan lintas negara (OECD, 2023; UNESCO, 2022).

Perubahan ini mendorong munculnya bentuk tata kelola pendidikan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan global. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan arah kebijakan pendidikan, melainkan harus berinteraksi dengan organisasi internasional, lembaga penelitian, sektor swasta, serta komunitas global dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Menurut Mahardhani (2023), transformasi tata kelola pendidikan di Era global ditandai oleh meningkatnya interdependensi antar sistem pendidikan, pertukaran pengetahuan lintas negara, serta penggunaan standar internasional dalam evaluasi kualitas pendidikan. Berikut beberapa dimensi penting transformasi tata kelola pendidikan dalam konteks global.

1. Globalisasi dan Perubahan Paradigma Kebijakan Pendidikan

Globalisasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara negara memandang dan merumuskan kebijakan pendidikan. Pada masa sebelumnya, pendidikan sering diposisikan terutama sebagai sarana pembentukan identitas nasional, penanaman nilai kebangsaan, serta pembangunan karakter warga negara. Namun, dalam konteks globalisasi, paradigma tersebut mengalami perluasan yang signifikan. Pendidikan tidak lagi hanya dipahami sebagai alat untuk membangun identitas nasional, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing suatu negara dalam persaingan global. Perubahan ini terjadi karena semakin kuatnya keterkaitan antara sistem pendidikan dengan dinamika ekonomi global, mobilitas tenaga kerja internasional, serta perkembangan teknologi digital yang sangat pesat.

Globalisasi mendorong negara-negara untuk menyesuaikan sistem pendidikannya agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif dalam ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Menurut OECD (2023), pendidikan menjadi strategi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, inovasi industri, serta tuntutan

pasar kerja global. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berfokus pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembelajaran yang mampu menghasilkan individu kreatif, kritis, dan adaptif terhadap perubahan.

Perubahan paradigma kebijakan pendidikan di Era global terlihat dari semakin kuatnya fokus pada pengembangan kompetensi abad ke-21. Kompetensi tersebut meliputi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta literasi digital. Kemampuan ini dianggap penting karena dunia kerja modern menuntut individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan untuk memecahkan masalah kompleks dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Selain itu, banyak negara mulai mengadopsi standar pendidikan internasional untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikannya, baik melalui benchmarking global, evaluasi internasional, maupun reformasi kurikulum.

2. Peran Organisasi Internasional dalam Tata Kelola Pendidikan

Organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk arah dan dinamika tata kelola pendidikan global. Dalam Era globalisasi, kebijakan pendidikan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai lembaga internasional yang menyediakan kerangka kerja, standar, serta rekomendasi kebijakan pendidikan. Melalui penelitian, program kerja sama, serta penyusunan indikator pendidikan global, organisasi internasional membantu negara-negara dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikannya sekaligus mendorong terciptanya standar pendidikan yang lebih universal. Dengan demikian, organisasi internasional berfungsi sebagai aktor penting dalam proses penyebaran ide, praktik terbaik (*Best Practices*), serta inovasi kebijakan pendidikan di tingkat global.

Salah satu organisasi internasional yang memiliki pengaruh besar dalam bidang pendidikan adalah UNESCO. Organisasi ini berperan dalam mempromosikan pendidikan sebagai hak dasar setiap manusia serta mendorong pemerataan akses pendidikan di seluruh dunia. UNESCO mengembangkan berbagai program pendidikan global yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan sistem

pendidikan, seperti program *Education for All* dan *Education for Sustainable Development*. Melalui program-program tersebut, UNESCO tidak hanya mendorong peningkatan akses pendidikan, tetapi juga menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

OECD juga memiliki peran penting dalam tata kelola pendidikan global, terutama dalam penyusunan indikator dan evaluasi kualitas pendidikan antarnegara. OECD mengembangkan berbagai instrumen analisis pendidikan yang digunakan untuk membandingkan kinerja sistem pendidikan di berbagai negara. Salah satu program yang paling berpengaruh adalah *Programme for International Student Assessment* (PISA), yaitu studi internasional yang mengukur kemampuan siswa dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Hasil PISA sering digunakan oleh banyak negara sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mereformasi kebijakan pendidikannya agar lebih kompetitif di tingkat global.

3. Internasionalisasi Sistem Pendidikan

Internasionalisasi sistem pendidikan merupakan salah satu transformasi penting dalam tata kelola pendidikan global yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya interaksi antarnegara di berbagai bidang. Internasionalisasi pendidikan mengacu pada proses integrasi dimensi internasional, global, dan lintas budaya ke dalam sistem pendidikan, baik dalam kurikulum, penelitian, maupun kerja sama akademik. Dalam konteks globalisasi, lembaga pendidikan tidak lagi beroperasi secara terisolasi dalam batas-batas nasional, tetapi menjadi bagian dari jaringan pendidikan global yang saling terhubung. Perubahan ini mendorong institusi pendidikan untuk menyesuaikan sistem pembelajaran, kurikulum, serta strategi pengembangan akademik agar mampu merespons tuntutan dunia yang semakin terintegrasi.

Salah satu bentuk nyata dari internasionalisasi pendidikan adalah meningkatnya program pertukaran pelajar dan dosen antarnegara. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan tenaga pengajar untuk memperoleh pengalaman akademik di lingkungan internasional, memahami perspektif global, serta mengembangkan kemampuan lintas budaya. Melalui pertukaran akademik, peserta didik

tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga membangun jaringan internasional yang dapat mendukung perkembangan karier dan penelitian di masa depan. Selain itu, mobilitas akademik ini juga memperkaya proses pembelajaran di perguruan tinggi karena menghadirkan berbagai perspektif dan pengalaman dari latar belakang budaya yang berbeda.

Internasionalisasi juga terlihat melalui berkembangnya kerja sama akademik internasional antara universitas dan lembaga penelitian di berbagai negara. Kerja sama tersebut dapat berupa penelitian bersama, publikasi ilmiah kolaboratif, program gelar ganda (*double degree*), hingga penyelenggaraan konferensi akademik internasional. Melalui kolaborasi ini, universitas dapat meningkatkan kualitas penelitian serta memperluas akses terhadap sumber daya akademik global. Banyak perguruan tinggi kini aktif membangun jaringan penelitian internasional untuk memperkuat reputasi akademik sekaligus berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di tingkat global.

BAB III

ARSITEKTUR KEBIJAKAN SEBAGAI KERANGKA ANALITIS

Arsitektur kebijakan sebagai kerangka analitis merupakan pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan publik dirancang, diorganisasikan, dan diimplementasikan dalam suatu sistem pemerintahan yang kompleks. Dalam kajian administrasi publik dan kebijakan pendidikan, arsitektur kebijakan menekankan pentingnya keterpaduan antara tujuan kebijakan, instrumen kebijakan, aktor yang terlibat, serta struktur kelembagaan yang mengatur proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini memandang kebijakan tidak hanya sebagai keputusan tunggal, tetapi sebagai konfigurasi dari berbagai elemen kebijakan yang saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem tata kelola yang terkoordinasi. Menurut Howlett dan Mukherjee (2018), arsitektur kebijakan membantu menjelaskan bagaimana kombinasi instrumen kebijakan (*Policy Mix*) dirancang untuk mencapai tujuan publik secara efektif. Sementara itu, Peters (2019) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain kebijakan, kapasitas institusional, dan mekanisme koordinasi antar aktor. Oleh karena itu, penggunaan kerangka arsitektur kebijakan menjadi penting dalam analisis kebijakan pendidikan, karena memungkinkan peneliti dan pembuat kebijakan untuk memahami secara komprehensif hubungan antara desain kebijakan, struktur institusi, serta dinamika implementasi dalam sistem pendidikan yang terus berkembang.

A. Konseptualisasi Arsitektur Kebijakan

Konsep arsitektur kebijakan (*Policy Architecture*) merupakan pendekatan analitis yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu kebijakan publik dirancang secara sistematis melalui kombinasi tujuan,

instrumen, aktor, dan mekanisme koordinasi yang saling terhubung. Dalam konteks administrasi publik modern, arsitektur kebijakan tidak hanya memandang kebijakan sebagai keputusan tunggal pemerintah, tetapi sebagai sistem kebijakan yang kompleks yang melibatkan berbagai institusi, aktor, serta instrumen kebijakan yang bekerja secara terpadu. Berikut penjelasan konseptualisasi arsitektur kebijakan dalam beberapa poin utama.

1. Pengertian Arsitektur Kebijakan

Arsitektur kebijakan merupakan konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu kebijakan publik dirancang secara sistematis agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah ini merujuk pada struktur atau kerangka kebijakan yang menggambarkan hubungan antara berbagai komponen yang membentuk suatu kebijakan. Dalam perspektif ini, kebijakan tidak dipahami sebagai keputusan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan dan bekerja secara terpadu. Melalui pendekatan arsitektur kebijakan, pemerintah dapat merancang kebijakan secara lebih terstruktur sehingga setiap unsur kebijakan dapat saling mendukung dalam proses implementasi dan pencapaian tujuan kebijakan.

Pada arsitektur kebijakan, terdapat beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Komponen tersebut meliputi tujuan kebijakan, instrumen kebijakan, aktor pelaksana, serta mekanisme implementasi dan evaluasi kebijakan. Tujuan kebijakan berfungsi sebagai arah utama yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui suatu program atau kebijakan tertentu. Sementara itu, instrumen kebijakan merupakan berbagai alat atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti regulasi, program bantuan, insentif ekonomi, maupun kebijakan administratif. Selain itu, keberhasilan suatu kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, baik pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri. Mekanisme implementasi dan evaluasi kemudian berperan dalam memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan secara efektif serta mampu memberikan dampak yang diharapkan.

Menurut Knill dan Tosun (2020), kebijakan publik sebaiknya dipahami sebagai konfigurasi berbagai instrumen dan aktor yang membentuk suatu sistem tata kelola untuk mengatasi masalah publik. Pandangan ini menekankan bahwa kebijakan tidak hanya berkaitan dengan isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan tersebut diorganisasikan, dilaksanakan, dan diawasi dalam suatu sistem pemerintahan. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh koordinasi antaraktor serta kesesuaian antara instrumen kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai.

2. Arsitektur Kebijakan sebagai Kerangka Sistem

Arsitektur kebijakan dapat dipahami sebagai kerangka sistem yang menggambarkan bagaimana berbagai komponen kebijakan saling berhubungan dan bekerja secara terpadu dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik. Pendekatan ini melihat kebijakan bukan sekadar sebagai keputusan pemerintah, tetapi sebagai suatu sistem tata kelola yang melibatkan berbagai unsur yang saling berinteraksi. Dalam perspektif ini, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana berbagai elemen kebijakan dirancang, dikoordinasikan, dan diimplementasikan secara efektif dalam suatu struktur kebijakan yang terintegrasi.

Pada kerangka arsitektur kebijakan, terdapat beberapa komponen utama yang membentuk sistem kebijakan. Komponen pertama adalah tujuan kebijakan (*Policy Goals*), yaitu sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan tertentu. Tujuan ini menjadi arah utama yang menentukan desain kebijakan serta strategi yang digunakan dalam proses implementasi. Komponen kedua adalah instrumen kebijakan (*Policy Instruments*), yaitu berbagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Instrumen kebijakan dapat berupa regulasi, program pemerintah, insentif ekonomi, bantuan sosial, atau berbagai mekanisme administratif lainnya. Pemilihan instrumen yang tepat sangat menentukan efektivitas kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik.

Komponen berikutnya adalah aktor kebijakan (*Policy Actors*), yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Aktor kebijakan tidak hanya terdiri dari

pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, serta masyarakat secara luas. Selain itu, arsitektur kebijakan juga mencakup institusi dan aturan (*institutions and rules*) yang mengatur bagaimana kebijakan dijalankan. Institusi dan aturan ini memberikan kerangka hukum dan administratif yang memastikan kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terkoordinasi. Komponen terakhir adalah mekanisme implementasi dan evaluasi kebijakan yang berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

3. Dimensi Utama dalam Arsitektur Kebijakan

Arsitektur kebijakan merupakan kerangka analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu kebijakan publik dirancang dan diorganisasikan secara sistematis. Dalam konsep ini, kebijakan tidak hanya dilihat sebagai keputusan pemerintah, tetapi sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai dimensi yang saling berkaitan. Dimensi-dimensi tersebut membantu menjelaskan bagaimana tujuan kebijakan ditetapkan, bagaimana instrumen kebijakan dipilih, bagaimana institusi berperan dalam proses kebijakan, serta bagaimana koordinasi antaraktor dilakukan agar kebijakan dapat berjalan secara efektif. Dengan memahami berbagai dimensi tersebut, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih terintegrasi dan mampu mencapai tujuan pembangunan secara optimal.

Dimensi pertama dalam arsitektur kebijakan adalah dimensi tujuan kebijakan (*Policy Goals*). Setiap kebijakan publik dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tujuan tersebut dapat berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan akses terhadap layanan publik, maupun peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Tujuan kebijakan menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan serta strategi yang akan digunakan dalam implementasinya. Dengan kata lain, tujuan kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan seluruh komponen kebijakan agar bekerja secara terpadu dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Dimensi kedua adalah dimensi instrumen kebijakan (*Policy Instruments*), yaitu berbagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan. Instrumen kebijakan dapat berupa regulasi yang mengatur perilaku masyarakat atau lembaga tertentu, insentif ekonomi untuk mendorong perubahan perilaku, program pelayanan publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, serta kampanye informasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap suatu isu. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan mekanisme kerja sama atau kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Hood dan Margetts (2007) menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara instrumen yang digunakan dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai.

Dimensi berikutnya adalah dimensi institusional. Arsitektur kebijakan tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai institusi yang terlibat dalam proses kebijakan. Institusi tersebut mencakup lembaga legislatif yang berperan dalam pembentukan regulasi, lembaga eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan, serta berbagai institusi lain seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Setiap institusi memiliki peran dan kewenangan yang berbeda dalam sistem kebijakan. Oleh karena itu, interaksi antar institusi menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan.

Dimensi terakhir adalah dimensi koordinasi kebijakan. Dalam praktiknya, kebijakan publik sering melibatkan banyak lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab berbeda. Tanpa koordinasi yang baik, implementasi kebijakan dapat mengalami tumpang tindih program, konflik kepentingan, atau bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang efektif antar lembaga. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme birokrasi formal, pembentukan jaringan kebijakan (*Policy Networks*), maupun melalui pendekatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

B. *Policy Design, Policy Mix, dan Instrument Choice*

Pada studi kebijakan publik modern, pembahasan mengenai *Policy Design, Policy Mix, dan instrument choice* menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana kebijakan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Ketiga konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa keputusan politik atau regulasi formal, tetapi juga merupakan hasil dari proses desain yang melibatkan pemilihan berbagai instrumen kebijakan yang saling melengkapi. Dalam perspektif administrasi publik, desain kebijakan yang baik harus mampu menghubungkan masalah publik dengan solusi kebijakan melalui penggunaan instrumen yang tepat, mempertimbangkan konteks institusional, serta memperhatikan kapasitas aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan (Howlett, 2019; Peters, 2022).

1. Konsep *Policy Design* dalam Kebijakan Publik

Konsep *Policy Design* dalam kebijakan publik merujuk pada proses sistematis dalam merancang kebijakan agar mampu menyelesaikan masalah publik secara efektif dan terarah. Dalam kajian kebijakan publik modern, *Policy Design* menekankan pentingnya pendekatan yang rasional, analitis, dan terstruktur dalam proses perumusan kebijakan. Kebijakan tidak hanya dipahami sebagai keputusan politik semata, tetapi sebagai hasil dari proses perencanaan yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan kebijakan, instrumen yang digunakan, serta kondisi sosial dan institusional yang memengaruhi implementasinya. Dengan pendekatan ini, kebijakan diharapkan tidak hanya memiliki tujuan yang jelas, tetapi juga memiliki mekanisme pelaksanaan yang realistis dan dapat dijalankan secara efektif oleh lembaga yang bertanggung jawab.

Pada dasarnya, *Policy Design* merupakan upaya untuk merancang kebijakan secara sistematis dengan mempertimbangkan hubungan antara tujuan kebijakan, instrumen kebijakan, dan konteks implementasi. Howlett (2019) menjelaskan bahwa desain kebijakan merupakan proses yang menghubungkan tujuan kebijakan (*Policy Goals*) dengan alat kebijakan (*Policy Instruments*) yang digunakan untuk

mengatasi masalah publik. Hubungan antara tujuan dan instrumen ini sangat penting karena keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian antara masalah yang ingin diselesaikan dengan strategi kebijakan yang dipilih. Oleh karena itu, desain kebijakan tidak hanya berfokus pada isi kebijakan atau regulasi yang dibuat, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara realistis dalam konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan tertentu.

Pada praktiknya, proses *Policy Design* biasanya melalui beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah identifikasi masalah kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah harus memahami secara jelas masalah publik yang ingin diselesaikan. Misalnya dalam sektor pendidikan, masalah yang dihadapi dapat berupa ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kualitas pembelajaran, atau keterbatasan sarana pendidikan di wilayah tertentu. Identifikasi masalah yang tepat sangat penting karena menjadi dasar bagi seluruh proses perancangan kebijakan berikutnya.

Tahap kedua adalah penentuan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terukur agar dapat menjadi pedoman dalam merancang strategi kebijakan. Tujuan yang jelas akan memudahkan pembuat kebijakan dalam menentukan instrumen kebijakan yang paling sesuai. Tahap berikutnya adalah pemilihan instrumen kebijakan, yaitu proses menentukan alat atau strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Instrumen tersebut dapat berupa regulasi, program pemerintah, insentif ekonomi, maupun berbagai bentuk pelayanan publik.

Tahap perancangan mekanisme implementasi. Kebijakan yang baik harus dilengkapi dengan mekanisme implementasi yang jelas, termasuk penentuan lembaga yang bertanggung jawab, pembagian kewenangan, serta prosedur pelaksanaan kebijakan. Tanpa mekanisme implementasi yang jelas, kebijakan sering kali sulit dilaksanakan secara efektif. Tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah dirancang mampu mencapai tujuan yang diharapkan serta memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

2. Jenis-Jenis Instrumen Kebijakan

Instrumen kebijakan merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi perilaku individu, kelompok, maupun institusi dalam rangka mencapai tujuan kebijakan publik. Dalam kerangka *Policy Design*, pemilihan instrumen kebijakan menjadi tahap yang sangat penting karena menentukan bagaimana kebijakan akan dijalankan serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Instrumen kebijakan pada dasarnya merupakan mekanisme yang memungkinkan pemerintah menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang dapat memengaruhi sistem sosial, ekonomi, dan institusional. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada tujuan yang dirumuskan, tetapi juga pada ketepatan instrumen yang digunakan dalam implementasinya.

Pada literatur kebijakan publik, terdapat berbagai klasifikasi mengenai jenis-jenis instrumen kebijakan. Salah satu klasifikasi yang banyak digunakan dikemukakan oleh Hood dan Margetts (2007), yang membagi instrumen kebijakan ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan cara pemerintah memengaruhi perilaku masyarakat. Kategori pertama adalah instrumen regulasi (*regulatory instruments*). Instrumen ini berupa aturan atau regulasi yang mengatur perilaku individu atau lembaga agar sesuai dengan tujuan kebijakan. Regulasi biasanya bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak mematuhi. Dalam sektor pendidikan, contoh instrumen regulasi antara lain standar nasional pendidikan, regulasi mengenai akreditasi sekolah atau perguruan tinggi, serta kebijakan wajib belajar yang mengharuskan anak mengikuti pendidikan pada tingkat tertentu. Melalui regulasi tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kategori kedua adalah instrumen ekonomi (*Economic Instruments*). Instrumen ini menggunakan mekanisme insentif maupun disinsentif ekonomi untuk memengaruhi perilaku aktor yang terlibat dalam sistem kebijakan. Berbeda dengan regulasi yang bersifat memaksa, instrumen ekonomi lebih menekankan pada pemberian dorongan melalui mekanisme finansial. Dalam sektor pendidikan, contoh instrumen ekonomi antara lain subsidi pendidikan, bantuan

operasional sekolah, serta program beasiswa bagi siswa atau mahasiswa. Melalui instrumen ini, pemerintah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan sekaligus mendorong lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Kategori berikutnya adalah instrumen informasi (*information instruments*), yaitu instrumen yang digunakan untuk memengaruhi perilaku masyarakat melalui penyebaran informasi, edukasi publik, atau kampanye sosial. Instrumen ini tidak bersifat memaksa maupun memberikan insentif finansial, tetapi bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Dalam konteks pendidikan, contoh instrumen informasi antara lain kampanye literasi pendidikan, publikasi data mengenai kualitas pendidikan, serta penyebaran informasi mengenai pentingnya pendidikan bagi pembangunan masyarakat.

Terdapat pula instrumen organisasi (*organizational instruments*), yaitu instrumen yang berkaitan dengan pembentukan, penguatan, atau restrukturisasi lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan. Instrumen ini digunakan ketika pemerintah perlu menciptakan struktur organisasi baru atau memperkuat institusi yang sudah ada untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam sektor pendidikan, contohnya adalah pembentukan badan akreditasi pendidikan, pengembangan lembaga pelatihan guru, atau pembentukan unit khusus yang bertugas mengelola program pendidikan tertentu.

3. Konsep *Policy Mix*

Konsep *Policy Mix* merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi kebijakan publik modern yang menekankan penggunaan berbagai instrumen kebijakan secara bersamaan untuk mencapai tujuan kebijakan secara lebih efektif. Dalam praktiknya, pemerintah jarang mengandalkan satu jenis instrumen kebijakan saja untuk menyelesaikan suatu masalah publik. Sebaliknya, berbagai instrumen kebijakan biasanya digunakan dalam kombinasi tertentu agar dapat saling melengkapi dan mengatasi berbagai dimensi masalah yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini muncul karena banyak persoalan publik bersifat kompleks, melibatkan berbagai aktor, serta dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang beragam. Oleh karena itu,

penggunaan satu instrumen kebijakan saja sering kali tidak cukup untuk menghasilkan perubahan yang signifikan.

Menurut Howlett dan Mukherjee (2018), *Policy Mix* merujuk pada kombinasi berbagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk bekerja secara terpadu dalam mencapai tujuan kebijakan. Dalam pendekatan ini, pembuat kebijakan tidak hanya menentukan instrumen apa yang akan digunakan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana berbagai instrumen tersebut dapat saling mendukung dalam proses implementasi kebijakan. Kombinasi instrumen kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk menangani berbagai aspek masalah publik secara lebih komprehensif, karena setiap instrumen memiliki fungsi dan mekanisme pengaruh yang berbeda terhadap perilaku individu maupun institusi.

Pada sektor pendidikan, konsep *Policy Mix* dapat dilihat melalui penggunaan berbagai instrumen kebijakan yang saling melengkapi. Misalnya, pemerintah dapat menetapkan regulasi kurikulum nasional sebagai instrumen regulatif untuk menentukan standar pembelajaran yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan. Di sisi lain, pemerintah juga dapat menyediakan program bantuan pendidikan seperti subsidi atau bantuan operasional sekolah sebagai instrumen ekonomi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan sistem evaluasi pendidikan untuk memantau kualitas pembelajaran serta memastikan bahwa standar pendidikan telah terpenuhi. Program pelatihan guru juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dalam melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan. Melalui kombinasi berbagai instrumen tersebut, kebijakan pendidikan dapat mengatasi berbagai aspek masalah pendidikan secara lebih menyeluruh.

C. Institusionalisme Baru dan Desain Kebijakan

Pendekatan institusionalisme baru (*New Institutionalism*) merupakan salah satu perspektif penting dalam analisis kebijakan publik yang menekankan peran institusi dalam membentuk proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks administrasi publik modern, kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan

rasional para aktor, tetapi juga oleh aturan formal, norma sosial, budaya organisasi, serta struktur kelembagaan yang mengatur interaksi antar aktor dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai institusi menjadi sangat penting dalam menjelaskan bagaimana kebijakan dirancang dan dilaksanakan dalam praktik.

Pada studi kebijakan publik, institusi dipahami sebagai seperangkat aturan formal dan informal yang mengatur perilaku aktor dalam suatu sistem politik dan administratif. Aturan tersebut dapat berupa konstitusi, undang-undang, regulasi pemerintah, prosedur birokrasi, maupun norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Peters (2019), institusi berfungsi sebagai kerangka yang membatasi sekaligus memfasilitasi tindakan aktor dalam proses kebijakan, sehingga keputusan kebijakan tidak sepenuhnya bersifat bebas, tetapi dipengaruhi oleh struktur institusional yang ada.

Pada konteks kebijakan pendidikan, institusi memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana kebijakan dirancang dan diimplementasikan. Lembaga seperti kementerian pendidikan, dinas pendidikan daerah, sekolah, universitas, serta organisasi masyarakat pendidikan merupakan bagian dari struktur institusional yang memengaruhi proses kebijakan pendidikan.

1. Konsep Institusionalisme Baru dalam Kebijakan Publik

Konsep institusionalisme baru (*New Institutionalism*) merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi kebijakan publik yang menekankan peran institusi dalam membentuk proses politik dan hasil kebijakan. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori-teori sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada perilaku individu atau aktor politik dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif institusionalisme baru, kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi individu atau kelompok, tetapi juga oleh struktur kelembagaan, aturan yang berlaku, serta norma yang mengatur interaksi antaraktor dalam sistem pemerintahan. Dengan kata lain, institusi dipandang sebagai kerangka yang membatasi sekaligus mengarahkan perilaku para aktor dalam proses kebijakan.

Salah satu karakteristik utama institusionalisme baru adalah penekanan pada peran aturan formal dan informal dalam proses

kebijakan. Aturan formal mencakup berbagai regulasi, undang-undang, serta prosedur administratif yang mengatur bagaimana keputusan publik diambil dan dilaksanakan. Sementara itu, aturan informal meliputi norma sosial, kebiasaan birokrasi, serta praktik tidak tertulis yang berkembang dalam lingkungan organisasi. Kedua jenis aturan tersebut memengaruhi cara aktor berinteraksi dan menentukan strategi yang digunakan dalam proses kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan formal pemerintah, tetapi juga oleh praktik dan norma yang berkembang dalam sistem kelembagaan.

Karakteristik berikutnya adalah pengakuan terhadap pentingnya struktur kelembagaan dalam proses pengambilan keputusan. Struktur organisasi pemerintah, pembagian kewenangan antar lembaga, serta mekanisme koordinasi birokrasi memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan. Dalam sistem pemerintahan yang kompleks, berbagai lembaga memiliki peran dan kepentingan yang berbeda, sehingga interaksi antar lembaga tersebut dapat memengaruhi arah kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, analisis kebijakan publik dalam perspektif institusionalisme baru sering kali berfokus pada bagaimana desain institusi memengaruhi proses pembuatan kebijakan.

2. Varian Pendekatan Institusionalisme Baru

Pada kajian administrasi publik dan kebijakan publik, institusionalisme baru berkembang menjadi beberapa varian pendekatan yang mencoba menjelaskan bagaimana institusi memengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan. Setiap pendekatan memiliki fokus analisis yang berbeda, tetapi semuanya menekankan bahwa institusi berperan penting dalam membentuk perilaku aktor serta hasil kebijakan. Tiga varian utama yang sering digunakan dalam analisis kebijakan adalah institusionalisme historis, institusionalisme pilihan rasional, dan institusionalisme sosiologis. Ketiga pendekatan ini memberikan perspektif yang berbeda mengenai hubungan antara institusi, aktor kebijakan, dan dinamika kebijakan publik.

Pendekatan pertama adalah institusionalisme historis (*historical institutionalism*), yang menekankan pentingnya perkembangan sejarah

institusi dalam membentuk kebijakan publik. Pendekatan ini berangkat dari gagasan bahwa kebijakan yang dibuat pada masa lalu dapat memengaruhi arah kebijakan pada masa sekarang. Hall dan Taylor (1996) menjelaskan bahwa keputusan kebijakan di masa lalu sering menciptakan pola perkembangan kebijakan tertentu yang sulit diubah, suatu kondisi yang dikenal sebagai *path dependence*. Dalam kerangka ini, institusi memiliki kecenderungan untuk mempertahankan pola kebijakan yang sudah ada karena perubahan kebijakan sering menghadapi hambatan politik, administratif, maupun sosial. Oleh karena itu, perubahan kebijakan biasanya terjadi secara bertahap melalui proses reformasi yang perlahan. Dalam sektor pendidikan, misalnya, sistem kurikulum nasional, struktur jenjang pendidikan, atau model pengelolaan pendidikan sering kali merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang. Kebijakan-kebijakan tersebut telah membentuk struktur institusional yang stabil sehingga perubahan kebijakan yang drastis sering kali sulit dilakukan.

Pendekatan kedua adalah institusionalisme pilihan rasional (*rational choice institutionalism*), yang melihat institusi sebagai mekanisme yang membantu aktor mencapai tujuannya secara rasional. Dalam perspektif ini, aktor kebijakan baik individu maupun organisasi dipandang sebagai pihak yang rasional dan berusaha memaksimalkan kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan. Institusi berfungsi sebagai “aturan permainan” yang mengatur interaksi antaraktor dan membantu mengurangi ketidakpastian serta biaya transaksi dalam proses kebijakan. Dengan adanya aturan yang jelas, para aktor dapat memprediksi perilaku pihak lain dan merancang strategi yang paling menguntungkan baginya. Kebijakan publik dalam pendekatan ini dipandang sebagai hasil dari interaksi strategis antara berbagai aktor dalam kerangka institusional tertentu. Pendekatan ini sering digunakan untuk menganalisis proses negosiasi kebijakan antara lembaga legislatif, eksekutif, kelompok kepentingan, maupun aktor lainnya dalam sistem pemerintahan.

Pendekatan ketiga adalah institusionalisme sosiologis (*sociological institutionalism*), yang menekankan peran norma, nilai, dan budaya dalam membentuk perilaku institusi. Dalam perspektif ini, institusi tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal, tetapi

juga sebagai sistem nilai yang memengaruhi cara aktor memahami dunia sosial dan menentukan tindakannya. Perilaku organisasi sering kali dipengaruhi oleh norma sosial, tradisi, serta nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik sering kali tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional atau efisiensi, tetapi juga pada kebutuhan untuk memperoleh legitimasi sosial dan simbolik. Dalam sektor pendidikan, misalnya, kebijakan pendidikan sering dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, peran guru dalam masyarakat, serta tujuan pendidikan nasional yang mencerminkan identitas dan aspirasi sosial suatu negara.

3. Peran Institusi dalam Desain Kebijakan

Institusi memiliki peran yang sangat penting dalam proses desain kebijakan publik karena institusi menentukan kerangka aturan, kewenangan, serta mekanisme yang mengatur bagaimana kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan. Dalam perspektif kebijakan publik modern, desain kebijakan tidak hanya dipahami sebagai proses teknis dalam menentukan tujuan dan instrumen kebijakan, tetapi juga sebagai proses yang sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang ada. Institusi pada dasarnya berfungsi sebagai sistem aturan dan organisasi yang mengatur interaksi antaraktor dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana desain kebijakan tersebut disesuaikan dengan konteks institusional tempat kebijakan tersebut dijalankan.

Salah satu peran utama institusi dalam desain kebijakan adalah menentukan siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Dalam sistem pemerintahan, kewenangan pembuatan kebijakan biasanya dibagi antara berbagai lembaga seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, serta lembaga administratif lainnya. Pembagian kewenangan ini penting karena menentukan siapa yang memiliki hak untuk merumuskan, mengesahkan, dan melaksanakan kebijakan tertentu. Selain itu, institusi juga menentukan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan, termasuk prosedur birokrasi, mekanisme konsultasi publik, serta bentuk koordinasi antar lembaga pemerintah.

Institusi juga berperan dalam mengatur bagaimana kebijakan diimplementasikan. Implementasi kebijakan biasanya dilakukan oleh berbagai lembaga administratif yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan program pemerintah. Struktur organisasi, kapasitas birokrasi, serta mekanisme koordinasi antar lembaga sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, desain kebijakan harus mempertimbangkan kemampuan institusi yang akan melaksanakan kebijakan tersebut agar kebijakan dapat diterapkan secara realistis dan efektif.

Peran institusi juga terlihat dalam proses evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Proses evaluasi biasanya melibatkan berbagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, audit, maupun penilaian kinerja kebijakan. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang jelas, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai efektivitas kebijakan serta melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang kurang berhasil.

D. Aktor, Struktur, dan Mekanisme Koordinasi

Pada analisis kebijakan publik modern, kebijakan tidak lagi dipahami sebagai produk keputusan tunggal dari pemerintah, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara berbagai aktor yang beroperasi dalam struktur kelembagaan tertentu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai aktor, struktur, dan mekanisme koordinasi menjadi sangat penting dalam memahami bagaimana kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi. Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, proses kebijakan melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan, sumber daya, serta tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Interaksi antara aktor tersebut berlangsung dalam suatu struktur kelembagaan yang mengatur hubungan kekuasaan, distribusi kewenangan, serta mekanisme koordinasi dalam sistem pemerintahan (Peters, 2019; Howlett & Mukherjee, 2018).

Pada konteks kebijakan pendidikan, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas desain kebijakan, tetapi juga pada kemampuan berbagai aktor untuk bekerja sama dalam struktur tata kelola

yang efektif. Oleh karena itu, analisis mengenai aktor, struktur, dan mekanisme koordinasi menjadi bagian penting dalam memahami arsitektur kebijakan pendidikan.

1. Konsep Aktor dalam Kebijakan Publik

Konsep aktor dalam kebijakan publik merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, peran, serta pengaruh dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, hingga implementasi kebijakan. Dalam kajian kebijakan publik, keberadaan aktor sangat penting karena kebijakan pada dasarnya merupakan hasil interaksi berbagai pihak yang memiliki tujuan, kepentingan, serta sumber daya yang berbeda. Oleh karena itu, proses kebijakan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknokratis pemerintah, tetapi juga sebagai proses politik dan sosial yang melibatkan banyak aktor. Menurut Howlett, Ramesh, dan Perl (2020), aktor kebijakan mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam proses kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, maupun pihak yang terkena dampak kebijakan tersebut.

Secara umum, aktor kebijakan dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok utama, yaitu aktor negara (*state actors*), aktor non-negara (*non-state actors*), serta masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Aktor negara merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan formal dalam sistem pemerintahan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Aktor ini meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif memiliki peran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kebijakan publik. Lembaga eksekutif bertanggung jawab dalam merumuskan program kebijakan serta melaksanakan kebijakan tersebut melalui berbagai institusi pemerintah. Sementara itu, lembaga yudikatif berperan dalam menegakkan hukum serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Dalam sektor pendidikan, aktor negara dapat berupa kementerian pendidikan, dinas pendidikan di tingkat daerah, serta lembaga pemerintah lain yang berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan.

Terdapat pula aktor non-negara yang memiliki pengaruh dalam proses kebijakan. Aktor non-negara merupakan pihak di luar pemerintah

yang dapat memengaruhi arah kebijakan melalui berbagai cara, seperti advokasi, penyediaan layanan, atau kerja sama dengan pemerintah. Aktor ini meliputi organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan swasta, organisasi profesi guru, sektor swasta, serta organisasi internasional. Dalam konteks tata kelola modern, keterlibatan aktor non-negara menjadi semakin penting karena banyak kebijakan publik yang memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan yang lebih efektif.

2. Struktur dalam Sistem Kebijakan

Struktur dalam sistem kebijakan merujuk pada kerangka kelembagaan yang mengatur hubungan antar aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik. Struktur ini mencakup pembagian kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan, serta prosedur administratif yang menjadi pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya struktur yang jelas, proses kebijakan dapat berjalan secara lebih terkoordinasi karena setiap aktor memahami peran, tanggung jawab, serta batas kewenangannya. Menurut Peters (2019), struktur kelembagaan memiliki pengaruh besar terhadap cara kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan. Struktur yang dirancang secara baik dapat memfasilitasi koordinasi antar lembaga, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan kebijakan. Sebaliknya, struktur yang tidak efektif dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, birokrasi yang berbelit, serta hambatan dalam implementasi kebijakan.

Salah satu komponen penting dalam struktur kebijakan adalah struktur hierarki birokrasi. Hierarki birokrasi merupakan bentuk organisasi yang menempatkan otoritas secara berjenjang dari tingkat tertinggi hingga tingkat operasional. Dalam sistem administrasi publik tradisional, struktur ini digunakan untuk memastikan adanya garis komando yang jelas serta mekanisme pengawasan yang terstruktur. Dalam sektor pendidikan, struktur hierarki birokrasi dapat dilihat pada hubungan antara kementerian pendidikan di tingkat pusat, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten atau kota, hingga sekolah dan lembaga pendidikan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat paling bawah. Struktur yang berjenjang ini memungkinkan pemerintah

mengontrol implementasi kebijakan secara lebih sistematis serta memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dapat dijalankan hingga ke tingkat lokal.

Pada paradigma tata kelola modern juga dikenal struktur jaringan kebijakan atau *Policy Networks*. Struktur ini menekankan pada hubungan kerja sama antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan. Rhodes (2017) menjelaskan bahwa jaringan kebijakan memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya, informasi, serta keahlian antar aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Dalam konteks kebijakan pendidikan, jaringan kebijakan dapat melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi profesi guru, lembaga penelitian, serta organisasi internasional. Melalui jaringan kebijakan, proses perumusan dan implementasi kebijakan menjadi lebih partisipatif karena melibatkan berbagai perspektif dan kepentingan.

3. Mekanisme Koordinasi dalam Kebijakan Publik

Mekanisme koordinasi dalam kebijakan publik merupakan proses penyelarasan tindakan berbagai aktor yang terlibat dalam sistem kebijakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif. Dalam praktiknya, kebijakan publik sering melibatkan banyak lembaga, organisasi, dan kelompok kepentingan yang memiliki peran serta tanggung jawab berbeda. Tanpa koordinasi yang baik, implementasi kebijakan dapat menghadapi berbagai permasalahan seperti tumpang tindih program, konflik kewenangan antar lembaga, serta pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, koordinasi menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan karena berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktor bekerja secara terarah dan saling mendukung dalam mencapai tujuan kebijakan. Peters (2019) menjelaskan bahwa koordinasi dalam kebijakan publik dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu koordinasi hierarkis, koordinasi berbasis pasar, dan koordinasi berbasis jaringan.

Koordinasi hierarkis merupakan mekanisme koordinasi yang dilakukan melalui struktur birokrasi yang bersifat top-down. Dalam mekanisme ini, keputusan kebijakan biasanya diambil oleh otoritas yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan,

kemudian dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat yang lebih rendah. Sistem ini banyak digunakan dalam administrasi publik tradisional karena memiliki garis komando yang jelas. Kejelasan struktur tersebut memudahkan proses pengawasan serta memastikan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai tingkat organisasi. Dalam sektor pendidikan, koordinasi hierarkis dapat dilihat pada hubungan antara kementerian pendidikan di tingkat pusat dengan dinas pendidikan di tingkat daerah serta sekolah sebagai pelaksana kebijakan di tingkat operasional. Meskipun demikian, mekanisme ini memiliki keterbatasan karena kurang fleksibel dalam menghadapi permasalahan kebijakan yang kompleks dan sering kali membutuhkan partisipasi berbagai aktor di luar pemerintah.

Terdapat pula koordinasi berbasis pasar yang menggunakan mekanisme insentif ekonomi untuk mengarahkan perilaku aktor dalam sistem kebijakan. Dalam pendekatan ini, pemerintah tidak sepenuhnya mengontrol aktivitas para pelaksana kebijakan, tetapi menciptakan sistem insentif yang mendorong aktor untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan tujuan kebijakan. Mekanisme ini banyak digunakan dalam reformasi administrasi publik modern yang menekankan efisiensi dan peningkatan kinerja layanan publik. Dalam kebijakan pendidikan, koordinasi berbasis pasar dapat terlihat dalam berbagai program seperti pemberian dana berbasis kinerja kepada sekolah, program beasiswa kompetitif bagi siswa berprestasi, serta kompetisi inovasi pendidikan yang mendorong lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanannya.

E. Arsitektur Kebijakan Pendidikan sebagai Model Sintesis

Arsitektur kebijakan pendidikan sebagai model sintesis merujuk pada kerangka analitis yang mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam studi kebijakan publik untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara sistematis. Pendekatan ini menggabungkan dimensi institusional, aktor kebijakan, instrumen kebijakan, serta konteks sosial-politik dalam satu kerangka yang koheren. Dengan demikian, arsitektur kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoritis, tetapi juga

sebagai alat analitis untuk menjelaskan dinamika tata kelola pendidikan dalam sistem pemerintahan modern.

1. Konsep Dasar Arsitektur Kebijakan Pendidikan

Konsep dasar arsitektur kebijakan pendidikan merujuk pada kerangka sistematis yang menggambarkan bagaimana berbagai komponen dalam kebijakan pendidikan saling terhubung dan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan. Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan tidak dipandang sebagai keputusan tunggal atau program yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem kebijakan yang lebih luas. Sistem tersebut mencakup tujuan kebijakan, instrumen kebijakan, aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, serta mekanisme koordinasi yang mengatur interaksi antar komponen tersebut. Arsitektur kebijakan pendidikan dengan demikian berfungsi sebagai peta konseptual yang membantu memahami bagaimana kebijakan dirancang, diimplementasikan, serta dievaluasi dalam suatu sistem pendidikan.

Menurut Howlett dan Mukherjee (2018), arsitektur kebijakan merupakan konfigurasi atau susunan berbagai instrumen kebijakan yang dirancang secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu dalam sektor publik. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya bergantung pada satu jenis instrumen, tetapi sering kali menggunakan kombinasi berbagai instrumen yang saling melengkapi. Dalam konteks pendidikan, konfigurasi kebijakan tersebut dapat mencakup berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum, pembiayaan pendidikan, tata kelola lembaga pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta sistem evaluasi pendidikan. Setiap instrumen kebijakan memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara keseluruhan, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan daya saing sumber daya manusia.

Arsitektur kebijakan pendidikan juga berkaitan erat dengan struktur kelembagaan yang mengelola kebijakan tersebut. Peters (2019) menjelaskan bahwa desain kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan hubungan antara struktur kelembagaan dan pilihan instrumen kebijakan. Hal ini karena keberhasilan suatu kebijakan tidak

hanya ditentukan oleh kualitas desain kebijakannya, tetapi juga oleh kemampuan institusi yang melaksanakan kebijakan tersebut. Institusi yang memiliki kapasitas organisasi yang kuat, mekanisme koordinasi yang jelas, serta sumber daya yang memadai akan lebih mampu mengimplementasikan kebijakan secara efektif dibandingkan dengan institusi yang memiliki kapasitas terbatas.

2. Integrasi Berbagai Pendekatan Teoretis

Integrasi berbagai pendekatan teoretis merupakan salah satu karakteristik utama dalam konsep arsitektur kebijakan pendidikan. Sebagai sebuah model sintesis dalam studi kebijakan publik, arsitektur kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada satu pendekatan teori, tetapi menggabungkan berbagai perspektif yang saling melengkapi untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dirancang, diimplementasikan, dan dikelola. Pendekatan yang terintegrasi ini penting karena kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang kompleks dan melibatkan banyak aktor, institusi, serta kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan pendidikan memerlukan kombinasi berbagai kerangka teoretis agar mampu menjelaskan dinamika kebijakan secara lebih menyeluruh.

Salah satu pendekatan yang menjadi dasar dalam arsitektur kebijakan pendidikan adalah pendekatan desain kebijakan (*Policy Design*). Pendekatan ini menekankan pentingnya proses perancangan kebijakan yang sistematis, rasional, dan berbasis bukti. Dalam konteks pendidikan, desain kebijakan mencakup berbagai tahapan seperti penetapan tujuan pendidikan, pemilihan instrumen kebijakan yang tepat, serta perencanaan strategi implementasi yang efektif. Howlett (2019) menjelaskan bahwa desain kebijakan yang baik harus mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan kebijakan yang ingin dicapai, instrumen kebijakan yang digunakan, serta kapasitas kelembagaan yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan yang dirancang secara baik tidak hanya memperhatikan aspek normatif mengenai apa yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan aspek praktis terkait kemampuan institusi dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Pendekatan kedua yang terintegrasi dalam arsitektur kebijakan pendidikan adalah pendekatan institusionalisme baru. Pendekatan ini menyoroti peran penting institusi dalam membentuk proses dan hasil kebijakan publik. Dalam perspektif institusionalisme baru, institusi tidak hanya dipahami sebagai struktur organisasi formal seperti kementerian atau lembaga pemerintah, tetapi juga mencakup aturan, norma, nilai, serta praktik yang berkembang dalam sistem kebijakan. Hall dan Taylor (2020) menjelaskan bahwa institusi berfungsi sebagai kerangka yang dapat membatasi sekaligus memfasilitasi tindakan para aktor kebijakan. Artinya, perilaku aktor dalam proses kebijakan tidak sepenuhnya bebas, tetapi dipengaruhi oleh aturan dan norma yang berlaku dalam sistem kelembagaan. Dalam konteks pendidikan, institusi seperti sistem birokrasi pendidikan, regulasi pendidikan, serta budaya organisasi sekolah dapat memengaruhi cara kebijakan pendidikan dirumuskan dan diimplementasikan.

3. Komponen Utama Arsitektur Kebijakan Pendidikan

Komponen utama arsitektur kebijakan pendidikan menggambarkan berbagai unsur penting yang membentuk sistem kebijakan pendidikan secara menyeluruh. Setiap komponen memiliki fungsi tertentu, tetapi semuanya saling berhubungan dan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan kebijakan pendidikan. Dalam perspektif kebijakan publik, arsitektur kebijakan tidak hanya berfokus pada isi kebijakan, tetapi juga pada hubungan antara tujuan kebijakan, instrumen yang digunakan, aktor yang terlibat, serta mekanisme kelembagaan yang mengatur pelaksanaannya. Dengan memahami komponen-komponen tersebut, pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan pendidikan yang lebih sistematis, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komponen pertama adalah tujuan kebijakan (*Policy Goals*). Tujuan kebijakan pendidikan biasanya berkaitan dengan upaya meningkatkan akses, kualitas, serta pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Tujuan tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial dan prioritas pembangunan suatu negara dalam bidang pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan modern, tujuan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah peserta didik, tetapi juga pada kualitas proses

pembelajaran dan hasil pendidikan. OECD (2022) menekankan bahwa kebijakan pendidikan kontemporer perlu mengintegrasikan tiga tujuan utama, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan inklusi sosial dalam sistem pendidikan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan ekonomi dan dunia kerja. Dengan demikian, tujuan kebijakan menjadi arah strategis yang menentukan berbagai program dan kebijakan pendidikan yang akan dikembangkan.

Komponen kedua adalah instrumen kebijakan (*Policy Instruments*). Instrumen kebijakan merupakan alat atau mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam sektor pendidikan, instrumen kebijakan dapat berbentuk regulasi, insentif finansial, maupun mekanisme evaluasi. Regulasi misalnya dapat berupa standar kurikulum nasional, aturan mengenai kualifikasi guru, atau kebijakan standar nasional pendidikan. Insentif finansial dapat berupa bantuan operasional sekolah, program beasiswa, atau dukungan pembiayaan bagi lembaga pendidikan. Sementara itu, mekanisme evaluasi dapat berupa sistem akreditasi sekolah, penilaian kinerja pendidikan, atau sistem monitoring dan evaluasi program pendidikan. Menurut Hood dan Margetts (2020), pemilihan instrumen kebijakan yang tepat sangat menentukan keberhasilan kebijakan publik karena instrumen tersebut berfungsi sebagai sarana utama untuk mengubah perilaku aktor dalam sistem kebijakan.

Komponen ketiga adalah aktor kebijakan. Dalam sistem pendidikan, berbagai aktor memiliki peran dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan. Aktor tersebut meliputi pemerintah pusat yang merumuskan kebijakan nasional, pemerintah daerah yang mengelola implementasi kebijakan di tingkat lokal, lembaga pendidikan sebagai pelaksana kebijakan di lapangan, serta guru dan tenaga kependidikan yang menjalankan proses pembelajaran. Selain itu, masyarakat dan organisasi sipil juga dapat berperan dalam memberikan masukan, dukungan, maupun pengawasan terhadap kebijakan pendidikan. Interaksi antara berbagai aktor tersebut menciptakan dinamika dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Komponen berikutnya adalah struktur kelembagaan. Struktur kelembagaan mencakup aturan formal, pembagian kewenangan, serta

mekanisme organisasi yang mengatur pelaksanaan kebijakan pendidikan. Peters (2019) menjelaskan bahwa struktur kelembagaan yang jelas dan terkoordinasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena dapat memperjelas peran dan tanggung jawab setiap aktor dalam sistem kebijakan.

Komponen terakhir adalah mekanisme koordinasi. Koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam sektor pendidikan berjalan secara sinergis. Mekanisme koordinasi dapat dilakukan melalui forum kebijakan antar lembaga, sistem monitoring dan evaluasi, serta berbagai bentuk kerja sama antar institusi yang terlibat dalam sistem pendidikan. Dengan adanya koordinasi yang baik, implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan terarah dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan.

BAB IV

POLITIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Politik kebijakan pendidikan merupakan kajian yang menyoroti bagaimana proses perumusan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, kepentingan, serta interaksi berbagai aktor dalam sistem pemerintahan dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses pedagogis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai arena politik di mana negara, birokrasi, kelompok kepentingan, dan masyarakat saling berinteraksi dalam menentukan arah pembangunan pendidikan. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengatur sistem pendidikan melalui proses perencanaan, pengelolaan, serta evaluasi kebijakan guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, politik kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari isu legitimasi negara, distribusi kekuasaan, prioritas anggaran, serta dinamika sosial yang membentuk proses kebijakan pendidikan di tingkat nasional maupun lokal.

A. Pendidikan dalam Kontestasi Kepentingan

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam kehidupan bernegara yang tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses politik karena setiap kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil dari interaksi berbagai kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan sering kali menjadi arena kontestasi kepentingan antara negara, masyarakat, kelompok kepentingan, serta aktor-aktor lain yang

memiliki pengaruh dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Pada literatur administrasi publik, kebijakan pendidikan dipahami sebagai serangkaian keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah dan aktor terkait untuk mengatur sistem pendidikan agar mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini meliputi berbagai aspek seperti kurikulum, pembiayaan pendidikan, standar mutu pendidikan, pengelolaan tenaga pendidik, serta pengembangan infrastruktur pendidikan. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memastikan pemerataan akses serta relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan global.

Pada konteks ini, pendidikan menjadi sektor yang sangat politis karena menyangkut kepentingan jangka panjang negara dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga membentuk identitas nasional, nilai sosial, serta orientasi ideologis generasi muda. Oleh karena itu, berbagai kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi arah kebijakan pendidikan agar sesuai dengan kepentingannya.

1. Pendidikan sebagai Arena Politik Kebijakan

Pendidikan dapat dipahami sebagai arena politik kebijakan karena proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan tidak terlepas dari dinamika kekuasaan, kepentingan, serta nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dalam kajian kebijakan publik, kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Thomas R. Dye (2017) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan tidak hanya berkaitan dengan tindakan pemerintah, tetapi juga dengan keputusan politik mengenai prioritas, alokasi sumber daya, serta arah pembangunan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, setiap kebijakan mencerminkan pilihan politik yang dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan kelompok tertentu, serta nilai-nilai yang dianut oleh para pembuat kebijakan.

Pada konteks pendidikan, pilihan kebijakan tersebut dapat terlihat dalam berbagai keputusan strategis yang menentukan arah sistem pendidikan suatu negara. Pemerintah, misalnya, harus menentukan kebijakan mengenai kurikulum nasional, standar nasional pendidikan, sistem evaluasi pembelajaran, mekanisme pembiayaan pendidikan, serta pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Setiap keputusan tersebut memiliki implikasi yang luas bagi berbagai kelompok masyarakat, seperti siswa, guru, lembaga pendidikan, orang tua, hingga dunia usaha. Karena itu, kebijakan pendidikan sering kali menjadi topik perdebatan publik, terutama ketika kebijakan tersebut dianggap memengaruhi kepentingan kelompok tertentu atau menyangkut isu-isu sensitif seperti pemerataan akses pendidikan, kualitas pembelajaran, dan keadilan dalam pembiayaan pendidikan.

Stephen J. Ball (2015) dalam kajian sosiologi kebijakan pendidikan menekankan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dipahami hanya sebagai produk teknokratis yang dihasilkan melalui analisis rasional semata. Sebaliknya, kebijakan pendidikan juga merupakan produk politik yang mencerminkan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Proses perumusan kebijakan pendidikan sering melibatkan negosiasi, kompromi, serta interaksi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Aktor-aktor tersebut dapat meliputi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, lembaga pendidikan sebagai pelaksana kebijakan, organisasi profesi guru yang memperjuangkan kepentingan tenaga pendidik, akademisi yang memberikan rekomendasi ilmiah, serta kelompok masyarakat sipil yang mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

2. Aktor-Aktor dalam Kontestasi Kebijakan Pendidikan

Kontestasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan, sumber daya, serta tingkat pengaruh yang berbeda dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh satu pihak, melainkan merupakan hasil interaksi antara berbagai aktor yang berupaya memengaruhi arah kebijakan sesuai dengan kepentingan dan nilai yang diperjuangkan. Oleh karena itu, proses kebijakan pendidikan sering kali menjadi arena perdebatan dan

negosiasi antara aktor negara, aktor masyarakat, serta aktor pasar yang masing-masing memiliki peran tertentu dalam sistem pendidikan.

Aktor negara merupakan pihak yang memiliki kewenangan formal dalam proses kebijakan pendidikan. Aktor ini meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, serta birokrasi pendidikan. Pemerintah memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan karena memiliki legitimasi politik dan kewenangan hukum untuk menetapkan regulasi, menentukan standar nasional pendidikan, serta mengalokasikan anggaran pendidikan. Melalui kementerian pendidikan dan lembaga terkait, pemerintah merancang berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pendidikan, serta menjamin pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat. Di sisi lain, parlemen memiliki peran penting dalam proses legislasi, yaitu membahas dan menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan. Selain itu, parlemen juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Birokrasi pendidikan juga merupakan bagian penting dari aktor negara dalam sistem kebijakan pendidikan. Birokrasi berperan dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dan disahkan melalui proses politik. Melalui berbagai lembaga administratif di tingkat pusat maupun daerah, birokrasi menerjemahkan kebijakan pendidikan menjadi program, kegiatan, serta prosedur operasional yang dapat dilaksanakan di lapangan. Dengan demikian, birokrasi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat berjalan secara efektif dalam praktik penyelenggaraan pendidikan.

3. Ideologi dan Nilai dalam Kontestasi Pendidikan

Kontestasi kepentingan dalam kebijakan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek material seperti pembiayaan, infrastruktur, atau distribusi sumber daya pendidikan, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai dan ideologi yang mendasari sistem pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam membentuk cara berpikir, sikap, serta nilai-nilai generasi muda. Oleh

karena itu, kebijakan pendidikan sering menjadi arena perdebatan ideologis mengenai nilai apa yang dianggap penting untuk diajarkan kepada masyarakat. Dalam banyak kasus, perdebatan mengenai kebijakan pendidikan mencerminkan perbedaan pandangan tentang tujuan pendidikan, identitas nasional, serta arah perkembangan masyarakat di masa depan.

Michael W. Apple (2019) menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan tidak pernah bersifat netral, melainkan sering kali mencerminkan nilai-nilai dominan yang berkembang dalam masyarakat. Kurikulum dapat dipandang sebagai representasi dari pilihan sosial mengenai pengetahuan apa yang dianggap penting, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan pengetahuan tersebut, serta bagaimana pengetahuan tersebut disampaikan kepada peserta didik. Karena itu, perdebatan mengenai kurikulum sering menjadi perdebatan politik yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan dengan orientasi ideologis yang berbeda. Kelompok-kelompok tersebut dapat mencakup pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, kelompok agama, serta berbagai komunitas yang memiliki kepentingan terhadap arah pendidikan.

Salah satu contoh perdebatan ideologis dalam kebijakan pendidikan adalah mengenai peran pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Di beberapa negara, terdapat perbedaan pandangan mengenai sejauh mana pendidikan agama harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Sebagian kelompok memandang pendidikan agama sebagai komponen penting dalam pembentukan karakter moral, etika, serta identitas budaya masyarakat. Menurut pandangan ini, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga untuk membentuk nilai-nilai moral yang menjadi dasar kehidupan sosial. Namun, terdapat pula kelompok yang menekankan pentingnya sistem pendidikan yang lebih sekuler dan pluralistik. Kelompok ini berpendapat bahwa pendidikan sebaiknya memberikan ruang yang lebih luas bagi keberagaman keyakinan dan pandangan hidup, sehingga sistem pendidikan dapat mengakomodasi masyarakat yang semakin beragam.

B. Negara, Legitimasi, dan Distribusi Kekuasaan

Pada studi kebijakan publik dan administrasi negara, pendidikan merupakan salah satu instrumen strategis yang digunakan oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan, membangun legitimasi politik, serta mendistribusikan kekuasaan dalam masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga sebagai mekanisme institusional yang memungkinkan negara membentuk identitas nasional, mentransmisikan nilai-nilai sosial, serta mempertahankan stabilitas politik. Oleh karena itu, hubungan antara negara, legitimasi, dan distribusi kekuasaan menjadi elemen penting dalam memahami dinamika politik kebijakan pendidikan.

Secara konseptual, negara memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan karena pendidikan dipandang sebagai barang publik (*public good*) yang harus dijamin oleh negara untuk seluruh warga negara. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan pendidikan merupakan rangkaian keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah dan berbagai aktor terkait untuk mengatur sistem pendidikan, termasuk perencanaan, pengelolaan, serta evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional maupun lokal. Dengan demikian, negara memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan pendidikan serta memastikan bahwa sistem pendidikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, peran tersebut tidak terlepas dari dinamika politik yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan dan distribusi otoritas dalam sistem pemerintahan.

1. Negara sebagai Aktor Utama dalam Kebijakan Pendidikan

Negara merupakan aktor utama dalam kebijakan pendidikan karena memiliki kewenangan formal untuk merumuskan, menetapkan, serta menegakkan berbagai kebijakan yang mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan. Dalam teori politik modern, negara dipahami sebagai institusi yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan publik melalui perangkat hukum dan kebijakan. Max Weber (1922) mendefinisikan negara sebagai organisasi politik yang memiliki monopoli atas penggunaan kekuasaan yang sah dalam suatu wilayah tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa negara memiliki legitimasi

untuk menetapkan aturan yang mengikat seluruh warga negara. Dalam konteks pendidikan, kewenangan tersebut memungkinkan negara untuk mengatur berbagai aspek penting seperti standar pendidikan, sistem kurikulum, mekanisme evaluasi pendidikan, serta pengelolaan lembaga pendidikan.

Peran negara dalam sektor pendidikan umumnya mencakup beberapa fungsi utama yang saling berkaitan. Pertama, negara bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka regulasi yang mengatur sistem pendidikan secara nasional. Kerangka regulasi ini mencakup berbagai kebijakan seperti penetapan kurikulum nasional, standar kompetensi lulusan, standar nasional pendidikan, serta mekanisme akreditasi lembaga pendidikan. Regulasi tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan nasional serta memenuhi standar kualitas tertentu. Melalui regulasi yang jelas, negara dapat menjaga konsistensi penyelenggaraan pendidikan di berbagai wilayah serta menjamin bahwa setiap lembaga pendidikan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Kedua, negara memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan pendidikan melalui anggaran publik. Pendidikan sering dipandang sebagai layanan publik yang memiliki manfaat luas bagi masyarakat, sehingga pemerintah berkewajiban menyediakan dukungan finansial untuk menjamin keberlangsungan sistem pendidikan. Melalui alokasi anggaran pendidikan dalam anggaran negara, pemerintah dapat mendukung berbagai program seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, pemberian bantuan pendidikan bagi siswa, serta pengembangan berbagai program peningkatan kualitas pendidikan. Pembiayaan publik ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda.

Ketiga, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Salah satu prinsip utama dalam kebijakan pendidikan adalah bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan yang dapat memperluas kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang berada di wilayah terpencil atau kelompok sosial yang

kurang beruntung. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sekolah di berbagai daerah, penyediaan bantuan pendidikan, serta program khusus yang bertujuan mengurangi ketimpangan pendidikan.

2. Legitimasi Negara melalui Kebijakan Pendidikan

Legitimasi merupakan konsep penting dalam teori politik yang berkaitan dengan tingkat penerimaan masyarakat terhadap otoritas dan kebijakan pemerintah. Dalam sistem politik, legitimasi menjadi dasar bagi stabilitas pemerintahan karena menentukan sejauh mana masyarakat bersedia mematuhi aturan dan mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh negara. David Easton (1965) menjelaskan bahwa legitimasi merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap sistem politik yang membuat pemerintah memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan publik. Dukungan tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah bertindak untuk kepentingan publik. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan menjadi salah satu instrumen penting bagi negara untuk membangun dan mempertahankan legitimasi politiknya.

Pada praktiknya, legitimasi negara dalam sektor pendidikan sering dibangun melalui kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan merupakan layanan publik yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesempatan individu untuk meningkatkan kualitas hidup serta berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Ketika negara mampu menyediakan akses pendidikan yang adil, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, masyarakat cenderung memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pendidikan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Kegagalan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat menimbulkan tantangan serius terhadap legitimasi negara. Ketimpangan akses pendidikan antara wilayah atau kelompok sosial tertentu, kualitas pendidikan yang rendah, serta kebijakan pendidikan yang tidak responsif

terhadap kebutuhan masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan publik. Kondisi tersebut dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memunculkan kritik terhadap efektivitas kebijakan pendidikan yang dijalankan. Dalam beberapa kasus, masalah dalam sektor pendidikan bahkan dapat memicu perdebatan politik yang lebih luas mengenai tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara.

Pendidikan juga memiliki fungsi simbolik dalam membangun legitimasi negara. Melalui sistem pendidikan, negara memiliki kesempatan untuk mentransmisikan nilai-nilai nasional, sejarah bangsa, serta identitas kolektif kepada generasi muda. Kurikulum pendidikan sering dirancang tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan akademik siswa, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, rasa tanggung jawab sebagai warga negara, serta pemahaman mengenai sistem politik dan sosial yang berlaku. Dengan cara ini, pendidikan berperan dalam membentuk kesadaran kolektif mengenai identitas nasional dan pentingnya menjaga persatuan dalam masyarakat.

3. Pendidikan sebagai Mekanisme Distribusi Kekuasaan

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan kemampuan individu atau sebagai alat legitimasi negara, tetapi juga berperan sebagai mekanisme distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perspektif politik dan kebijakan publik, akses terhadap pendidikan serta pengelolaan sistem pendidikan dapat memengaruhi bagaimana kekuasaan, sumber daya, dan kesempatan didistribusikan di antara berbagai kelompok sosial. Pendidikan memberikan peluang bagi individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan posisi sosial yang lebih baik, sehingga berkontribusi pada pembentukan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan sering kali memiliki implikasi politik yang berkaitan dengan pemerataan kesempatan, keadilan sosial, serta distribusi sumber daya publik.

Salah satu bentuk distribusi kekuasaan dalam sistem pendidikan dapat dilihat melalui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, pengelolaan pendidikan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat, tetapi sebagian kewenangan diberikan kepada

pemerintah daerah. Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi serta memungkinkan kebijakan pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan adanya kewenangan di tingkat daerah, pemerintah daerah dapat merancang program pendidikan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan adanya inovasi kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual serta memperkuat partisipasi lokal dalam pengelolaan pendidikan.

Desentralisasi pendidikan juga menghadirkan berbagai tantangan dalam distribusi kekuasaan. Perbedaan kapasitas administratif, ketersediaan sumber daya, serta kondisi ekonomi antar daerah dapat menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan. Daerah yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, meskipun sebagian kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memiliki peran penting dalam menjaga standar nasional pendidikan serta memastikan pemerataan sumber daya pendidikan di seluruh wilayah. Melalui kebijakan nasional, pemerintah pusat dapat menetapkan standar kualitas pendidikan, menyediakan dukungan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

Distribusi kekuasaan dalam pendidikan juga terjadi antara negara dan masyarakat. Dalam sistem demokrasi modern, masyarakat memiliki peran yang semakin besar dalam proses perumusan kebijakan pendidikan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti forum konsultasi publik, organisasi masyarakat sipil, serta keterlibatan dalam pengelolaan sekolah. Melalui partisipasi tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah.

C. Politik Anggaran dan Prioritas Publik

Politik anggaran merupakan salah satu dimensi penting dalam kajian politik kebijakan pendidikan. Anggaran pendidikan tidak hanya

mencerminkan kebutuhan teknis dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga menggambarkan prioritas politik pemerintah, relasi kekuasaan, serta kepentingan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam perspektif kebijakan publik, proses penyusunan dan alokasi anggaran pendidikan merupakan arena kontestasi antara berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang berusaha mempengaruhi arah pembangunan pendidikan suatu negara.

1. Konsep Politik Anggaran dalam Kebijakan Pendidikan

Konsep politik anggaran dalam kebijakan pendidikan merujuk pada proses politik yang menentukan bagaimana sumber daya keuangan negara dialokasikan untuk mendukung pembangunan sektor pendidikan. Dalam praktiknya, anggaran pendidikan tidak dapat dipahami sebagai dokumen teknis semata, melainkan sebagai produk dari dinamika politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Pemerintah, legislatif, birokrasi, kelompok kepentingan, serta masyarakat memiliki peran dalam mempengaruhi arah dan prioritas penggunaan anggaran pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan anggaran mencerminkan pilihan politik mengenai program mana yang diprioritaskan, kelompok mana yang diuntungkan, serta tujuan pembangunan apa yang ingin dicapai melalui sektor pendidikan.

Pada perspektif kebijakan publik, proses penganggaran selalu terkait dengan pertarungan nilai, kepentingan, dan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Deborah Stone yang menyatakan bahwa pembuatan kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses politik yang melibatkan perebutan sumber daya, nilai, serta legitimasi untuk menentukan keputusan yang berdampak pada masyarakat luas. Dengan demikian, keputusan mengenai alokasi anggaran pendidikan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis atau kebutuhan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh agenda politik pemerintah, tekanan kelompok kepentingan, serta kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam situasi tertentu, program pendidikan dapat memperoleh prioritas anggaran yang lebih besar apabila dianggap mampu mendukung stabilitas politik, meningkatkan legitimasi pemerintah, atau memenuhi tuntutan publik.

Pemerintah memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan anggaran pendidikan. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab merumuskan prioritas pembangunan pendidikan, tetapi juga menentukan besaran pendanaan serta mekanisme distribusi sumber daya ke berbagai lembaga pendidikan. Dalam buku *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Administrasi Publik: Teori dan Praktik*, dijelaskan bahwa pemerintah sebagai aktor utama dalam kebijakan publik memiliki kewenangan untuk menetapkan tujuan pendidikan, merancang program-program pendidikan, serta menentukan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran pendidikan merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang mencerminkan orientasi pembangunan negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Anggaran Pendidikan sebagai Instrumen Kebijakan Publik

Anggaran pendidikan dalam sistem administrasi publik modern tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Melalui anggaran, pemerintah dapat menentukan arah pembangunan pendidikan serta memastikan bahwa berbagai program strategis dapat dijalankan secara efektif. Dalam konteks ini, anggaran pendidikan digunakan untuk membiayai berbagai program penting seperti perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan. Dengan kata lain, anggaran menjadi sarana utama bagi pemerintah untuk menerjemahkan visi dan tujuan kebijakan pendidikan ke dalam program-program nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.

Sebagai instrumen kebijakan publik, anggaran pendidikan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lembaga internasional seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menegaskan bahwa investasi dalam sektor pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta meningkatkan

daya saing suatu negara. Pendidikan yang berkualitas mampu menghasilkan tenaga kerja yang produktif, inovatif, dan memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan global. Oleh karena itu, banyak negara di dunia menjadikan peningkatan alokasi anggaran pendidikan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mendukung kemajuan ekonomi.

Pada praktiknya, alokasi anggaran pendidikan tidak selalu stabil dan sering dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta prioritas pembangunan pemerintah. Ketika kondisi ekonomi suatu negara berada dalam keadaan stabil dan mengalami pertumbuhan yang baik, pemerintah biasanya memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk meningkatkan investasi di sektor pendidikan. Hal ini memungkinkan peningkatan pembiayaan berbagai program pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru, peningkatan fasilitas pendidikan, serta pengembangan kapasitas tenaga pendidik. Sebaliknya, ketika suatu negara menghadapi tekanan ekonomi atau krisis fiskal, pemerintah sering kali harus melakukan penyesuaian terhadap anggaran yang tersedia, termasuk dalam sektor pendidikan.

3. Prioritas Publik dalam Alokasi Anggaran Pendidikan

Prioritas publik dalam alokasi anggaran pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan demokratis. Dalam sistem ini, kebijakan anggaran tidak hanya ditentukan oleh pemerintah semata, tetapi juga dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat serta dinamika politik yang berkembang. Alokasi anggaran pendidikan pada dasarnya mencerminkan pilihan prioritas pembangunan yang dianggap penting oleh negara dan masyarakat. Prioritas tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan, kebutuhan pembangunan ekonomi yang memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, serta agenda politik pemerintah yang ingin mendorong reformasi pendidikan. Oleh karena itu, anggaran pendidikan sering menjadi salah satu isu strategis dalam perdebatan kebijakan publik karena berkaitan langsung dengan masa depan pembangunan nasional.

Pada kajian kebijakan publik, proses penentuan prioritas kebijakan sering kali dipengaruhi oleh interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan nilai yang berbeda. Menurut Paul A. Sabatier dan Christopher M. Weible (2018), kebijakan publik banyak dipengaruhi oleh keberadaan advocacy coalition atau koalisi advokasi yang terdiri dari berbagai aktor seperti pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok kepentingan. Koalisi ini berupaya mempengaruhi proses perumusan kebijakan dengan cara menyuarakan gagasan, nilai, serta kepentingan yang diperjuangkan. Dalam konteks pendidikan, koalisi advokasi tersebut dapat mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembiayaan pendidikan melalui kebijakan anggaran negara.

Keterlibatan kelompok kepentingan dalam proses advokasi anggaran pendidikan juga menjadi fenomena yang umum dalam sistem demokrasi. Berbagai aktor seperti organisasi profesi guru, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas orang tua siswa sering berperan aktif dalam mendorong peningkatan alokasi anggaran Pendidikan, dapat melakukan advokasi melalui forum kebijakan publik, dialog dengan pemerintah, penelitian akademik, maupun kampanye sosial yang menekankan pentingnya investasi dalam sektor pendidikan. Upaya tersebut bertujuan agar pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional, mengingat perannya yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

D. Kebijakan Nasional dan Dinamika Lokal

Hubungan antara kebijakan nasional dan dinamika lokal merupakan salah satu aspek penting dalam politik kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan pada umumnya dirumuskan di tingkat nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan negara, namun implementasinya berlangsung dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat beragam di tingkat lokal. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kemampuan

sistem pemerintahan dalam menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi lokal yang berbeda-beda.

Pada perspektif administrasi publik, kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur sistem pendidikan secara sistematis dan terencana. Kebijakan tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, serta evaluasi berbagai program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pendidikan nasional memiliki peran penting sebagai kerangka normatif yang mengarahkan penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah negara.

Implementasi kebijakan pendidikan nasional tidak berlangsung dalam ruang yang homogen. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda sehingga menimbulkan dinamika lokal yang mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik. Interaksi antara kebijakan nasional dan kondisi lokal inilah yang membentuk kompleksitas tata kelola pendidikan dalam sistem pemerintahan modern.

1. Kebijakan Nasional sebagai Kerangka Regulatif

Kebijakan pendidikan nasional memiliki peran penting sebagai kerangka regulatif yang memberikan arah, standar, serta pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah negara. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat menetapkan berbagai aturan dan standar yang harus dipatuhi oleh lembaga pendidikan agar sistem pendidikan dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Kebijakan tersebut biasanya mencakup pengaturan mengenai kurikulum nasional, standar kompetensi lulusan, sistem evaluasi pendidikan, serta mekanisme pembiayaan pendidikan. Dengan adanya kerangka regulatif yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di berbagai daerah tetap berada dalam satu sistem nasional yang memiliki tujuan dan standar yang sama. Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan secara lebih sistematis sehingga kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan.

Pada perspektif kebijakan publik, perumusan kebijakan pendidikan nasional bertujuan untuk menciptakan keseragaman standar pendidikan sehingga seluruh warga negara memiliki kesempatan yang relatif sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Standar nasional pendidikan, misalnya, dirancang untuk memastikan bahwa proses pembelajaran, kualifikasi tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, lembaga pendidikan di berbagai wilayah diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang sebanding meskipun berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda. Pendekatan ini menjadi penting untuk menjaga keadilan dalam sistem pendidikan, terutama di negara yang memiliki keragaman wilayah dan tingkat pembangunan yang tidak merata.

Menurut Michael Hill dan Peter Hupe (2021), kebijakan publik yang dirumuskan di tingkat nasional umumnya bertujuan untuk menjaga konsistensi serta kesetaraan dalam penyediaan layanan publik di seluruh wilayah negara. Dalam konteks pendidikan, kebijakan nasional berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengurangi ketimpangan pendidikan antar daerah dengan menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh seluruh lembaga pendidikan. Dengan adanya standar nasional, pemerintah dapat memastikan bahwa sistem pendidikan tidak hanya berkembang di wilayah tertentu saja, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Kebijakan ini juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengarahkan sistem pendidikan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan daya saing bangsa.

2. Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Daerah

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu pendekatan penting dalam tata kelola pendidikan modern yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan pendidikan. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan yang sebelumnya berada di tangan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan pendidikan dapat dilakukan secara lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar dalam merencanakan, mengelola, serta mengembangkan kebijakan pendidikan di wilayahnya masing-masing.

Tujuan utama dari desentralisasi adalah meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pada perspektif administrasi publik, desentralisasi memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya pendidikan sesuai dengan kondisi lokal yang dihadapi. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan berbagai kebijakan pendidikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Kewenangan tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti pengelolaan sekolah, pengembangan program pendidikan berbasis kebutuhan lokal, pengelolaan tenaga pendidik, hingga pengalokasian sumber daya pendidikan di tingkat daerah. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan inovasi kebijakan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan pendidikan dapat berjalan secara lebih responsif dan efektif.

Penerapan desentralisasi pendidikan juga menghadirkan berbagai tantangan dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan kapasitas administratif dan sumber daya antara daerah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola sistem pendidikan secara efektif. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat, sumber daya manusia yang memadai, serta infrastruktur yang lebih baik cenderung mampu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih berkualitas. Sebaliknya, daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya sering menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, maupun mengembangkan program pendidikan yang inovatif.

3. Adaptasi Lokal terhadap Kebijakan Nasional

Adaptasi lokal terhadap kebijakan nasional merupakan bagian penting dalam proses implementasi kebijakan pendidikan. Meskipun kebijakan pendidikan dirumuskan di tingkat nasional dengan tujuan menciptakan standar yang seragam, penerapannya di tingkat lokal sering kali memerlukan penyesuaian terhadap kondisi nyata yang dihadapi oleh lembaga pendidikan. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, serta sumber daya pendidikan yang berbeda-beda sehingga kebijakan yang bersifat nasional tidak selalu dapat diterapkan

secara identik di semua wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, birokrasi pendidikan, sekolah, serta tenaga pendidik memiliki peran penting dalam menyesuaikan kebijakan tersebut agar dapat berjalan secara efektif dalam konteks lokal.

Proses adaptasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada perumusan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dan dilaksanakan oleh aktor-aktor di lapangan. Dalam kajian kebijakan publik, peran aktor pelaksana sering kali menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Michael Lipsky (2010) memperkenalkan konsep *Street-Level bureaucrats*, yaitu para pelaksana kebijakan yang berada di garis depan pelayanan publik seperti guru, kepala sekolah, dan administrator pendidikan. Menurut Lipsky, para aktor ini memiliki ruang diskresi atau kewenangan tertentu dalam menerjemahkan kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional ke dalam praktik sehari-hari. Dengan kata lain, tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang secara langsung membentuk bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan.

Pada konteks pendidikan, guru dan kepala sekolah sering menghadapi berbagai situasi yang menuntut penyesuaian terhadap kebijakan nasional. Misalnya, dalam penerapan kurikulum nasional, guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan peserta didik, kondisi sosial masyarakat, serta fasilitas pendidikan yang tersedia di sekolah. Demikian pula dalam sistem evaluasi pendidikan, sekolah sering kali mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih kontekstual agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif. Proses adaptasi ini memungkinkan kebijakan pendidikan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan lokal serta membantu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di sekolah.

E. Politik Simbolik dan Produksi Wacana Pendidikan

Politik kebijakan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan formal, alokasi anggaran, atau pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di balik proses tersebut terdapat dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu politik simbolik dan

produksi wacana pendidikan. Politik simbolik merujuk pada penggunaan simbol, bahasa, narasi, dan ideologi dalam membentuk persepsi publik mengenai pendidikan serta legitimasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sementara itu, produksi wacana pendidikan berkaitan dengan bagaimana berbagai aktor membangun, menyebarkan, dan mengkonstruksi makna mengenai pendidikan melalui berbagai medium sosial, politik, dan budaya.

Pada perspektif kebijakan publik, kebijakan tidak hanya merupakan produk rasional dari analisis teknokratis, tetapi juga merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses komunikasi politik, interpretasi, dan representasi simbolik. Stone (2012) menjelaskan bahwa kebijakan publik sering kali dibangun melalui narasi dan simbol yang digunakan untuk meyakinkan masyarakat bahwa suatu kebijakan merupakan solusi terbaik bagi masalah publik. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan sering disertai dengan berbagai simbol dan narasi yang bertujuan memperkuat legitimasi pemerintah dalam mengelola sistem pendidikan.

Pada konteks administrasi publik, kebijakan pendidikan merupakan instrumen penting bagi negara untuk membentuk nilai sosial, identitas nasional, serta orientasi pembangunan masyarakat. Melalui kebijakan pendidikan, negara tidak hanya mengatur sistem pembelajaran, tetapi juga mentransmisikan nilai-nilai tertentu kepada generasi muda. Kebijakan pendidikan dengan demikian tidak terlepas dari proses produksi wacana yang membentuk cara masyarakat memahami tujuan dan fungsi pendidikan.

1. Politik Simbolik dalam Kebijakan Pendidikan

Politik simbolik dalam kebijakan pendidikan merujuk pada penggunaan simbol, bahasa, slogan, dan representasi tertentu oleh pemerintah untuk membangun dukungan publik terhadap kebijakan yang dibuat. Dalam praktik kebijakan publik, simbol sering digunakan sebagai alat komunikasi politik untuk menyampaikan pesan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, termasuk di sektor pendidikan. Simbol-simbol tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti program nasional pendidikan, slogan reformasi pendidikan, atau narasi besar mengenai

perubahan sistem pendidikan. Melalui simbol dan bahasa yang kuat, pemerintah berusaha membangun citra bahwa kebijakan pendidikan yang diambil merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

Pada kajian kebijakan publik, simbol memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Murray Edelman (1988) menjelaskan bahwa simbol politik memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara masyarakat memahami realitas sosial dan politik. Simbol dapat menciptakan persepsi bahwa pemerintah sedang melakukan tindakan yang signifikan untuk mengatasi suatu masalah publik. Dalam banyak kasus, simbol tersebut mampu memberikan rasa optimisme dan harapan kepada masyarakat bahwa perubahan positif sedang berlangsung. Namun, kekuatan simbol juga terletak pada kemampuannya mempengaruhi persepsi publik, bahkan ketika dampak nyata dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlihat dalam praktik.

Pada sektor pendidikan, politik simbolik sering terlihat dalam berbagai program nasional yang menggunakan istilah atau slogan tertentu yang memiliki makna kuat secara politik maupun sosial. Misalnya, pemerintah dapat memperkenalkan program dengan narasi seperti “revolusi pendidikan”, “pendidikan karakter”, atau “transformasi pendidikan”. Istilah-istilah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai nama program, tetapi juga sebagai simbol yang menggambarkan komitmen pemerintah terhadap perubahan sistem pendidikan. Penggunaan simbol semacam ini dapat meningkatkan perhatian publik terhadap isu pendidikan sekaligus memperkuat dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang sedang dijalankan.

2. Produksi Wacana Pendidikan dalam Kebijakan Publik

Produksi wacana pendidikan dalam kebijakan publik merujuk pada proses pembentukan makna, gagasan, dan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan melalui berbagai praktik sosial, politik, dan budaya. Wacana pendidikan tidak hanya dibentuk oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga oleh berbagai aktor lain seperti akademisi, media massa, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga internasional. Berbagai aktor tersebut berkontribusi dalam membentuk

narasi tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan yang baik, apa tujuan utama pendidikan, serta bagaimana sistem pendidikan seharusnya dikembangkan. Melalui interaksi berbagai aktor tersebut, wacana pendidikan berkembang menjadi kerangka pemikiran yang mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menilai kebijakan pendidikan.

Pada perspektif teori wacana, Michel Foucault (1980) menjelaskan bahwa wacana merupakan sistem pengetahuan yang membentuk cara masyarakat memahami realitas sosial. Wacana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan realitas, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat terhadap suatu isu. Dengan kata lain, wacana dapat menentukan apa yang dianggap penting, apa yang dipandang sebagai masalah, serta solusi apa yang dianggap tepat dalam menghadapi masalah tersebut. Dalam konteks kebijakan publik, wacana menjadi alat yang sangat kuat karena dapat mempengaruhi arah perumusan kebijakan serta cara masyarakat menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pada bidang pendidikan, wacana berperan penting dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan fungsi pendidikan. Misalnya, terdapat wacana yang memandang pendidikan sebagai investasi ekonomi. Dalam perspektif ini, pendidikan dipahami sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi teknologi, serta memperkuat daya saing ekonomi suatu negara. Wacana ini sering muncul dalam kebijakan yang menekankan pengembangan keterampilan kerja, pendidikan vokasi, serta peningkatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pendidikan dalam konteks ini dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi individu maupun negara.

BAB V

AKTOR NEGARA DAN BIROKRASI PENDIDIKAN

Aktor negara dan birokrasi pendidikan merupakan komponen utama dalam proses perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pendidikan dalam sistem pemerintahan modern. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keputusan politik di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga oleh kapasitas birokrasi dan aktor pemerintah di berbagai tingkatan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam praktik penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah pusat berperan dalam merumuskan desain kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah menjadi aktor penting dalam pelaksanaan kebijakan secara otonom sesuai dengan konteks lokal. Di sisi lain, birokrasi pendidikan, sekolah, dan guru bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan peserta didik. Dalam kerangka ini, administrasi publik berfungsi sebagai mekanisme pengorganisasian, koordinasi, serta pengelolaan sumber daya untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat diterjemahkan menjadi layanan pendidikan yang efektif dan merata bagi masyarakat. Oleh karena itu, memahami peran aktor negara dan birokrasi pendidikan menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pendidikan diproduksi, dijalankan, dan mempengaruhi kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan.

A. Pemerintah Pusat dan Desain Kebijakan Nasional

Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam merancang dan menetapkan arah kebijakan pendidikan nasional. Dalam sistem pemerintahan modern, negara berfungsi sebagai aktor utama yang menentukan visi, regulasi, serta kerangka institusional yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. Melalui kementerian terkait seperti

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pemerintah pusat merumuskan kebijakan yang bersifat makro dan nasional, yang kemudian menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola sistem pendidikan. Desain kebijakan nasional ini mencerminkan komitmen negara dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memperkuat daya saing bangsa, dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

1. Konsep Desain Kebijakan Pendidikan Nasional

Konsep desain kebijakan pendidikan nasional dalam kajian administrasi publik merujuk pada proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk merancang arah, tujuan, serta strategi penyelenggaraan pendidikan dalam suatu negara. Desain kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan penyusunan peraturan atau regulasi formal, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting seperti penentuan prioritas pembangunan pendidikan, pengalokasian sumber daya, perencanaan program, serta mekanisme evaluasi kebijakan. Melalui proses desain kebijakan yang terencana dengan baik, pemerintah berupaya memastikan bahwa sistem pendidikan dapat berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, desain kebijakan pendidikan merupakan tahapan strategis yang menentukan bagaimana sistem pendidikan dikembangkan, dikelola, dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada perspektif analisis kebijakan publik, desain kebijakan merupakan proses yang bersifat analitis dan rasional. William N. Dunn (2018) menjelaskan bahwa desain kebijakan publik adalah proses analisis yang bertujuan untuk menghasilkan berbagai alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah publik secara efektif. Dalam proses ini, para pembuat kebijakan perlu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, menganalisis berbagai pilihan solusi yang tersedia, serta mempertimbangkan dampak dari setiap alternatif kebijakan yang mungkin diterapkan. Dalam konteks pendidikan, proses desain kebijakan bertujuan untuk merumuskan strategi yang mampu menjawab berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti ketimpangan akses pendidikan antar wilayah,

rendahnya kualitas pembelajaran, serta kebutuhan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.

Di Indonesia, kerangka dasar kebijakan pendidikan nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah negara. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia secara menyeluruh, baik dari aspek intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. Sebagai kerangka normatif, undang-undang ini memberikan arah bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum nasional, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

2. Peran Pemerintah Pusat dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Peran pemerintah pusat dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional sangat penting karena pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan arah, kerangka regulasi, serta standar penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah negara. Dalam sistem administrasi publik modern, pemerintah pusat tidak hanya bertindak sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pengarah kebijakan yang memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan secara terkoordinasi dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Peran tersebut mencakup fungsi regulasi, koordinasi antar lembaga, penyediaan pendanaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan. Melalui fungsi-fungsi tersebut, pemerintah pusat berusaha memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Salah satu peran utama pemerintah pusat adalah menetapkan kerangka regulasi nasional yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. Kerangka regulasi ini mencakup berbagai bentuk peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta kebijakan kementerian yang mengatur berbagai aspek pendidikan. Regulasi tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah,

lembaga pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan sistem pendidikan. Aturan tersebut mencakup pengaturan mengenai kurikulum nasional, standar pendidikan, sistem evaluasi pembelajaran, serta tata kelola lembaga pendidikan. Dalam kajian kebijakan publik, Michael Howlett dan M. Ramesh (2014) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan modern berperan sebagai *Policy Designer*, yaitu aktor yang merancang arah strategis kebijakan publik melalui penetapan regulasi dan kebijakan makro. Dalam konteks pendidikan, regulasi nasional bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan secara konsisten serta memberikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan standar nasional pendidikan yang menjadi acuan bagi seluruh lembaga pendidikan. Standar nasional ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga mutu pendidikan agar tetap berada dalam kualitas yang relatif setara di berbagai wilayah. Di Indonesia, standar nasional pendidikan mencakup berbagai komponen penting yang mengatur proses penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Komponen tersebut meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi atau kurikulum, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan pendidikan, serta standar pembiayaan pendidikan. Dengan adanya standar tersebut, lembaga pendidikan memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan proses pembelajaran serta mengembangkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

B. Pemerintah Daerah dan Implementasi Otonom

Pada sistem pemerintahan modern yang menerapkan prinsip desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pendidikan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan, memperkuat responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan lokal, serta mendorong

partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Pada perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan menjadi program dan tindakan nyata. Hill dan Hupe (2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak sekadar proses administratif, tetapi merupakan proses yang melibatkan interpretasi, adaptasi, serta interaksi antara berbagai aktor dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks pendidikan, pemerintah daerah berperan strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal.

1. Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Daerah

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu bagian penting dari reformasi administrasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Dalam sistem yang terdesentralisasi, sebagian kewenangan yang sebelumnya berada di tangan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah. Kewenangan tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti pengelolaan sekolah, perencanaan program pendidikan daerah, pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, serta pengelolaan anggaran pendidikan. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar dalam mengatur dan mengembangkan sistem pendidikan di wilayahnya masing-masing sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pada perspektif administrasi publik, desentralisasi dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan mendekatkan proses kebijakan kepada masyarakat. Dennis A. Rondinelli (2013) menjelaskan bahwa desentralisasi dalam sektor publik bertujuan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan dengan memberikan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih dekat

dengan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Dalam sektor pendidikan, pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan program pendidikan yang lebih kontekstual, misalnya melalui pengembangan kurikulum lokal, peningkatan kualitas tenaga pendidik di daerah, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi pendidikan mulai diperkuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan tersebut, sebagian besar kewenangan dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk mengelola sekolah, mengatur distribusi tenaga pendidik, serta merencanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui pengelolaan yang lebih dekat dengan masyarakat serta memungkinkan pemerintah daerah merespons berbagai permasalahan pendidikan secara lebih cepat dan efektif.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pendidikan sangat penting karena pemerintah daerah merupakan pihak yang berada paling dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan pendidikan di wilayahnya. Dalam sistem desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana utama kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat. Hal ini berarti bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan tersebut di tingkat lokal. Melalui kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang responsif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Peran pertama pemerintah daerah adalah mengelola penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya. Tanggung jawab ini meliputi pengelolaan sekolah, penyediaan dan distribusi tenaga pendidik, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengawasan terhadap proses pembelajaran di sekolah. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang adil dan merata. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan sehingga setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang optimal. Menurut Ardhana Januar Mahardhani dalam buku *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Administrasi Publik: Teori dan Praktik*, implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya pendidikan secara efektif.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam perencanaan pendidikan daerah. Perencanaan ini dilakukan melalui penyusunan rencana pembangunan pendidikan yang disesuaikan dengan arah kebijakan pendidikan nasional. Dalam proses ini, pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pendidikan di wilayahnya, menentukan prioritas pembangunan pendidikan, serta merancang program-program yang relevan dengan kondisi daerah. Perencanaan yang baik akan membantu pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan pendidikan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul di tingkat lokal.

3. Adaptasi Kebijakan Nasional di Tingkat Lokal

Adaptasi kebijakan nasional di tingkat lokal merupakan salah satu karakteristik penting dalam implementasi kebijakan pendidikan di daerah. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat pada umumnya bersifat umum dan dirancang untuk berlaku secara nasional. Namun, Indonesia memiliki kondisi wilayah yang sangat beragam, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis. Oleh karena itu, kebijakan tersebut sering kali memerlukan penyesuaian

ketika diterapkan di tingkat daerah agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam bentuk program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi lokal.

Proses adaptasi kebijakan ini biasanya melibatkan interpretasi terhadap isi kebijakan oleh pemerintah daerah serta penyesuaian terhadap karakteristik wilayah. Pemerintah daerah perlu memahami tujuan utama dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, kemudian menyesuaikannya dengan potensi serta permasalahan pendidikan yang ada di daerah. Melalui proses tersebut, kebijakan yang bersifat nasional dapat diimplementasikan secara lebih fleksibel dan kontekstual. Hal ini penting agar kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Salah satu contoh adaptasi kebijakan pendidikan dapat dilihat dalam pengembangan kurikulum di tingkat daerah. Meskipun pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar kurikulum nasional, pemerintah daerah dan satuan pendidikan memiliki ruang untuk mengembangkan muatan lokal yang sesuai dengan budaya, potensi, serta kebutuhan masyarakat setempat. Muatan lokal ini dapat berupa pembelajaran mengenai bahasa daerah, kesenian tradisional, kearifan lokal, maupun potensi ekonomi daerah. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pelestarian budaya dan pengembangan potensi daerah.

C. Birokrasi Pendidikan sebagai *Policy Executor*

Birokrasi pendidikan merupakan aktor penting dalam proses implementasi kebijakan pendidikan karena berfungsi sebagai pelaksana utama kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Dalam sistem administrasi publik, birokrasi bertugas menerjemahkan keputusan politik dan kebijakan formal menjadi program, regulasi operasional, serta tindakan nyata yang dapat dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh

kualitas desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas birokrasi dalam menjalankan kebijakan tersebut secara efektif.

Pada perspektif administrasi publik, birokrasi dipahami sebagai organisasi yang memiliki struktur hierarkis, pembagian kerja yang jelas, serta prosedur formal yang dirancang untuk memastikan efisiensi dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Konsep birokrasi modern pertama kali dijelaskan secara sistematis oleh Weber (1922), yang menekankan bahwa birokrasi merupakan bentuk organisasi rasional yang memungkinkan negara menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Dalam sektor pendidikan, birokrasi berperan sebagai perangkat institusional yang menghubungkan antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dengan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Pada konteks kebijakan pendidikan, birokrasi pendidikan meliputi berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan, seperti kementerian pendidikan, dinas pendidikan daerah, lembaga penjamin mutu pendidikan, serta berbagai unit administratif lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai *policy executor*, yaitu aktor yang menerjemahkan kebijakan menjadi program dan kegiatan operasional yang dapat dijalankan oleh lembaga pendidikan.

Kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, birokrasi pendidikan memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif melalui perencanaan program, pengelolaan sumber daya, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan.

1. Fungsi Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Birokrasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan pendidikan. Dalam sistem administrasi publik, birokrasi berfungsi sebagai pelaksana utama berbagai kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Melalui struktur organisasi yang sistematis dan prosedur kerja yang jelas, birokrasi pendidikan memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat diterapkan secara efektif

di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga satuan pendidikan di daerah. Dengan kata lain, keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten dan terkoordinasi.

Salah satu fungsi utama birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah fungsi administratif. Fungsi ini berkaitan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan administrasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan. Birokrasi pendidikan bertanggung jawab dalam mengelola data pendidikan, seperti data peserta didik, tenaga pendidik, serta kondisi sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, birokrasi juga mengatur berbagai aspek administrasi sekolah, termasuk pengelolaan tenaga pendidik, distribusi guru, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Melalui fungsi administratif yang baik, birokrasi dapat memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan secara teratur dan terorganisasi.

Birokrasi pendidikan juga memiliki fungsi koordinatif. Sistem pendidikan merupakan sistem yang kompleks karena melibatkan banyak pihak dengan peran yang berbeda-beda, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, serta masyarakat. Dalam kondisi tersebut, birokrasi berperan sebagai penghubung yang mengoordinasikan berbagai pihak agar kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan secara terpadu. Koordinasi yang baik akan membantu menyelaraskan program pendidikan di berbagai tingkatan pemerintahan serta mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan atau program pendidikan.

Fungsi berikutnya adalah fungsi regulatif. Dalam menjalankan fungsi ini, birokrasi pendidikan bertugas memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan peraturan, standar, serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui fungsi regulatif, birokrasi dapat menjaga kualitas pendidikan serta memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan mematuhi standar nasional pendidikan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, proses pendidikan dapat berjalan secara lebih terarah dan terjamin kualitasnya.

2. Struktur Birokrasi Pendidikan

Struktur birokrasi pendidikan merupakan kerangka organisasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan pendidikan secara sistematis. Struktur ini biasanya disusun secara hierarkis, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat daerah dan satuan pendidikan. Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas, pemerintah dapat mengoordinasikan berbagai program pendidikan serta memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah. Struktur birokrasi pendidikan juga berfungsi sebagai mekanisme penghubung antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah dan sekolah.

Pada tingkat nasional, birokrasi pendidikan diwakili oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan pendidikan nasional. Kementerian ini memiliki berbagai unit kerja atau direktorat yang menangani aspek-aspek tertentu dalam sistem pendidikan, seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, serta pengembangan pendidikan tinggi dan penelitian. Melalui unit-unit kerja tersebut, kementerian dapat merancang berbagai program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Selain itu, kementerian juga berperan dalam menetapkan standar nasional pendidikan yang menjadi pedoman bagi seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.

Pada tingkat daerah, birokrasi pendidikan diwujudkan melalui dinas pendidikan yang berada di bawah pemerintah daerah. Dinas pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya masing-masing, termasuk dalam hal perencanaan program pendidikan, pengelolaan tenaga pendidik, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Dinas pendidikan juga berperan sebagai penghubung antara kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dengan pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah. Dalam menjalankan tugasnya, dinas pendidikan harus mampu menyesuaikan kebijakan pendidikan nasional dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang terdapat di daerah. Dengan demikian,

implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

D. Sekolah sebagai Organisasi Publik

Sekolah merupakan institusi utama dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai penyedia layanan pendidikan kepada masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, sekolah dapat dipahami sebagai organisasi publik karena menjalankan fungsi pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan. Sebagai organisasi publik, sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran, tetapi juga terhadap pengelolaan sumber daya, implementasi kebijakan pendidikan, serta akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah.

Pada sistem kebijakan pendidikan, sekolah berada pada posisi strategis karena menjadi unit pelaksana langsung dari berbagai kebijakan pendidikan yang dirumuskan oleh pemerintah. Kebijakan mengenai kurikulum, standar pendidikan, pengelolaan tenaga pendidik, serta sistem evaluasi pendidikan pada akhirnya diimplementasikan di tingkat sekolah. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan sekolah sebagai organisasi publik dalam menjalankan berbagai fungsi pendidikan secara efektif.

Pada perspektif kebijakan pendidikan, sekolah merupakan bagian integral dari sistem administrasi publik yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pedagogis, tetapi juga sebagai organisasi administratif yang mengelola berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan.

1. Karakteristik Sekolah sebagai Organisasi Publik

Sekolah sebagai organisasi publik memiliki karakteristik yang membedakannya dari organisasi privat. Perbedaan utama tersebut terletak pada tujuan dan orientasi organisasi. Organisasi publik pada umumnya tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan pada

penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pendidikan, sekolah berfungsi sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberadaan sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan tanggung jawab sosial dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sebagai organisasi publik, sekolah harus memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan dapat diakses oleh seluruh peserta didik secara adil dan berkualitas.

Salah satu karakteristik utama organisasi publik adalah orientasi pada pelayanan publik. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya peserta didik. Dalam hal ini, sekolah tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, serta pembinaan nilai-nilai sosial yang penting bagi kehidupan bermasyarakat. Menurut Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (2015), organisasi publik pada dasarnya dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas, sehingga orientasi pelayanan publik menjadi prinsip utama dalam pengelolaan organisasi tersebut.

Karakteristik lain dari organisasi publik adalah adanya akuntabilitas kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan layanan publik, sekolah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, serta orang tua peserta didik. Akuntabilitas ini mencerminkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan. Sekolah harus mampu menunjukkan bahwa proses pembelajaran, penggunaan sumber daya, serta berbagai program pendidikan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan masyarakat. Berbagai mekanisme evaluasi biasanya digunakan untuk memastikan akuntabilitas tersebut, seperti akreditasi sekolah, penilaian kinerja guru, serta pelaporan kegiatan pendidikan kepada instansi terkait.

2. Fungsi Sekolah dalam Sistem Pendidikan

Sekolah sebagai organisasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan karena berfungsi sebagai lembaga yang secara langsung menyelenggarakan proses pendidikan bagi masyarakat. Dalam sistem pendidikan nasional, sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat belajar bagi peserta didik, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan berbagai fungsi pendidikan, sosial, dan administratif. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki kemampuan intelektual, keterampilan, dan karakter yang baik.

Fungsi utama sekolah dalam sistem pendidikan adalah fungsi pendidikan. Fungsi ini berkaitan dengan penyelenggaraan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Melalui kegiatan belajar mengajar, sekolah memberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Proses pendidikan di sekolah tidak hanya menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Dengan demikian, sekolah berperan penting dalam membentuk individu yang memiliki kompetensi akademik sekaligus kemampuan sosial yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sekolah juga memiliki fungsi sosial yang tidak kalah penting. Sebagai lembaga sosial, sekolah berperan dalam proses sosialisasi nilai-nilai budaya, norma sosial, serta identitas nasional kepada generasi muda. Melalui berbagai kegiatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar kelas, sekolah membantu peserta didik memahami nilai-nilai moral, etika, serta tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Proses sosialisasi ini sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik, karena sekolah menjadi salah satu lingkungan utama selain keluarga yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Dengan menjalankan fungsi sosial tersebut, sekolah tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga individu yang memiliki karakter dan integritas yang baik.

E. Guru sebagai *Street-Level Bureaucrats*

Pada sistem kebijakan pendidikan, guru memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan aktor yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya berfungsi sebagai tenaga pendidik yang menyampaikan pengetahuan, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan pendidikan di tingkat paling bawah dalam struktur birokrasi pendidikan. Dalam perspektif kebijakan publik, posisi ini menjadikan guru sebagai *Street-Level bureaucrats*, yaitu aktor pelayanan publik yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan.

Konsep *Street-Level bureaucrats* pertama kali diperkenalkan oleh Lipsky (2010) yang menjelaskan bahwa pegawai publik yang bekerja di garis depan pelayanan public seperti guru, polisi, pekerja sosial, dan tenaga Kesehatan memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, guru menjadi aktor utama yang menerjemahkan kebijakan pendidikan menjadi praktik pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh bagaimana guru memahami, menafsirkan, dan melaksanakan kebijakan tersebut dalam praktik sehari-hari.

Kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan yang bertujuan mengatur sistem pendidikan agar dapat mencapai tujuan pembangunan nasional. Namun kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak nyata tanpa adanya implementasi yang efektif di tingkat sekolah dan kelas. Dalam proses implementasi inilah guru berperan penting sebagai pelaksana kebijakan yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

1. Peran Guru dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan pendidikan karena merupakan aktor yang secara langsung berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam kajian kebijakan publik, guru sering dipandang sebagai *Street-Level bureaucrats*, yaitu pelaksana kebijakan yang berada di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Sebagai pelaksana kebijakan di tingkat

lapangan, guru bertanggung jawab untuk menerapkan berbagai kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti kebijakan kurikulum, metode pembelajaran, sistem evaluasi pendidikan, serta berbagai program pendidikan lainnya. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh bagaimana guru memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

Pada praktiknya, implementasi kebijakan pendidikan oleh guru tidak selalu bersifat mekanis atau sekadar mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Guru sering menghadapi berbagai kondisi yang berbeda di setiap kelas, seperti perbedaan kemampuan akademik siswa, latar belakang sosial dan budaya peserta didik, serta ketersediaan fasilitas pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kondisi nyata yang dihadapi di lingkungan sekolah. Proses penyesuaian ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan mengadaptasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Peran interpretatif guru dalam implementasi kebijakan pendidikan juga dijelaskan dalam kajian implementasi kebijakan publik. Michael Hill dan Peter Hupe (2021) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan interpretasi dan adaptasi oleh para pelaksana kebijakan di tingkat lapangan. Para pelaksana kebijakan sering menghadapi situasi yang tidak sepenuhnya diatur dalam kebijakan formal, sehingga harus menggunakan penilaian profesional untuk menentukan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik. Dalam konteks pendidikan, kondisi ini sangat relevan karena proses pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi antara guru dan peserta didik.

2. Diskresi Guru dalam Proses Pembelajaran

Diskresi guru merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan pendidikan di tingkat kelas. Dalam kajian kebijakan publik, pelaksana kebijakan yang berada di garis depan pelayanan publik sering disebut sebagai *Street-Level bureaucrats*. Kelompok ini memiliki ruang diskresi, yaitu kebebasan tertentu untuk

mengambil keputusan dalam situasi yang tidak sepenuhnya diatur secara rinci oleh kebijakan formal. Dalam konteks pendidikan, guru sebagai pelaksana kebijakan di tingkat sekolah memiliki ruang diskresi dalam menjalankan proses pembelajaran. Diskresi ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan pendidikan dengan kondisi nyata yang dihadapi di kelas.

Pada praktik pendidikan, diskresi guru dapat terlihat dalam berbagai aspek kegiatan pembelajaran. Meskipun pemerintah telah menetapkan kurikulum nasional yang mengatur tujuan pembelajaran, materi yang harus diajarkan, serta standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, kurikulum tersebut pada dasarnya hanya memberikan kerangka umum. Guru tetap memiliki kebebasan dalam menentukan metode pengajaran, strategi penyampaian materi, serta pendekatan pedagogis yang paling sesuai dengan karakteristik siswa. Kebebasan ini memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan kreativitas dalam mengelola pembelajaran sehingga proses belajar dapat berlangsung secara lebih efektif dan menarik bagi peserta didik.

Diskresi juga terlihat dalam cara guru melakukan evaluasi pembelajaran. Selain mengikuti standar penilaian yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan, guru dapat memilih berbagai bentuk evaluasi yang dianggap paling sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, guru dapat menggunakan kombinasi antara tes tertulis, tugas proyek, presentasi kelompok, maupun penilaian berbasis portofolio untuk menilai perkembangan belajar siswa. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan peserta didik serta membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan dalam proses belajar.

BAB VI

AKTOR NON-NEGARA DAN HIBRIDISASI KEBIJAKAN

Pada perkembangan tata kelola pendidikan modern, kebijakan pendidikan tidak lagi diproduksi dan dijalankan secara eksklusif oleh negara, melainkan melibatkan berbagai aktor non-negara yang berperan dalam membentuk arah, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Aktor-aktor tersebut meliputi organisasi keagamaan dan sosial, komunitas lokal dan lembaga adat, dunia usaha dan organisasi filantropi, serta media yang berperan dalam membentuk opini publik. Keterlibatan berbagai aktor ini mencerminkan pergeseran paradigma dari model pemerintahan yang bersifat hierarkis menuju model tata kelola kolaboratif yang menekankan interaksi antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik. Dalam proses tersebut, berbagai sistem nilai baik nilai negara, nilai sosial-budaya, nilai pasar, maupun nilai profesional berinteraksi dan membentuk apa yang disebut sebagai hibridisasi kebijakan. Hibridisasi ini menghasilkan bentuk tata kelola pendidikan yang lebih kompleks dan adaptif, di mana kebijakan pendidikan merupakan hasil negosiasi antara berbagai kepentingan dan nilai yang berkembang dalam masyarakat

A. Organisasi Keagamaan dan Sosial

Organisasi keagamaan dan organisasi sosial merupakan aktor non-negara yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan di berbagai negara. Dalam banyak konteks, termasuk di Indonesia, keberadaan lembaga pendidikan yang dikelola oleh organisasi keagamaan telah muncul jauh sebelum negara membangun sistem pendidikan nasional yang terstruktur. Oleh karena itu, organisasi keagamaan dan sosial tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap sistem pendidikan negara, tetapi juga sebagai bagian integral

dari ekosistem kebijakan pendidikan yang lebih luas. Dalam perspektif administrasi publik modern, keterlibatan organisasi non-negara dalam penyediaan layanan pendidikan mencerminkan pergeseran dari model pemerintahan yang bersifat hierarkis menuju model tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam proses penyelenggaraan layanan publik.

Pada kerangka kebijakan publik, organisasi keagamaan dan sosial sering dipahami sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial, termasuk dalam sektor pendidikan. Menurut Edwards (2020), organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas kebijakan publik karena mampu menjembatani hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, organisasi keagamaan dan sosial tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai agen advokasi, penggerak partisipasi masyarakat, serta penjaga nilai-nilai moral dan budaya dalam sistem pendidikan.

1. Peran Historis Organisasi Keagamaan dalam Pendidikan

Organisasi keagamaan memiliki peran historis yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan di berbagai belahan dunia. Sejak masa awal perkembangan masyarakat, institusi keagamaan sering menjadi pelopor dalam penyelenggaraan pendidikan karena memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia, serta pengaruh sosial yang kuat di tengah masyarakat. Banyak lembaga pendidikan pertama yang muncul dalam sejarah didirikan oleh institusi keagamaan dengan tujuan tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga meningkatkan kemampuan literasi dan pengetahuan masyarakat. Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan biasanya menggabungkan pengajaran nilai-nilai moral, spiritual, serta berbagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, organisasi keagamaan tidak hanya berperan dalam pengembangan keagamaan masyarakat, tetapi juga dalam pembangunan intelektual dan sosial.

Pada konteks Indonesia, kontribusi organisasi keagamaan terhadap perkembangan pendidikan dapat dilihat melalui keberadaan berbagai lembaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren,

madrasah, dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi keagamaan. Lembaga-lembaga ini telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional dan berperan dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat luas. Salah satu bentuk lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki sejarah panjang di Indonesia adalah pesantren. Pesantren telah berkembang sejak sebelum masa kolonial dan menjadi pusat pendidikan Islam tradisional yang berperan dalam mendidik masyarakat. Selain mengajarkan ilmu-ilmu agama, pesantren juga berfungsi sebagai tempat pembentukan karakter, pengembangan kepemimpinan, serta penguatan identitas sosial dan budaya masyarakat.

Seiring dengan perkembangan sistem pendidikan nasional, banyak pesantren dan madrasah mengalami transformasi kelembagaan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut mulai mengintegrasikan kurikulum pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan sehingga dapat menjadi bagian dari sistem pendidikan formal yang diakui oleh negara. Transformasi ini menunjukkan kemampuan organisasi keagamaan untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan pendidikan serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan integrasi tersebut, lembaga pendidikan berbasis agama tidak hanya mempertahankan fungsi tradisionalnya sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga berperan dalam menyediakan pendidikan yang lebih komprehensif bagi peserta didik.

2. Organisasi Sosial sebagai Aktor Pendidikan

Berbagai organisasi sosial juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Organisasi sosial yang dimaksud dapat berupa lembaga swadaya masyarakat, yayasan pendidikan, organisasi profesi, serta berbagai kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pendidikan. Kehadiran organisasi-organisasi ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Melalui berbagai inisiatif dan program yang dijalankan, organisasi sosial dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas serta akses pendidikan bagi masyarakat.

Organisasi sosial sering terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat sistem pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk kontribusi yang umum dilakukan adalah penyelenggaraan program peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik. Program pelatihan guru, misalnya, sering diselenggarakan oleh organisasi sosial untuk membantu guru mengembangkan kompetensi pedagogis, meningkatkan keterampilan mengajar, serta memahami berbagai metode pembelajaran yang inovatif. Selain itu, organisasi sosial juga sering menginisiasi program literasi yang bertujuan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat, terutama bagi kelompok yang memiliki akses terbatas terhadap layanan pendidikan formal.

Organisasi sosial juga berperan dalam menyediakan dukungan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Banyak organisasi sosial yang memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa, penyediaan bahan ajar, maupun dukungan fasilitas belajar bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program-program tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dalam banyak kasus, kehadiran organisasi sosial dapat membantu menutupi berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh sistem pendidikan formal, terutama dalam hal pendanaan dan penyediaan layanan pendidikan bagi masyarakat marginal.

B. Komunitas Lokal dan Lembaga Adat

Komunitas lokal dan lembaga adat merupakan bagian penting dari aktor non-negara yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, terutama dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial dan budaya yang kuat. Dalam banyak konteks, pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan formal yang dirumuskan oleh negara, tetapi juga oleh norma, nilai, dan praktik sosial yang berkembang dalam komunitas lokal. Oleh karena itu, keterlibatan komunitas lokal dan lembaga adat dalam tata kelola

pendidikan menjadi aspek penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada perspektif administrasi publik modern, keterlibatan komunitas dalam penyelenggaraan layanan publik merupakan bagian dari pendekatan *participatory governance*, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Pendekatan ini berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa kebijakan publik yang efektif tidak dapat hanya dirumuskan secara *top-down* oleh pemerintah, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sebagai aktor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai kondisi sosial di tingkat lokal.

Menurut Fung (2015), partisipasi masyarakat dalam tata kelola publik dapat meningkatkan legitimasi kebijakan serta memperkuat akuntabilitas pemerintah karena masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pendidikan, partisipasi komunitas lokal dapat membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

1. Komunitas Lokal dalam Sistem Pendidikan

Komunitas lokal merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan karena memiliki kedekatan geografis, sosial, dan budaya dengan lembaga pendidikan yang berada di wilayahnya. Kedekatan ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan yang berlangsung di sekolah. Dalam banyak konteks, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan proses pembelajaran, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat sekitar. Sekolah sering menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas sosial, seperti pertemuan masyarakat, kegiatan budaya, serta berbagai program pemberdayaan yang melibatkan orang tua dan warga sekitar. Dengan demikian, hubungan antara sekolah dan komunitas lokal bersifat saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Partisipasi komunitas lokal dalam pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang paling umum adalah

keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah. Orang tua dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti pertemuan wali murid, kegiatan ekstrakurikuler, maupun program pengembangan sekolah. Selain itu, masyarakat juga sering memberikan dukungan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan, baik melalui kontribusi tenaga, dana, maupun penyediaan sumber daya lain yang dibutuhkan oleh sekolah. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan di sekolah melalui lembaga seperti komite sekolah yang berfungsi sebagai wadah komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat. Melalui keterlibatan tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan terkait berbagai kebijakan atau program pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah.

Keterlibatan komunitas lokal dalam pendidikan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap lembaga pendidikan yang ada di wilayahnya. Ketika masyarakat merasa bahwa sekolah merupakan bagian dari komunitasnya, cenderung lebih peduli terhadap perkembangan pendidikan serta lebih aktif dalam mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Mark Bray (2018), partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah. Ketika masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan di wilayahnya, akan lebih terdorong untuk memberikan dukungan, baik dalam bentuk kontribusi material maupun partisipasi dalam pengawasan terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh sekolah.

2. Peran Lembaga Adat dalam Pendidikan

Lembaga adat merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam banyak masyarakat tradisional, lembaga adat memiliki otoritas moral dan sosial yang kuat karena dianggap sebagai penjaga norma, aturan, serta identitas budaya komunitas. Peran ini tidak hanya berkaitan dengan pengaturan kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga mencakup aspek pendidikan. Dalam konteks pendidikan, lembaga adat berkontribusi dalam proses

pembentukan nilai, pengetahuan, dan identitas budaya generasi muda melalui berbagai bentuk kegiatan sosial dan budaya yang berlangsung dalam masyarakat.

Salah satu peran utama lembaga adat dalam pendidikan adalah menyampaikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Nilai-nilai tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan seperti norma sosial, etika dalam berinteraksi dengan sesama, serta penghormatan terhadap tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Proses penyampaian nilai ini sering dilakukan melalui kegiatan adat, upacara tradisional, maupun berbagai praktik sosial yang melibatkan partisipasi anggota masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja. Melalui proses tersebut, generasi muda dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai budaya yang menjadi bagian dari identitas komunitasnya.

Lembaga adat juga memiliki kontribusi penting dalam pelestarian bahasa daerah serta pengembangan pengetahuan tradisional. Banyak masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan lokal yang berkembang dari pengalaman panjang dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosial. Pengetahuan ini sering mencakup berbagai bidang kehidupan seperti pengelolaan sumber daya alam, sistem pertanian tradisional, pengobatan herbal, serta berbagai praktik sosial yang mencerminkan kearifan lokal. Pengetahuan tersebut biasanya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi melalui cerita rakyat, praktik kehidupan sehari-hari, maupun melalui bimbingan langsung dari tokoh adat kepada anggota masyarakat yang lebih muda.

C. Dunia Usaha, Filantropi, dan Pasar Pendidikan

Perkembangan tata kelola pendidikan modern menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak lagi sepenuhnya berada dalam domain negara, melainkan semakin melibatkan berbagai aktor non-negara, termasuk dunia usaha dan organisasi filantropi. Keterlibatan sektor swasta dalam pendidikan mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan publik yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pasar dalam menyediakan layanan publik yang lebih efektif. Dalam konteks ini, dunia usaha dan organisasi filantropi menjadi aktor penting yang dapat memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan melalui dukungan sumber daya, inovasi, serta penguatan hubungan antara sistem pendidikan dan kebutuhan ekonomi.

Pada literatur administrasi publik dan kebijakan pendidikan, keterlibatan sektor swasta sering dikaitkan dengan munculnya paradigma *New Public Management* (NPM) yang mendorong penggunaan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam pengelolaan layanan publik. Paradigma ini menekankan efisiensi, akuntabilitas, serta orientasi pada hasil dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk pendidikan. Menurut Hood (1991), *New Public Management* mendorong pemerintah untuk membuka ruang bagi sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan layanan publik guna meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan.

Pada sektor pendidikan, keterlibatan dunia usaha dan organisasi filantropi dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari dukungan finansial hingga partisipasi dalam pengembangan kurikulum dan program pendidikan. Keterlibatan ini mencerminkan perubahan dalam tata kelola pendidikan yang semakin bersifat kolaboratif dan multi-aktor.

1. Dunia Usaha dalam Sistem Pendidikan

Dunia usaha memiliki peran yang semakin penting dalam sistem pendidikan modern karena kualitas pendidikan sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Sistem pendidikan pada dasarnya berfungsi untuk mempersiapkan individu agar memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang diperlukan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, sektor bisnis memiliki kepentingan yang kuat terhadap kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh suatu negara. Tenaga kerja yang terdidik dan memiliki keterampilan yang relevan akan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi serta daya saing industri di tingkat nasional maupun global. Dalam konteks ini, banyak perusahaan yang mulai terlibat secara aktif dalam berbagai program pendidikan sebagai bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Keterlibatan dunia usaha dalam pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme. Salah satu bentuk yang paling umum

adalah melalui program *corporate social responsibility* (CSR), yaitu program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, program CSR sering diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, pembangunan fasilitas pendidikan, serta penyediaan sarana pembelajaran seperti buku, laboratorium, dan perangkat teknologi. Selain itu, banyak perusahaan yang juga menyelenggarakan program pelatihan kerja atau pengembangan keterampilan yang dapat membantu meningkatkan kesiapan tenaga kerja muda dalam memasuki dunia kerja.

Kerja sama antara dunia usaha dan institusi pendidikan juga sering dilakukan dalam pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Dalam banyak kasus, institusi pendidikan bekerja sama dengan perusahaan untuk merancang kurikulum yang menekankan pada penguasaan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Menurut OECD (2020), kerja sama antara lembaga pendidikan dan sektor industri dapat membantu meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui kolaborasi ini, berbagai program seperti magang industri, pelatihan vokasional, serta pendidikan berbasis praktik dapat dikembangkan untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta didik. Program-program tersebut memungkinkan siswa atau mahasiswa memahami dinamika dunia kerja sekaligus mengembangkan keterampilan profesional sebelum memasuki pasar kerja secara penuh.

2. Peran Organisasi Filantropi dalam Pendidikan

Organisasi filantropi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pengembangan pendidikan, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Filantropi pendidikan biasanya dilakukan oleh yayasan, lembaga sosial, maupun individu yang memiliki kepedulian terhadap isu pendidikan dan berkomitmen untuk membantu memperluas kesempatan belajar bagi berbagai kelompok masyarakat. Keterlibatan organisasi filantropi dalam pendidikan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang dapat didukung oleh berbagai aktor dalam masyarakat.

Melalui berbagai program yang dijalankan, organisasi filantropi berkontribusi dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan, terutama yang berkaitan dengan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan.

Salah satu bentuk kontribusi utama organisasi filantropi adalah melalui penyediaan bantuan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Banyak organisasi filantropi yang menyediakan program beasiswa bagi siswa atau mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Program beasiswa ini memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya tanpa terbebani oleh biaya pendidikan yang tinggi. Selain itu, organisasi filantropi juga sering terlibat dalam pembangunan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun pusat pembelajaran komunitas. Dukungan ini sangat penting terutama bagi wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur pendidikan sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan belajar bagi peserta didik.

Organisasi filantropi juga sering mendukung berbagai program peningkatan kualitas pendidikan. Program-program tersebut dapat berupa pelatihan guru, pengembangan kurikulum inovatif, serta berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Banyak organisasi filantropi juga menjalankan program pendidikan komunitas yang bertujuan memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat di luar sistem pendidikan formal. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan kerja, literasi digital, maupun pendidikan kewirausahaan.

D. Media dan Produksi Opini Publik

Media merupakan salah satu aktor non-negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses kebijakan pendidikan, khususnya dalam membentuk, menyebarkan, dan memobilisasi opini publik terhadap isu-isu pendidikan. Dalam perspektif kebijakan publik modern, media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai arena diskursif yang membentuk cara masyarakat memahami, menilai, dan merespons kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, dalam konteks tata kelola pendidikan kontemporer, media dapat dipahami sebagai aktor strategis yang berperan dalam proses agenda setting, framing kebijakan, hingga legitimasi kebijakan pendidikan.

1. Media sebagai Arena Komunikasi Kebijakan

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam proses komunikasi kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam kerangka administrasi publik, komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi mengenai tujuan, isi, serta implementasi suatu kebijakan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Media massa baik media cetak, televisi, radio, maupun media digital menjadi saluran utama yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dalam menyebarkan informasi kebijakan pendidikan. Melalui media, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti perubahan kurikulum, program peningkatan kualitas pendidikan, kebijakan kesejahteraan guru, maupun berbagai program pendidikan lainnya. Oleh karena itu, media sering dipandang sebagai arena komunikasi kebijakan yang memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman publik terhadap kebijakan pendidikan.

Proses komunikasi kebijakan melalui media tidak selalu bersifat netral atau sepenuhnya objektif. Media memiliki peran dalam melakukan seleksi informasi, interpretasi, serta framing terhadap isu yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pihak yang dapat mempengaruhi bagaimana suatu isu dipahami oleh publik. Perspektif ini dijelaskan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972) melalui teori agenda-setting, yang menyatakan bahwa media

memiliki kemampuan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks kebijakan pendidikan, media dapat mempengaruhi perhatian publik terhadap isu-isu tertentu seperti perubahan kurikulum, kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, atau kesenjangan akses pendidikan.

Sebagai contoh, ketika media secara intensif memberitakan perubahan kurikulum nasional, isu tersebut akan menjadi topik yang banyak dibicarakan oleh masyarakat, akademisi, maupun praktisi pendidikan. Liputan media yang luas dapat mendorong munculnya diskusi publik mengenai manfaat, tantangan, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap sistem pendidikan. Dalam situasi ini, media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang diskusi publik yang memungkinkan masyarakat untuk memahami serta menilai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, media berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pendidikan serta mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat.

2. Media Digital dan Transformasi Partisipasi Publik

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara media berperan dalam kebijakan pendidikan. Jika pada masa lalu media massa seperti surat kabar, televisi, dan radio lebih berfungsi sebagai saluran penyampai informasi dari pemerintah kepada masyarakat, maka pada Era digital media juga menjadi ruang partisipasi publik yang lebih terbuka. Kehadiran internet dan berbagai platform media sosial telah memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memberikan tanggapan secara langsung terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Perubahan ini menandai transformasi penting dalam komunikasi kebijakan publik, di mana masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam proses diskusi dan evaluasi kebijakan.

Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube telah menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun dukungan terhadap kebijakan pendidikan. Melalui platform tersebut, guru, siswa, orang tua, akademisi, serta

berbagai kelompok masyarakat dapat mengekspresikan pandangannya mengenai berbagai isu pendidikan seperti perubahan kurikulum, kebijakan ujian nasional, kesejahteraan tenaga pendidik, maupun akses pendidikan. Diskusi yang terjadi di ruang digital sering kali berkembang secara cepat dan dapat menjangkau audiens yang luas, sehingga isu-isu pendidikan dapat menjadi topik perbincangan publik dalam waktu yang relatif singkat.

Transformasi media digital ini juga menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah kini dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi kebijakan secara cepat, transparan, dan langsung kepada masyarakat tanpa harus melalui proses komunikasi yang panjang seperti pada media konvensional. Selain itu, masyarakat juga dapat merespons kebijakan tersebut secara langsung melalui komentar, diskusi daring, maupun berbagai bentuk partisipasi digital lainnya. Interaksi ini memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih dinamis antara pembuat kebijakan dan masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

E. Hibridisasi Nilai dalam Tata Kelola Pendidikan

Pada perkembangan tata kelola pendidikan modern, kebijakan pendidikan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh satu sistem nilai tunggal yang berasal dari negara. Sebaliknya, kebijakan pendidikan semakin dipengaruhi oleh berbagai sistem nilai yang berasal dari beragam aktor sosial, seperti pemerintah, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, komunitas lokal, sektor swasta, serta lembaga internasional. Proses pertemuan, interaksi, dan integrasi berbagai nilai tersebut melahirkan fenomena yang disebut sebagai hibridisasi nilai dalam tata kelola pendidikan.

Hibridisasi nilai merujuk pada proses penggabungan berbagai sistem nilai yang berbeda dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai demokrasi, efisiensi administratif, nilai budaya lokal, nilai religius, nilai pasar, serta nilai profesionalisme pendidikan. Proses ini menghasilkan bentuk tata kelola pendidikan yang tidak lagi bersifat

homogen, tetapi lebih kompleks, plural, dan adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

1. Konsep Hibridisasi Nilai dalam Administrasi Publik

Konsep hibridisasi nilai dalam administrasi publik muncul sebagai bagian dari perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Pada masa administrasi publik klasik, negara dipandang sebagai aktor utama yang memiliki otoritas dominan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Dalam model ini, proses pengambilan keputusan berlangsung secara hierarkis melalui struktur birokrasi yang terpusat. Namun, perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks mendorong munculnya paradigma baru dalam administrasi publik, di mana berbagai aktor di luar pemerintah mulai terlibat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Perubahan ini menyebabkan kebijakan publik tidak lagi semata-mata ditentukan oleh negara, tetapi merupakan hasil interaksi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan, nilai, dan sumber daya yang berbeda.

Perkembangan tersebut dijelaskan oleh R. A. W. Rhodes (1997) melalui konsep *Governance Network*. Dalam pendekatan ini, kebijakan publik dipahami sebagai hasil dari jaringan hubungan antara berbagai aktor, seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga pendidikan, serta komunitas lokal. Aktor-aktor tersebut terlibat dalam proses kebijakan melalui interaksi yang bersifat kolaboratif maupun negosiatif. Karena setiap aktor membawa kepentingan serta sistem nilai yang berbeda, kebijakan publik yang dihasilkan sering kali merupakan hasil kompromi atau integrasi dari berbagai nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tidak lagi diproduksi secara hierarkis oleh negara, tetapi melalui proses interaksi dalam jaringan tata kelola yang lebih luas.

Pandangan ini kemudian diperkuat dalam paradigma *New Public Governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam penyelenggaraan layanan publik. Stephen P. Osborne (2010) menjelaskan bahwa sektor publik saat ini dipengaruhi oleh berbagai logika nilai yang berbeda. Logika birokrasi, misalnya, menekankan prinsip legalitas, prosedur administratif, dan akuntabilitas formal dalam

pengelolaan kebijakan publik. Di sisi lain, logika profesional menekankan pentingnya keahlian dan standar profesional dalam pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat pula logika komunitas yang berfokus pada nilai-nilai partisipasi sosial dan solidaritas masyarakat, serta logika pasar yang menekankan efisiensi, kompetisi, dan orientasi pada hasil. Interaksi antara berbagai logika nilai ini menciptakan bentuk tata kelola yang bersifat hibrid, di mana kebijakan publik merupakan hasil perpaduan dari berbagai prinsip dan kepentingan yang berbeda.

2. Interaksi Nilai Negara dan Nilai Masyarakat

Pada proses perumusan kebijakan pendidikan, salah satu bentuk penting dari hibridisasi nilai dapat dilihat melalui interaksi antara nilai yang dibawa oleh negara dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Negara sebagai institusi formal memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang terstruktur, terstandar, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, pemerintah biasanya membawa nilai-nilai tertentu dalam kebijakan pendidikan, seperti standar nasional pendidikan, efisiensi administrasi, akuntabilitas publik, serta prinsip pemerataan akses pendidikan. Nilai-nilai tersebut penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan dapat berjalan secara konsisten dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Masyarakat juga memiliki sistem nilai yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi arah kebijakan pendidikan. Nilai-nilai masyarakat sering berkaitan dengan budaya lokal, tradisi, agama, identitas komunitas, serta berbagai aspirasi sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak komunitas, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses akademik semata, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya, memperkuat identitas sosial, serta membentuk karakter generasi muda sesuai dengan norma yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sering memiliki harapan agar kebijakan pendidikan tidak mengabaikan nilai-nilai lokal yang menjadi bagian dari kehidupannya.

Pada praktiknya, kebijakan pendidikan sering kali harus menyeimbangkan kedua sumber nilai tersebut. Negara mungkin menetapkan kebijakan pendidikan yang bersifat nasional, seperti

kurikulum nasional atau standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Namun dalam proses implementasinya, sekolah dan masyarakat sering diberikan ruang untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan konteks sosial dan budaya lokal. Sebagai contoh, kurikulum nasional dapat diintegrasikan dengan muatan lokal yang mencerminkan budaya daerah, bahasa daerah, maupun nilai-nilai sosial yang berkembang dalam komunitas setempat. Proses penyesuaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak selalu diterapkan secara kaku, tetapi dapat mengalami adaptasi sesuai dengan kondisi masyarakat yang beragam.

BAB VII

JEJARING KEBIJAKAN DAN DISTRIBUSI KEKUASAAN

Pada perkembangan tata kelola publik kontemporer, proses kebijakan tidak lagi dipahami sebagai mekanisme yang sepenuhnya dikendalikan oleh negara melalui struktur birokrasi yang *hierarkis*, tetapi sebagai hasil interaksi berbagai aktor yang terhubung dalam jejaring kebijakan (*Policy Network*). Jejaring kebijakan menggambarkan hubungan antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, serta institusi pendidikan yang saling berinteraksi dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks ini, distribusi kekuasaan tidak hanya berada pada lembaga negara, tetapi juga tersebar di antara berbagai aktor yang memiliki sumber daya, pengetahuan, dan legitimasi yang berbeda. Melalui jejaring kebijakan, proses kebijakan pendidikan menjadi lebih dinamis karena melibatkan kolaborasi, negosiasi, serta pertukaran kepentingan antaraktor yang membentuk arah dan hasil kebijakan publik. Dengan demikian, pemahaman mengenai jejaring kebijakan dan distribusi kekuasaan menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pendidikan diproduksi, dijalankan, serta mempengaruhi kinerja sistem pendidikan dalam konteks tata kelola yang semakin kompleks dan kolaboratif.

A. *Policy Network* dan *Governance Network*

Perkembangan kebijakan publik kontemporer menunjukkan bahwa proses perumusan dan implementasi kebijakan tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh negara melalui struktur birokrasi yang *hierarkis*. Sebaliknya, kebijakan publik semakin dihasilkan melalui interaksi kompleks antara berbagai aktor yang saling terhubung dalam suatu jaringan. Dalam konteks ini, konsep *Policy Network* dan *Governance Network* menjadi kerangka analitis penting untuk

memahami bagaimana kebijakan pendidikan dirumuskan, dinegosiasikan, dan diimplementasikan oleh berbagai aktor yang memiliki kepentingan, sumber daya, dan kapasitas yang berbeda.

Konsep jaringan kebijakan muncul sebagai respon terhadap keterbatasan model administrasi publik tradisional yang menempatkan negara sebagai aktor tunggal dalam proses kebijakan. Dalam praktiknya, banyak kebijakan public termasuk kebijakan Pendidikan dipengaruhi oleh berbagai organisasi di luar pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan lembaga internasional. Oleh karena itu, pendekatan jaringan menawarkan perspektif yang lebih realistis untuk memahami dinamika kebijakan publik dalam masyarakat modern.

1. Konsep *Policy Network*

Konsep *Policy Network* berkembang dalam kajian ilmu politik dan administrasi publik untuk menjelaskan bagaimana kebijakan publik tidak hanya dihasilkan oleh pemerintah secara tunggal, tetapi melalui interaksi antara berbagai organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu isu kebijakan. Dalam pendekatan ini, proses kebijakan dipandang sebagai hasil hubungan yang kompleks antara aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah yang saling berinteraksi dalam suatu jaringan kebijakan. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap perubahan dalam tata kelola pemerintahan modern, di mana pemerintah tidak lagi memiliki kendali penuh terhadap seluruh proses kebijakan karena semakin banyak aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik.

Konsep *Policy Network* dijelaskan oleh R. A. W. Rhodes (1997) sebagai sekumpulan hubungan formal dan informal antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dalam suatu sektor tertentu. Hubungan tersebut terbentuk karena adanya ketergantungan sumber daya di antara aktor-aktor yang terlibat. Setiap organisasi yang berada dalam jaringan kebijakan biasanya memiliki sumber daya tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi lain. Sumber daya tersebut dapat berupa informasi, legitimasi politik, dukungan organisasi, keahlian teknis, maupun sumber daya finansial. Karena tidak ada satu aktor yang memiliki seluruh sumber daya tersebut secara mandiri, maka aktor-aktor

dalam jaringan kebijakan perlu saling bekerja sama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

Pada perspektif *Policy Network*, kebijakan publik tidak lagi dipandang sebagai hasil keputusan *hierarkis* dari pemerintah semata, melainkan sebagai hasil proses pertukaran sumber daya dan negosiasi antara berbagai aktor yang terlibat. Proses ini sering kali melibatkan diskusi, kompromi, serta koordinasi antara berbagai organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu isu kebijakan. Interaksi tersebut dapat berlangsung secara formal melalui forum kebijakan resmi maupun secara informal melalui hubungan kerja sama antarorganisasi. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai produk dari dinamika hubungan sosial dan politik yang terjadi dalam jaringan aktor yang terlibat dalam suatu sektor kebijakan.

2. Karakteristik *Policy Network*

Policy Network memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari model pemerintahan tradisional yang bersifat *hierarkis* dan terpusat. Dalam model birokrasi klasik, proses kebijakan biasanya dikendalikan secara langsung oleh pemerintah melalui struktur organisasi yang jelas dan hubungan komando yang kuat. Sebaliknya, dalam pendekatan *Policy Network*, proses kebijakan melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi dalam suatu jaringan yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Karakteristik utama dari jaringan kebijakan ini mencerminkan perubahan dalam cara kebijakan publik dikelola dalam sistem tata kelola modern.

Karakteristik pertama adalah adanya interdependensi atau ketergantungan antaraktor dalam jaringan kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan biasanya memiliki sumber daya yang berbeda dan saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan kebijakan. Pemerintah, misalnya, memiliki otoritas politik dan legitimasi formal untuk menetapkan kebijakan publik. Namun, pemerintah sering memerlukan dukungan dari aktor lain yang memiliki sumber daya berbeda, seperti pengetahuan teknis, akses terhadap masyarakat, atau kapasitas implementasi. Lembaga pendidikan memiliki pengetahuan profesional mengenai proses pembelajaran, organisasi masyarakat sipil memiliki hubungan langsung dengan komunitas, sementara lembaga

penelitian dapat menyediakan data dan analisis yang mendukung perumusan kebijakan. Ketergantungan ini mendorong terbentuknya hubungan kerja sama dalam jaringan kebijakan.

Karakteristik kedua adalah adanya pertukaran sumber daya antara aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan. Interaksi dalam *Policy Network* sering kali melibatkan proses pertukaran berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Sumber daya tersebut dapat berupa informasi, dukungan politik, keahlian teknis, jaringan organisasi, maupun sumber daya finansial. Melalui pertukaran sumber daya ini, setiap aktor dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam kebijakan publik. Proses pertukaran ini juga menjadi mekanisme penting dalam membangun koordinasi dan kerja sama antarorganisasi dalam jaringan kebijakan.

Karakteristik ketiga adalah adanya hubungan yang relatif stabil antara aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan. Menurut David Marsh dan R. A. W. Rhodes (1992), *Policy Network* biasanya terbentuk melalui interaksi yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan melibatkan aktor-aktor yang relatif sama. Hubungan yang berulang ini memungkinkan terbentuknya kepercayaan, norma kerja sama, serta pola komunikasi yang lebih efektif di antara anggota jaringan. Stabilitas hubungan tersebut juga memudahkan koordinasi dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan.

Karakteristik keempat adalah ketiadaan kontrol hierarkis yang kuat dalam jaringan kebijakan. Berbeda dengan sistem birokrasi tradisional yang memiliki struktur komando yang jelas, *Policy Network* tidak memiliki satu aktor yang sepenuhnya mengontrol seluruh proses pengambilan keputusan. Dalam jaringan kebijakan, keputusan sering kali merupakan hasil dari proses negosiasi, diskusi, serta kompromi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya proses kebijakan yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap berbagai perspektif yang ada dalam masyarakat.

B. Relasi Kekuasaan dalam Jejaring Kebijakan

Relasi kekuasaan merupakan salah satu elemen paling penting dalam memahami dinamika jejaring kebijakan (*Policy Network*). Dalam perspektif administrasi publik dan tata kelola kolaboratif, jejaring kebijakan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme koordinasi antaraktor, tetapi juga sebagai arena politik di mana berbagai aktor dengan kepentingan, sumber daya, dan kapasitas yang berbeda saling berinteraksi untuk mempengaruhi arah kebijakan publik. Dengan kata lain, jejaring kebijakan merupakan ruang distribusi kekuasaan yang tidak lagi terpusat sepenuhnya pada negara, melainkan tersebar di antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan.

Pada literatur kebijakan publik kontemporer, kekuasaan dalam jejaring kebijakan sering dipahami sebagai kemampuan aktor untuk mempengaruhi keputusan, proses, maupun hasil kebijakan melalui penguasaan sumber daya tertentu seperti informasi, legitimasi, akses politik, atau kapasitas organisasi. Menurut Rhodes (2017), jejaring kebijakan adalah struktur hubungan yang relatif stabil antara aktor-aktor yang saling bergantung satu sama lain, di mana kekuasaan muncul dari pertukaran sumber daya di antara para aktor tersebut. Dalam konteks ini, tidak ada satu aktor pun yang sepenuhnya dominan, karena setiap aktor membutuhkan sumber daya dari aktor lain untuk mencapai tujuan kebijakan.

1. Kekuasaan sebagai Distribusi Sumber Daya

Pada kajian jejaring kebijakan (*Policy Network* dan *Governance Network*), konsep kekuasaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai otoritas formal yang dimiliki oleh negara atau lembaga pemerintah. Dalam pendekatan ini, kekuasaan lebih dilihat sebagai kemampuan aktor untuk mengakses, mengendalikan, serta memobilisasi berbagai sumber daya strategis yang dibutuhkan dalam proses kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berbentuk informasi, keahlian teknis, legitimasi sosial, dukungan politik, jaringan organisasi, maupun akses terhadap pendanaan. Dengan demikian, kekuasaan dalam jejaring kebijakan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, tetapi juga dapat dimiliki oleh berbagai aktor lain yang terlibat dalam proses kebijakan publik.

Pendekatan ini menekankan bahwa kekuasaan bersifat relasional, yaitu muncul dari hubungan ketergantungan antara aktor-aktor yang berada dalam suatu jaringan kebijakan. Erik-Hans Klijn dan Joop F. M. Koppenjan (2016) menjelaskan bahwa dalam *Governance Network*, aktor-aktor yang terlibat saling bergantung karena masing-masing memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh aktor lain. Dalam situasi seperti ini, kekuasaan tidak berada pada satu aktor secara mutlak, tetapi terbentuk melalui hubungan saling ketergantungan tersebut. Aktor yang memiliki sumber daya penting akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan, karena aktor lain membutuhkan kontribusinya untuk mencapai tujuan kebijakan.

Sebagai contoh dalam kebijakan pendidikan, pemerintah biasanya memiliki kewenangan regulatif untuk menetapkan standar pendidikan, kurikulum nasional, serta berbagai aturan administratif yang mengatur sistem pendidikan. Namun, pemerintah sering kali membutuhkan dukungan dari aktor lain agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Organisasi masyarakat sipil, misalnya, dapat memiliki legitimasi sosial yang kuat di tingkat komunitas dan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan. Dalam kondisi ini, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada otoritas pemerintah, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk bekerja sama dengan aktor lain yang memiliki sumber daya berbeda.

2. Struktur Jejaring dan Distribusi Kekuasaan

Distribusi kekuasaan dalam jejaring kebijakan tidak hanya ditentukan oleh jenis sumber daya yang dimiliki oleh aktor, tetapi juga oleh struktur jejaring yang menghubungkan para aktor tersebut. Struktur jejaring merujuk pada pola hubungan yang terbentuk antara berbagai organisasi atau individu yang terlibat dalam proses kebijakan. Dalam analisis jejaring kebijakan, struktur ini mencakup beberapa aspek penting seperti tingkat keterhubungan antaraktor (*connectivity*), intensitas interaksi, serta posisi strategis yang ditempati oleh masing-masing aktor dalam jaringan. Posisi aktor dalam jaringan sering kali menentukan seberapa besar pengaruh yang dapat diberikan terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan.

Salah satu posisi penting dalam jejaring kebijakan adalah aktor pusat (*central actors*). Aktor yang berada di pusat jaringan biasanya memiliki banyak hubungan dengan aktor lain dan sering menjadi titik utama dalam aliran informasi, koordinasi, serta komunikasi kebijakan. Karena memiliki banyak koneksi, aktor pusat sering kali memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah diskusi maupun keputusan kebijakan. Dalam konteks kebijakan pendidikan, kementerian pendidikan atau dinas pendidikan daerah sering menempati posisi ini karena memiliki kewenangan administratif serta jaringan hubungan yang luas dengan berbagai institusi pendidikan, pemerintah daerah, serta organisasi pendidikan lainnya. Posisi strategis ini memungkinkan berperan penting dalam mengoordinasikan berbagai program pendidikan dan memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

terdapat pula aktor yang berperan sebagai broker atau mediator dalam jejaring kebijakan. Aktor jenis ini memiliki peran penting sebagai penghubung antara kelompok aktor yang berbeda dalam jaringan. Sering menjembatani komunikasi antara organisasi yang mungkin tidak memiliki hubungan langsung satu sama lain. Posisi sebagai mediator memberikan kekuasaan tertentu karena aktor tersebut dapat mempengaruhi arus informasi, mempertemukan berbagai kepentingan, serta memfasilitasi proses negosiasi dalam jaringan kebijakan. Dalam sektor pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi guru, atau lembaga penelitian sering berperan sebagai mediator yang menghubungkan pemerintah dengan komunitas pendidikan atau masyarakat luas. Dengan peran ini, dapat membantu memperkuat komunikasi serta meningkatkan kolaborasi antara berbagai aktor yang terlibat dalam sistem pendidikan.

C. Kolaborasi, Konflik, dan Negosiasi

Pada kerangka jejaring kebijakan (*Policy Network*), interaksi antaraktor tidak selalu berjalan secara harmonis. Jejaring kebijakan merupakan ruang interaksi yang mempertemukan berbagai kepentingan, nilai, dan sumber daya yang berbeda. Oleh karena itu, proses kebijakan publik dalam jejaring sering ditandai oleh tiga dinamika utama, yaitu

kolaborasi, konflik, dan negosiasi. Ketiga dinamika tersebut merupakan bagian integral dari tata kelola kebijakan modern yang melibatkan banyak aktor dari sektor negara, masyarakat sipil, maupun sektor swasta.

Pada literatur administrasi publik kontemporer, tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*) menekankan bahwa penyelesaian masalah publik yang kompleks membutuhkan kerja sama antara berbagai aktor yang memiliki kapasitas dan sumber daya berbeda. Namun, karena setiap aktor membawa kepentingan dan perspektif yang berbeda, interaksi dalam jejaring kebijakan tidak dapat dilepaskan dari potensi konflik dan proses negosiasi yang terus berlangsung. Dengan demikian, kolaborasi, konflik, dan negosiasi merupakan tiga dimensi yang saling terkait dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

1. Kolaborasi dalam Jejaring Kebijakan

Kolaborasi merupakan salah satu elemen penting dalam jejaring kebijakan karena memungkinkan berbagai aktor bekerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan publik secara lebih efektif. Dalam konteks kebijakan publik modern, permasalahan yang dihadapi masyarakat sering kali bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Pemerintah mungkin memiliki kewenangan regulatif dan legitimasi politik, tetapi sering kali memerlukan dukungan dari aktor lain yang memiliki sumber daya tambahan seperti keahlian teknis, jaringan sosial, maupun kapasitas finansial. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi mekanisme penting yang memungkinkan berbagai aktor untuk menggabungkan sumber daya melalui koordinasi, pertukaran informasi, serta pembagian peran dan tanggung jawab dalam proses kebijakan.

Konsep kolaborasi dalam tata kelola publik dijelaskan oleh Chris Ansell dan Alison Gash (2008) melalui gagasan *Collaborative Governance*, mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam suatu forum bersama yang bersifat formal maupun informal. Dalam proses tersebut, para aktor berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, negosiasi, serta pengambilan keputusan yang bertujuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan bahwa solusi terhadap masalah publik dapat

dicapai secara lebih efektif melalui kerja sama antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan sumber daya yang berbeda.

Pada sektor pendidikan, kolaborasi dalam jejaring kebijakan dapat terlihat dalam berbagai bentuk kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, sektor swasta, serta komunitas lokal. Misalnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah sering menjalin kerja sama dengan universitas untuk melakukan penelitian dan pengembangan kurikulum, dengan organisasi profesi guru untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, serta dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas akses pendidikan di komunitas tertentu. Selain itu, lembaga donor internasional atau sektor swasta juga sering memberikan dukungan finansial maupun teknologi yang dapat membantu pengembangan program pendidikan. Melalui kolaborasi ini, berbagai sumber daya seperti pengetahuan akademik, dukungan finansial, inovasi teknologi, serta akses terhadap komunitas pendidikan dapat diintegrasikan untuk mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan.

2. Konflik dalam Jejaring Kebijakan

Pada jejaring kebijakan, kolaborasi memang menjadi tujuan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik. Namun demikian, konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses interaksi antaraktor dalam jaringan kebijakan. Konflik muncul karena setiap aktor yang terlibat membawa kepentingan, nilai, perspektif, serta sumber daya yang berbeda. Perbedaan tersebut sering kali memunculkan ketegangan dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, jejaring kebijakan tidak hanya menjadi ruang kerja sama, tetapi juga arena negosiasi dan persaingan antara berbagai aktor yang berusaha mempengaruhi arah kebijakan.

Pada konteks kebijakan pendidikan, konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu sumber konflik yang sering terjadi adalah perbedaan pandangan mengenai arah kebijakan pendidikan, seperti perdebatan tentang kurikulum nasional, metode evaluasi pendidikan, distribusi anggaran pendidikan, atau peran sektor swasta dalam penyediaan layanan pendidikan. Setiap aktor dalam sistem pendidikan memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda terhadap isu-isu

tersebut. Pemerintah, misalnya, mungkin lebih menekankan standar nasional dan efisiensi sistem pendidikan, sementara guru dan organisasi profesi pendidikan mungkin lebih menekankan aspek profesionalisme dan kondisi kerja tenaga pendidik. Sementara itu, masyarakat atau komunitas lokal dapat memiliki kepentingan yang berkaitan dengan nilai budaya, kebutuhan lokal, serta akses pendidikan bagi kelompok masyarakat tertentu.

Konflik yang muncul dalam jejaring kebijakan juga dapat dipahami sebagai konsekuensi dari keberagaman aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik. Ketika banyak pihak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, maka kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat menjadi semakin besar. Namun, konflik tidak selalu memiliki dampak negatif terhadap proses kebijakan. Erik-Hans Klijn dan Joop F. M. Koppenjan (2016) menjelaskan bahwa konflik dalam jejaring kebijakan sering kali justru menjadi sumber dinamika yang dapat mendorong inovasi kebijakan. Ketika berbagai perspektif yang berbeda dipertemukan dan diperdebatkan secara terbuka, proses tersebut dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah kebijakan serta memungkinkan munculnya solusi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan keputusan yang diambil secara sepihak.

Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat proses kebijakan publik. Konflik yang berkepanjangan antara aktor-aktor dalam jejaring kebijakan dapat memperlambat proses pengambilan keputusan serta mengurangi efektivitas implementasi kebijakan. Misalnya, konflik antara pemerintah dan organisasi masyarakat dapat memunculkan resistensi terhadap pelaksanaan program pendidikan tertentu. Ketika aktor-aktor yang terlibat tidak merasa dilibatkan secara adil atau tidak sepakat dengan arah kebijakan yang diambil, mungkin menolak atau tidak mendukung implementasi kebijakan tersebut.

D. Jejaring dan Produksi Inovasi Kebijakan

Pada perspektif tata kelola kebijakan publik modern, jejaring kebijakan (*Policy Network*) tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinasi antaraktor, tetapi juga sebagai ruang sosial dan institusional

yang memungkinkan munculnya inovasi kebijakan. Inovasi kebijakan merujuk pada pengembangan gagasan, pendekatan, atau instrumen kebijakan baru yang dirancang untuk mengatasi masalah publik secara lebih efektif. Dalam konteks kebijakan pendidikan, inovasi sering muncul dari interaksi antara berbagai aktor dalam jejaring kebijakan yang memiliki latar belakang, pengetahuan, dan sumber daya yang berbeda.

Perkembangan paradigma *governance* menunjukkan bahwa inovasi kebijakan semakin bergantung pada kemampuan aktor-aktor dalam jejaring untuk berbagi pengetahuan, membangun kolaborasi, serta menciptakan solusi bersama terhadap permasalahan publik yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa produksi inovasi kebijakan tidak lagi bersifat linear dan top-down, melainkan merupakan proses kolektif yang melibatkan berbagai aktor dalam sistem tata kelola publik.

1. Jejaring Kebijakan sebagai Ruang Pertukaran Pengetahuan

Jejaring kebijakan (*Policy Network* dan *Governance Network*) memiliki peran penting sebagai ruang pertukaran pengetahuan yang memungkinkan berbagai aktor untuk saling berbagi informasi, pengalaman, serta keahlian dalam proses kebijakan publik. Dalam sistem kebijakan yang semakin kompleks, tidak ada satu aktor pun yang memiliki seluruh pengetahuan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk memahami secara menyeluruh berbagai permasalahan publik. Oleh karena itu, interaksi antaraktor dalam jejaring kebijakan menjadi mekanisme penting yang memungkinkan integrasi berbagai bentuk pengetahuan untuk menghasilkan solusi kebijakan yang lebih efektif. Pengetahuan yang dipertukarkan dalam jejaring kebijakan tidak hanya terbatas pada pengetahuan ilmiah atau akademik, tetapi juga mencakup pengetahuan praktis yang diperoleh dari pengalaman lapangan serta pengetahuan lokal yang dimiliki oleh komunitas masyarakat.

Dengan interaksi dalam jejaring kebijakan, aktor-aktor yang berasal dari latar belakang yang berbeda dapat saling melengkapi dalam memahami suatu masalah kebijakan. Akademisi dan lembaga penelitian biasanya memiliki kapasitas untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah melalui penelitian dan analisis kebijakan. Di sisi lain, praktisi seperti guru, pengelola sekolah, atau pejabat pendidikan memiliki pengetahuan praktis mengenai bagaimana kebijakan dijalankan dalam praktik sehari-

hari. Selain itu, komunitas lokal juga memiliki pengetahuan kontekstual mengenai kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang sering kali mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Ketika berbagai jenis pengetahuan tersebut dipertemukan dalam suatu jejaring kebijakan, proses dialog antaraktor dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah yang dihadapi serta alternatif solusi yang mungkin diterapkan.

Menurut R. A. W. Rhodes (2017), *Governance Network* menyediakan ruang interaksi yang memungkinkan aktor publik dan non-publik untuk berbagi informasi, membangun pemahaman bersama, serta mengembangkan solusi inovatif terhadap berbagai persoalan kebijakan. Dalam ruang interaksi tersebut, proses komunikasi dan pertukaran gagasan menjadi sangat penting karena memungkinkan terjadinya pembelajaran kolektif di antara para aktor yang terlibat. Pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masing-masing aktor terhadap masalah kebijakan, tetapi juga dapat memperkuat kapasitas jaringan dalam menghasilkan inovasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial.

2. Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Sumber Inovasi

Kolaborasi lintas sektor merupakan salah satu sumber penting dalam munculnya inovasi kebijakan dalam sistem tata kelola modern. Dalam konteks kebijakan publik yang semakin kompleks, berbagai permasalahan sosial sering kali tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu sektor saja. Pemerintah memiliki otoritas regulatif serta kapasitas administratif untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, tetapi sering kali memerlukan dukungan dari aktor lain yang memiliki sumber daya, keahlian, dan perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, kerja sama antara sektor publik, sektor swasta, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil menjadi mekanisme penting yang memungkinkan munculnya ide-ide baru dalam proses kebijakan.

Kolaborasi lintas sektor mempertemukan aktor-aktor dengan latar belakang kelembagaan yang berbeda sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah kebijakan. Organisasi pemerintah biasanya memiliki struktur organisasi yang stabil dan kewenangan untuk

menetapkan aturan kebijakan. Sementara itu, organisasi non-pemerintah sering memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengembangkan pendekatan baru serta kemampuan untuk merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat. Ketika kedua sektor tersebut bekerja sama dalam suatu jejaring kebijakan, kombinasi antara otoritas formal dan kreativitas organisasi dapat menghasilkan solusi inovatif yang lebih efektif dalam menjawab tantangan kebijakan publik.

Menurut Joop F. M. Koppenjan dan Erik-Hans Klijn (2016), inovasi dalam *Governance Network* sering muncul dari interaksi antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan, kompetensi, serta sumber daya yang berbeda. Dalam jejaring kebijakan, setiap aktor membawa perspektif serta kemampuan yang unik. Ketika aktor-aktor tersebut berinteraksi melalui dialog, kerja sama, serta pertukaran ide, dapat menggabungkan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan solusi baru yang tidak mungkin dihasilkan oleh satu aktor secara individual. Dengan demikian, jejaring kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinasi antaraktor, tetapi juga sebagai ruang yang memungkinkan munculnya kreativitas dan inovasi dalam proses kebijakan publik.

E. Dampak Jejaring terhadap Kinerja Pendidikan

Dalam paradigma tata kelola publik kontemporer, jejaring kebijakan (*Policy Network*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja sektor publik, termasuk dalam bidang pendidikan. Kinerja pendidikan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hasil dari keputusan pemerintah pusat atau birokrasi pendidikan, melainkan sebagai produk dari interaksi kompleks antara berbagai aktor dalam sistem tata kelola pendidikan. Jejaring kebijakan yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, sektor swasta, serta komunitas lokal berperan dalam membentuk bagaimana kebijakan pendidikan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi.

Konsep *Governance Network* menekankan bahwa penyediaan layanan publik yang efektif membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antaraktor yang memiliki sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas yang berbeda. Oleh karena itu, kualitas hubungan dalam jejaring kebijakan

seperti tingkat kepercayaan, koordinasi, dan komunikasi dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pendidikan serta kualitas layanan pendidikan yang dihasilkan.

1. Jejaring Kebijakan dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendidikan

Jejaring kebijakan (*Policy Network* atau *Governance Network*) memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan. Dalam sistem pendidikan modern, proses implementasi kebijakan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada birokrasi pemerintah sebagai pelaksana tunggal. Sebaliknya, implementasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda dalam sistem pendidikan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, lembaga pendidikan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal. Karena banyaknya aktor yang terlibat, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan sistem kebijakan untuk membangun koordinasi yang efektif di antara para aktor tersebut.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan proses yang kompleks karena kebijakan yang telah dirumuskan harus diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang nyata di lapangan. Dalam proses ini, berbagai organisasi perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif. Michael Hill dan Peter Hupe (2014) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses interaksi antara berbagai organisasi dan aktor yang memiliki peran berbeda dalam sistem kebijakan. Artinya, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kualitas hubungan dan koordinasi antara aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pada konteks ini, jejaring kebijakan berfungsi sebagai mekanisme koordinasi yang memungkinkan berbagai aktor untuk bekerja sama secara lebih terorganisasi. Melalui jejaring kebijakan, para aktor dapat saling berbagi informasi mengenai tujuan program, metode pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Jejaring juga memungkinkan adanya penyelarasan kegiatan antarorganisasi sehingga program yang dilaksanakan oleh berbagai

lembaga dapat saling mendukung satu sama lain. Selain itu, jejaring kebijakan membantu mengoordinasikan penggunaan sumber daya yang tersedia, seperti pendanaan, tenaga ahli, serta fasilitas pendidikan, sehingga sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

2. Peningkatan Kapasitas Institusional dalam Sistem Pendidikan

Jejaring kebijakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas institusional dalam sistem pendidikan. Kapasitas institusional merujuk pada kemampuan organisasi atau lembaga untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan secara efektif. Dalam sistem pendidikan yang melibatkan banyak aktor dan lembaga, peningkatan kapasitas institusional menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan dengan baik. Melalui jejaring kebijakan, berbagai organisasi yang terlibat dalam sistem pendidikan dapat saling berinteraksi, bertukar pengalaman, serta mengembangkan kemampuan kelembagaannya secara bersama-sama.

Interaksi yang terjadi dalam jejaring kebijakan memungkinkan organisasi untuk belajar dari pengalaman aktor lain yang memiliki pengetahuan atau praktik yang lebih maju. Joop F. M. Koppenjan dan Erik-Hans Klijn (2016) menjelaskan bahwa *Governance Network* menyediakan ruang bagi organisasi untuk saling belajar melalui pertukaran informasi, pengalaman, serta metode pengelolaan kebijakan. Dalam jaringan tersebut, organisasi dapat berbagi praktik terbaik (*Best Practices*), strategi implementasi kebijakan, serta pendekatan manajerial yang telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai tantangan kebijakan. Proses pembelajaran kolektif ini membantu organisasi untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola program kebijakan secara lebih profesional dan adaptif.

Pada sektor pendidikan, peningkatan kapasitas institusional sering terjadi melalui berbagai bentuk kerja sama yang terbangun dalam jejaring kebijakan. Salah satu contohnya adalah program pelatihan guru yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga pelatihan, serta universitas. Melalui program tersebut, tenaga pendidik dapat meningkatkan kompetensi profesional dalam proses pembelajaran. Selain itu, kerja sama antara sekolah dan universitas juga dapat

memperkuat kapasitas institusi pendidikan dalam mengembangkan kurikulum, melakukan penelitian pendidikan, serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah. Organisasi masyarakat sipil juga sering berperan dalam memberikan dukungan teknis, pendampingan komunitas, serta program peningkatan kapasitas bagi lembaga pendidikan di tingkat lokal.

BAB VIII

TATA KELOLA KOLABORATIF DAN KO-PRODUKSI LAYANAN PENDIDIKAN

Tata kelola pendidikan pada Era administrasi publik modern semakin menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Kompleksitas tantangan pendidikan, seperti pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, serta keterbatasan sumber daya pemerintah, menuntut adanya keterlibatan yang lebih luas dari masyarakat, sektor swasta, dan berbagai institusi sosial. Dalam konteks ini, konsep tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*) dan ko-produksi layanan (*co-production*) menjadi pendekatan penting yang mendorong kerja sama antara pemerintah dan aktor non-negara dalam proses perumusan kebijakan, implementasi program, serta evaluasi layanan pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pengembangan sistem pendidikan. Melalui kolaborasi dan partisipasi yang inklusif, tata kelola pendidikan diharapkan mampu menghasilkan layanan pendidikan yang lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkelanjutan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (Ansell & Gash, 2008; Bovaird, 2007).

A. *Collaborative Governance* dalam Administrasi Publik

Collaborative Governance merupakan pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan kerja sama antara pemerintah dan berbagai aktor non-negara dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas masalah publik yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara sendiri. Berikut penjelasan

mengenai *Collaborative Governance* dalam administrasi publik dalam bentuk poin-poin:

1. Pengertian *Collaborative Governance*

Collaborative Governance merupakan salah satu pendekatan dalam tata kelola publik yang menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Dalam model ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan arah kebijakan secara sepihak, tetapi bekerja bersama dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai kelompok masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas masalah publik modern yang sering kali tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, *Collaborative Governance* menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan berbagai aktor untuk menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman dalam mencari solusi terhadap permasalahan publik.

Pada kerangka *Collaborative Governance*, proses kebijakan tidak hanya berfokus pada pengambilan keputusan oleh pemerintah, tetapi juga pada proses dialog, negosiasi, dan pembentukan kesepakatan bersama di antara berbagai pemangku kepentingan. Proses ini biasanya dilakukan melalui forum atau mekanisme partisipatif yang memungkinkan berbagai aktor untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, serta pengalaman terkait dengan isu kebijakan yang sedang dibahas. Melalui interaksi yang bersifat terbuka dan partisipatif, para aktor dapat membangun pemahaman bersama mengenai masalah kebijakan serta merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh berbagai pihak.

Konsep *Collaborative Governance* banyak dibahas dalam literatur administrasi publik modern. Chris Ansell dan Alison Gash (2008) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan non-negara dalam suatu forum formal yang berorientasi pada pencapaian konsensus. Dalam definisi ini, kolaborasi

dipandang sebagai proses yang terstruktur, di mana berbagai aktor berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai kebijakan publik yang akan diambil. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi yang inklusif serta proses deliberasi yang memungkinkan berbagai kepentingan dipertimbangkan secara seimbang.

2. Latar Belakang Munculnya *Collaborative Governance*

Munculnya konsep *Collaborative Governance* tidak terlepas dari berbagai perubahan dalam lingkungan kebijakan publik serta perkembangan paradigma dalam administrasi publik modern. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi munculnya pendekatan ini adalah semakin kompleksnya berbagai permasalahan publik yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Masalah-masalah seperti pendidikan, kemiskinan, kesehatan, perubahan iklim, serta ketimpangan sosial memiliki karakter yang multidimensional dan melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Permasalahan semacam ini sulit diselesaikan oleh satu lembaga atau sektor saja. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil, agar solusi yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Munculnya *Collaborative Governance* juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengelola berbagai program kebijakan secara mandiri. Dalam banyak kasus, pemerintah menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal pendanaan, tenaga ahli, maupun kapasitas administratif. Kondisi ini membuat pemerintah tidak selalu mampu merespons semua kebutuhan masyarakat secara efektif tanpa dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu, kerja sama dengan berbagai aktor non-pemerintah menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas dalam perumusan maupun implementasi kebijakan publik. Melalui kolaborasi dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga akademik, pemerintah dapat memperoleh tambahan sumber daya, pengetahuan, serta inovasi yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan.

Faktor lain yang mendorong berkembangnya *Collaborative Governance* adalah meningkatnya tuntutan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Perkembangan demokrasi di

berbagai negara telah mendorong masyarakat untuk terlibat secara lebih aktif dalam proses kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya. Masyarakat tidak lagi dipandang hanya sebagai penerima kebijakan (*Policy recipients*), tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Pendekatan kolaboratif memberikan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, serta pengalamannya dalam proses kebijakan, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

B. Kemitraan Pemerintah–Masyarakat–Institusi

Kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai institusi merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola kolaboratif dalam administrasi publik, khususnya dalam sektor pendidikan. Kemitraan ini menekankan kerja sama antara berbagai aktor untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan layanan publik. Dalam sistem tata kelola modern, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam penyediaan layanan pendidikan, tetapi bekerja bersama masyarakat, lembaga sosial, organisasi keagamaan, dunia usaha, serta institusi pendidikan lainnya. Berikut penjelasan mengenai kemitraan pemerintah–masyarakat–institusi dalam bentuk poin-poin:

1. Pengertian Kemitraan dalam Tata Kelola Publik

Kemitraan dalam tata kelola publik merupakan salah satu pendekatan yang semakin penting dalam pengelolaan urusan publik di Era modern. Secara umum, kemitraan dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan bersama dalam menyelesaikan suatu masalah atau mencapai kepentingan tertentu. Dalam konteks kebijakan publik, kemitraan biasanya terbentuk ketika berbagai aktor yang memiliki sumber daya, kapasitas, dan kepentingan yang berbeda bekerja sama untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara efektif oleh satu pihak saja. Melalui kemitraan, berbagai pihak dapat menggabungkan kekuatan untuk mengatasi permasalahan publik yang semakin kompleks.

Pada administrasi publik, kemitraan sering melibatkan kerja sama antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik maupun pelaksanaan kebijakan. Aktor non-pemerintah yang terlibat dalam kemitraan ini dapat mencakup sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, komunitas lokal, serta lembaga internasional. Pemerintah biasanya memiliki otoritas regulatif dan tanggung jawab utama dalam penyediaan layanan publik, sementara aktor non-pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya tambahan, keahlian teknis, inovasi, serta akses yang lebih dekat kepada masyarakat. Dengan adanya kemitraan, proses penyelenggaraan kebijakan dan layanan publik dapat menjadi lebih efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kemitraan juga mencerminkan perubahan paradigma dalam tata kelola publik, dari model pemerintahan yang bersifat *hierarkis* menuju model *Governance* yang lebih kolaboratif. Dalam model pemerintahan tradisional, pemerintah sering berperan sebagai aktor utama yang mengendalikan hampir seluruh proses kebijakan dan pelayanan publik. Namun, dalam paradigma tata kelola modern, pemerintah semakin menyadari bahwa keberhasilan kebijakan publik sering kali memerlukan dukungan dari berbagai aktor di luar birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, kemitraan menjadi mekanisme penting yang memungkinkan terjadinya kolaborasi lintas organisasi dalam mengatasi berbagai tantangan kebijakan.

2. Latar Belakang Pentingnya Kemitraan

Kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai institusi menjadi semakin penting dalam tata kelola publik modern karena adanya berbagai tantangan dalam penyelenggaraan layanan publik. Dalam banyak sektor, termasuk pendidikan, pemerintah tidak lagi dapat bekerja secara sendiri dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas masalah publik, serta meningkatnya tuntutan partisipasi masyarakat telah mendorong munculnya kebutuhan akan kerja sama yang lebih luas antara berbagai aktor dalam sistem pemerintahan. Kemitraan menjadi salah satu

mekanisme yang memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Salah satu faktor utama yang mendorong pentingnya kemitraan adalah keterbatasan sumber daya pemerintah. Dalam praktiknya, pemerintah sering menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran, tenaga kerja, maupun kapasitas institusional dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk merespons berbagai kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, kerja sama dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, serta komunitas lokal menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah. Melalui kemitraan, berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa sumber daya tambahan, keahlian teknis, serta dukungan dalam implementasi program kebijakan.

Kompleksitas masalah pendidikan juga menjadi faktor yang mendorong perlunya kemitraan dalam tata kelola publik. Permasalahan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga mencakup kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Permasalahan yang bersifat multidimensional ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, seperti universitas, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta, untuk mengembangkan solusi yang lebih komprehensif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Faktor lain yang mendorong berkembangnya kemitraan adalah meningkatnya tuntutan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Seiring dengan berkembangnya demokrasi, masyarakat semakin menuntut keterlibatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Masyarakat tidak lagi hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang memiliki hak untuk memberikan masukan, kritik, serta kontribusi dalam proses kebijakan. Melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih partisipatif dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara lebih luas.

C. Ko-Produksi Kebijakan dan Layanan

Ko-produksi (*co-production*) merupakan konsep penting dalam administrasi publik modern yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses produksi kebijakan dan layanan publik. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra yang berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi layanan publik. Konsep ini semakin relevan dalam tata kelola pendidikan karena keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan berbagai aktor sosial seperti orang tua, komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan. Berikut penjelasan mengenai ko-produksi kebijakan dan layanan dalam bentuk poin-poin:

1. Pengertian Ko-Produksi dalam Administrasi Publik

Ko-produksi dalam administrasi publik merupakan konsep yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai penerima layanan (*service recipients*), tetapi juga sebagai mitra aktif yang turut berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi layanan publik. Konsep ko-produksi muncul dari pemahaman bahwa kualitas layanan publik sering kali sangat dipengaruhi oleh partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang menjadi pengguna layanan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan atau program pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kinerja pemerintah, tetapi juga pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.

Secara umum, ko-produksi dapat dipahami sebagai proses di mana pemerintah dan masyarakat bekerja bersama dalam menghasilkan kebijakan maupun layanan publik. Dalam sistem pelayanan publik yang kompleks, pemerintah sering menghadapi keterbatasan sumber daya, informasi, serta kapasitas operasional dalam menyediakan layanan secara optimal. Sementara itu, masyarakat sebagai pengguna layanan memiliki pengalaman langsung terhadap layanan yang diterima serta memiliki pengetahuan mengenai kebutuhan yang paling relevan dengan

kondisinya. Melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, proses penyediaan layanan publik dapat menjadi lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Menurut Tony Bovaird (2007), ko-produksi merupakan keterlibatan pengguna layanan dalam proses perencanaan, pengelolaan, serta evaluasi layanan publik bersama dengan penyedia layanan. Dalam perspektif ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang memberikan umpan balik terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi juga dapat berpartisipasi secara langsung dalam merancang dan mengembangkan layanan tersebut. Keterlibatan ini dapat meningkatkan kualitas layanan karena pengguna layanan dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman dalam menggunakan layanan publik.

Pandangan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik juga dijelaskan oleh Elinor Ostrom (1996), yang menyatakan bahwa banyak layanan publik tidak dapat berjalan secara efektif tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat yang menjadi penerima layanan tersebut. Dalam pandangannya, keberhasilan pelayanan publik sering kali bergantung pada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan layanan tersebut. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pelayanan, dapat membantu meningkatkan efisiensi, kualitas, serta keberlanjutan layanan publik.

2. Latar Belakang Munculnya Konsep Ko-Produksi

Munculnya konsep ko-produksi dalam kebijakan publik tidak terlepas dari berbagai perubahan dalam tata kelola pemerintahan serta dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu faktor utama yang mendorong berkembangnya konsep ini adalah keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik secara optimal. Dalam praktiknya, pemerintah sering menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, maupun kapasitas institusional. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak selalu mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan layanan publik menjadi semakin penting. Melalui ko-produksi, masyarakat dapat

berperan sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyediaan layanan publik, sehingga beban pemerintah dapat terbagi dan kualitas layanan dapat ditingkatkan.

Kebutuhan akan layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi latar belakang penting munculnya konsep ko-produksi. Dalam model pelayanan publik yang bersifat birokratis dan terpusat, kebijakan sering kali dirancang tanpa memahami secara mendalam kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. Akibatnya, layanan yang diberikan tidak selalu sesuai dengan harapan atau kebutuhan pengguna. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan layanan publik, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kebutuhan masyarakat. Hal ini memungkinkan layanan publik dirancang secara lebih relevan dan responsif terhadap kondisi sosial yang ada.

Perkembangan paradigma *Governance* dalam administrasi publik juga turut mendorong berkembangnya konsep ko-produksi. Paradigma ini menekankan bahwa pengelolaan urusan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai aktor lain seperti masyarakat, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil. Dalam kerangka *Governance*, kolaborasi dan kerja sama antara berbagai pihak menjadi unsur penting dalam penyelesaian masalah publik. Ko-produksi merupakan salah satu bentuk implementasi dari pendekatan tersebut karena menekankan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghasilkan layanan publik yang lebih efektif.

Faktor lain yang mendorong berkembangnya konsep ko-produksi adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak dan perannya dalam proses kebijakan publik. Seiring dengan perkembangan demokrasi dan meningkatnya akses informasi, masyarakat semakin menyadari bahwa memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam berbagai proses kebijakan, termasuk dalam penyelenggaraan layanan publik. Dalam konteks ini, ko-produksi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dalam pengembangan dan pelaksanaan layanan publik.

D. Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal

Sistem pendidikan dalam suatu negara tidak hanya berlangsung melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, tetapi juga melalui berbagai bentuk pembelajaran yang terjadi di luar sistem pendidikan formal. Oleh karena itu, dalam kajian kebijakan pendidikan dikenal tiga jalur utama pendidikan, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan ini saling melengkapi dalam membentuk sistem pendidikan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konteks tata kelola pendidikan modern, kolaborasi antara ketiga jalur pendidikan tersebut menjadi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut penjelasan mengenai pendidikan formal, non-formal, dan informal dalam bentuk poin-poin:

1. Pengertian Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal

Pada sistem pendidikan, proses pembelajaran masyarakat tidak hanya berlangsung melalui sekolah atau lembaga pendidikan resmi, tetapi juga melalui berbagai bentuk kegiatan belajar lainnya yang terjadi di lingkungan sosial. Oleh karena itu, sistem pendidikan pada umumnya dibagi menjadi tiga jalur utama, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Ketiga jalur pendidikan ini saling melengkapi satu sama lain dan menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi seluruh masyarakat. Melalui ketiga jalur tersebut, individu dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Philip H. Coombs dan Manzoor Ahmed (1974), pendidikan formal merupakan sistem pendidikan yang paling terstruktur dan terorganisasi. Pendidikan formal berlangsung dalam lembaga pendidikan resmi seperti sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Sistem pendidikan ini memiliki kurikulum yang jelas, jenjang pendidikan yang teratur, serta proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik profesional. Selain itu, pendidikan

formal juga biasanya diakhiri dengan pemberian sertifikat atau ijazah sebagai bukti bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu tingkat pendidikan tertentu. Tujuan utama pendidikan formal adalah memberikan pengetahuan akademik, keterampilan dasar, serta pembentukan karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja.

Di samping pendidikan formal, terdapat pula pendidikan non-formal yang berfungsi sebagai pelengkap dan alternatif dari sistem pendidikan formal. Pendidikan non-formal merupakan kegiatan pendidikan yang terorganisasi di luar sistem pendidikan formal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Bentuk pendidikan ini biasanya lebih fleksibel dalam hal waktu, metode pembelajaran, serta peserta didik yang terlibat. Pendidikan non-formal dapat mencakup berbagai kegiatan seperti kursus keterampilan, pelatihan kerja, program pemberdayaan masyarakat, pendidikan keaksaraan, serta berbagai program pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat, organisasi non-pemerintah, maupun lembaga pemerintah. Melalui pendidikan non-formal, masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal tetap dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupannya.

2. Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang paling terstruktur dan menjadi bagian utama dari sistem pendidikan nasional. Jalur pendidikan ini diselenggarakan secara sistematis oleh lembaga pendidikan resmi yang diakui oleh negara dan dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, serta pembentukan karakter kepada peserta didik. Dalam sistem pendidikan formal, proses pembelajaran berlangsung secara terencana dengan kurikulum yang telah ditetapkan serta mengikuti standar nasional pendidikan yang berlaku. Pendidikan formal juga memiliki peran penting dalam membangun fondasi pengetahuan dasar yang diperlukan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Salah satu karakteristik utama pendidikan formal adalah penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga pendidikan resmi yang

mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Lembaga-lembaga ini mencakup berbagai institusi pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan formal memiliki struktur kurikulum yang jelas dan dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kurikulum tersebut biasanya mencakup berbagai mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan praktis, serta nilai-nilai sosial peserta didik. Selain itu, pendidikan formal juga dilengkapi dengan sistem evaluasi yang terstandarisasi untuk menilai perkembangan dan pencapaian belajar peserta didik secara objektif.

Karakteristik lain dari pendidikan formal adalah adanya jenjang pendidikan yang tersusun secara berurutan. Sistem pendidikan formal biasanya dimulai dari pendidikan dasar, dilanjutkan ke pendidikan menengah, dan kemudian menuju pendidikan tinggi. Setiap jenjang pendidikan memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda serta tingkat kompleksitas materi yang semakin meningkat. Struktur berjenjang ini memungkinkan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan secara bertahap dan sistematis sesuai dengan tingkat perkembangannya. Selain itu, pendidikan formal juga menggunakan sistem administrasi pendidikan yang terorganisasi, yang mencakup pengelolaan kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta pengelolaan sumber daya pendidikan.

3. Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal merupakan salah satu jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal, namun tetap memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan terorganisasi. Jalur pendidikan ini hadir sebagai pelengkap sekaligus alternatif bagi pendidikan formal, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan melalui jalur sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan non-formal dirancang untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui pendidikan non-formal, berbagai kelompok masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan dunia kerja.

Salah satu karakteristik utama pendidikan non-formal adalah sifatnya yang fleksibel. Program pendidikan non-formal biasanya diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, serta latar belakang peserta didik. Berbeda dengan pendidikan formal yang memiliki kurikulum dan jadwal pembelajaran yang relatif tetap, pendidikan non-formal dapat menyesuaikan metode pembelajaran, waktu pelaksanaan, serta materi yang diajarkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta. Fleksibilitas ini memungkinkan masyarakat dari berbagai kelompok usia dan latar belakang untuk mengikuti proses pembelajaran tanpa harus terikat pada sistem pendidikan yang kaku.

Pendidikan non-formal juga biasanya tidak sepenuhnya mengikuti sistem kurikulum formal yang ketat seperti dalam pendidikan sekolah. Materi pembelajaran dalam pendidikan non-formal umumnya lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia kerja. Oleh karena itu, banyak program pendidikan non-formal yang berfokus pada pelatihan keterampilan tertentu, peningkatan kapasitas kerja, maupun pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial.

Pendidikan non-formal juga dapat diselenggarakan oleh berbagai pihak, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh organisasi masyarakat, lembaga swasta, lembaga pendidikan, maupun komunitas lokal. Keberagaman penyelenggara ini memungkinkan pendidikan non-formal menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Peserta didik dalam pendidikan non-formal juga berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan atau memperoleh pengetahuan baru.

E. Model Tata Kelola Partisipatif

Model tata kelola partisipatif merupakan pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam sektor pendidikan, model ini menjadi penting karena pendidikan merupakan bidang yang sangat terkait dengan kepentingan masyarakat

luas. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, organisasi sosial, serta lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Tata kelola partisipatif juga menjadi bagian dari pendekatan *governance* modern yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

1. Pengertian Tata Kelola Partisipatif

Tata kelola partisipatif merupakan pendekatan dalam pengelolaan kebijakan publik yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan arah kebijakan, tetapi membuka ruang bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi secara aktif. Tata kelola partisipatif lahir dari perkembangan paradigma pemerintahan modern yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk memberikan masukan, aspirasi, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya.

Secara umum, tata kelola partisipatif menekankan keterlibatan berbagai aktor dalam seluruh tahapan proses kebijakan publik, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Dalam tahap perencanaan, masyarakat dapat memberikan masukan mengenai permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan publik. Pada tahap implementasi, masyarakat dapat berperan dalam mendukung pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dirancang oleh pemerintah. Sementara itu, pada tahap evaluasi, masyarakat dapat memberikan umpan balik mengenai efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan tersebut, kebijakan publik diharapkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Menurut Archon Fung (2006), partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan kualitas keputusan publik karena proses tersebut melibatkan berbagai perspektif yang berasal dari

masyarakat. Keterlibatan masyarakat memungkinkan pemerintah memperoleh informasi yang lebih beragam mengenai kondisi sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif atau teknokratis, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan nyata masyarakat. Partisipasi publik juga dapat meningkatkan legitimasi kebijakan karena masyarakat merasa bahwa ia memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan.

2. Latar Belakang Munculnya Tata Kelola Partisipatif

Munculnya model tata kelola partisipatif dalam administrasi publik tidak terlepas dari berbagai perubahan dalam sistem pemerintahan modern serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan publik yang lebih terbuka dan inklusif. Dalam model pemerintahan tradisional, proses kebijakan sering kali bersifat sentralistik dan didominasi oleh pemerintah. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kesadaran akan hak-hak warga negara, muncul kebutuhan untuk melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam pengelolaan urusan publik. Tata kelola partisipatif kemudian berkembang sebagai pendekatan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam berbagai tahapan proses kebijakan publik.

Salah satu faktor utama yang mendorong berkembangnya tata kelola partisipatif adalah perkembangan demokratisasi. Dalam sistem demokrasi modern, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum, tetapi juga memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan menjadi salah satu indikator penting dari kualitas demokrasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan akan transparansi dalam pemerintahan juga menjadi latar belakang penting berkembangnya tata kelola partisipatif. Transparansi dalam proses kebijakan publik sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika

masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, dapat memahami bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan serta bagaimana sumber daya publik digunakan. Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan juga dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan karena proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka dan dapat diawasi oleh publik.

Kompleksitas masalah publik juga menjadi faktor yang mendorong berkembangnya tata kelola partisipatif. Permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern, seperti masalah pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kemiskinan, sering kali memiliki dimensi yang sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Dalam situasi seperti ini, diperlukan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, serta sektor swasta. Melalui tata kelola partisipatif, berbagai aktor dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang lebih komprehensif terhadap berbagai permasalahan publik.

3. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Partisipatif

Tata kelola partisipatif merupakan pendekatan dalam pengelolaan kebijakan publik yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. Agar pendekatan ini dapat berjalan secara efektif, terdapat sejumlah prinsip utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, tata kelola partisipatif dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu prinsip utama dalam tata kelola partisipatif adalah partisipasi inklusif. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh kelompok masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses kebijakan publik tanpa adanya diskriminasi. Dalam praktiknya, partisipasi inklusif berarti bahwa pemerintah harus membuka ruang partisipasi bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang sering kali kurang terwakili seperti perempuan, kelompok miskin,

masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya. Dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat secara luas, proses pengambilan keputusan dapat mencerminkan beragam perspektif dan kepentingan yang ada di masyarakat.

Prinsip berikutnya adalah transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi berarti bahwa informasi mengenai kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, serta penggunaan sumber daya publik harus dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Keterbukaan informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan memantau proses kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih efektif karena memiliki informasi yang cukup untuk memberikan masukan yang relevan terhadap kebijakan yang sedang dirumuskan atau dilaksanakan.

Prinsip akuntabilitas juga menjadi elemen penting dalam tata kelola partisipatif. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Dalam sistem pemerintahan yang partisipatif, masyarakat tidak hanya terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan serta menilai kinerja pemerintah. Melalui mekanisme akuntabilitas yang kuat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prinsip lainnya adalah kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam tata kelola partisipatif, setiap aktor yang terlibat dalam proses kebijakan harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, ide, maupun aspirasinya. Hal ini penting untuk mencegah dominasi dari kelompok tertentu yang dapat mengabaikan kepentingan kelompok lain. Kesetaraan dalam partisipasi juga membantu menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih adil dan demokratis karena semua pihak memiliki ruang yang sama untuk berkontribusi.

Prinsip terakhir adalah dialog dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Tata kelola partisipatif menekankan bahwa keputusan publik sebaiknya dihasilkan melalui proses diskusi yang

melibatkan berbagai pihak, bukan hanya melalui keputusan sepihak dari pemerintah. Melalui dialog dan musyawarah, berbagai aktor dapat bertukar pandangan, mengemukakan kepentingannya, serta mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Archon Fung yang menekankan pentingnya proses deliberatif dalam partisipasi publik untuk menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas dan legitim. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip tata kelola partisipatif dapat membantu menciptakan proses kebijakan publik yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

BAB IX

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI PROSES POLITIK

Implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya merupakan proses administratif untuk menjalankan keputusan pemerintah, tetapi juga merupakan proses politik yang melibatkan interaksi berbagai aktor, kepentingan, serta dinamika kekuasaan dalam sistem pendidikan. Dalam praktiknya, kebijakan yang telah dirumuskan pada tingkat pusat harus diterjemahkan oleh birokrasi, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan melalui serangkaian tindakan administratif dan manajerial di lapangan. Proses ini sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan yang ada dalam sistem pendidikan. Menurut Birkland (2019), kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah masyarakat melalui alokasi sumber daya dan tindakan strategis yang dirancang secara sistematis. Sementara itu, implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan kebijakan yang bertujuan memastikan bahwa keputusan politik tersebut benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik pelayanan publik (Hill & Hupe, 2020). Dalam konteks administrasi publik, implementasi kebijakan pendidikan juga berfungsi sebagai jembatan antara keputusan politik dan tindakan nyata di lapangan, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi kelembagaan, manajemen sumber daya, serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, memahami implementasi kebijakan pendidikan sebagai proses politik menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dapat mengalami penyesuaian, negosiasi, bahkan perubahan ketika diterapkan dalam sistem pendidikan yang kompleks dan beragam.

A. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan merupakan salah satu kajian penting dalam studi kebijakan publik karena menentukan bagaimana suatu kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik. Dalam konteks pendidikan, implementasi kebijakan menjadi tahap krusial yang menjembatani antara keputusan pemerintah dengan realitas pelaksanaan di sekolah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan pendidikan yang dirancang dengan baik tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan tidak hanya dilihat sebagai proses teknis administratif, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan berbagai aktor, institusi, serta dinamika politik dan sosial. Administrasi publik berfungsi sebagai mekanisme yang mengelola pelaksanaan kebijakan melalui pengorganisasian sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bagian integral dari proses administrasi pemerintahan yang memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat.

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan berbagai keputusan atau program yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan melalui tindakan administratif, kegiatan operasional, serta program yang dilakukan oleh lembaga pelaksana kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang sebelumnya masih berupa konsep atau keputusan formal mulai diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Dengan demikian, implementasi kebijakan menjadi tahap yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan karena pada tahap inilah kebijakan mulai memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Menurut Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky (1984), implementasi kebijakan merupakan proses yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh organisasi pelaksana, menekankan bahwa implementasi kebijakan bukanlah proses yang sederhana, melainkan tahap yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai organisasi, prosedur birokrasi, serta keputusan administratif yang harus saling terkoordinasi. Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pelaksana dalam mengelola sumber daya, menjalankan prosedur administrasi, serta membangun koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan juga dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun sektor swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik. Definisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan lembaga pemerintah sebagai pelaksana utama kebijakan, tetapi juga dapat melibatkan berbagai pihak lain yang berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, implementasi kebijakan merupakan proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor yang bekerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan.

Pada konteks pendidikan, implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Aktor-aktor tersebut meliputi pemerintah pusat yang merumuskan kebijakan pendidikan nasional, pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah, dinas pendidikan yang mengelola program pendidikan, serta lembaga pendidikan seperti sekolah yang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan pendidikan ke dalam proses pembelajaran di kelas, sementara masyarakat juga dapat berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan melalui berbagai bentuk partisipasi.

2. Pendekatan dalam Teori Implementasi Kebijakan

Pada kajian kebijakan publik, para ahli telah mengembangkan berbagai pendekatan untuk memahami bagaimana suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan secara sederhana karena proses ini melibatkan banyak aktor, lembaga, serta kondisi sosial yang berbeda. Oleh karena itu, para peneliti kebijakan publik mengembangkan beberapa pendekatan teoretis untuk menjelaskan dinamika implementasi kebijakan. Secara umum, terdapat tiga pendekatan utama yang sering digunakan dalam studi implementasi kebijakan, yaitu pendekatan top-down, pendekatan bottom-up, serta pendekatan sintesis atau hybrid yang menggabungkan kedua perspektif tersebut.

Pendekatan pertama adalah pendekatan top-down, yaitu pendekatan yang melihat implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat. Dalam pendekatan ini, fokus utama terletak pada bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga pelaksana di tingkat bawah. Keberhasilan implementasi kebijakan dalam pendekatan ini sangat bergantung pada sejauh mana pelaksana kebijakan mampu mengikuti tujuan, aturan, serta instruksi yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Salah satu tokoh penting dalam pendekatan ini adalah George C. Edwards III (1980) yang menjelaskan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi.

Komunikasi kebijakan yang jelas sangat penting agar pelaksana kebijakan memahami tujuan dan prosedur pelaksanaan kebijakan secara tepat. Selain itu, implementasi kebijakan juga memerlukan sumber daya yang memadai seperti anggaran, tenaga kerja, serta fasilitas pendukung. Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan juga sangat menentukan keberhasilan implementasi, sementara struktur birokrasi yang jelas dan sistem koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Pendekatan *top-down* sering digunakan dalam kebijakan pendidikan nasional karena pemerintah pusat biasanya menetapkan standar pendidikan yang harus diterapkan

oleh seluruh lembaga pendidikan. Namun demikian, pendekatan ini sering dikritik karena dianggap terlalu menekankan peran pembuat kebijakan dan kurang memperhatikan kondisi serta peran pelaksana kebijakan di tingkat lokal.

B. Implementasi sebagai Arena Diskresi

Implementasi kebijakan pendidikan tidak selalu berlangsung secara mekanis sesuai dengan desain kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan sering kali melibatkan berbagai interpretasi, penyesuaian, dan keputusan yang diambil oleh para pelaksana kebijakan di tingkat lapangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya proses administratif, tetapi juga merupakan arena diskresi, yaitu ruang bagi pelaksana kebijakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi.

Pada kajian kebijakan publik, diskresi menjadi konsep penting untuk memahami bagaimana kebijakan dijalankan dalam situasi yang kompleks dan dinamis. Para pelaksana kebijakan seperti guru, kepala sekolah, birokrat pendidikan, serta pejabat pemerintah daerah sering dihadapkan pada situasi yang tidak sepenuhnya diatur dalam peraturan kebijakan. Oleh karena itu, menggunakan pertimbangan profesional dan pengalaman praktis untuk menentukan tindakan yang paling tepat.

Pada perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pengelolaan kebijakan yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor pemerintah dan masyarakat. Administrasi publik berperan sebagai penghubung antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan melalui pengelolaan sumber daya, koordinasi organisasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, diskresi menjadi salah satu elemen penting dalam implementasi kebijakan pendidikan karena memungkinkan kebijakan yang bersifat umum dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kondisi lokal.

1. Konsep Diskresi dalam Implementasi Kebijakan

Konsep diskresi dalam implementasi kebijakan merujuk pada kebebasan atau kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu ketika aturan formal tidak memberikan petunjuk yang jelas atau ketika kondisi di lapangan memerlukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada. Dalam praktik administrasi publik, tidak semua situasi yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan dapat diatur secara rinci dalam peraturan atau prosedur resmi. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan sering kali harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan tindakan yang paling tepat dalam menghadapi berbagai situasi yang kompleks. Diskresi menjadi penting karena memungkinkan kebijakan publik dapat diterapkan secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Konsep diskresi dalam implementasi kebijakan dijelaskan secara sistematis oleh Michael Lipsky (1980) melalui teori *Street-Level Bureaucracy*. Dalam teorinya, Lipsky menekankan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat bawah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan bagaimana kebijakan publik diterapkan dalam praktik sehari-hari. Pelaksana kebijakan ini disebut sebagai *Street-Level bureaucrats*, yaitu aparat pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Contoh dari *Street-Level bureaucrats* antara lain guru, polisi, pekerja sosial, serta berbagai pejabat pelayanan publik lainnya yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung.

Menurut Lipsky (1980), para pelaksana kebijakan di tingkat bawah memiliki pengaruh yang besar dalam proses implementasi kebijakan karena berada pada posisi yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, sering kali menghadapi berbagai situasi yang tidak sepenuhnya diatur oleh kebijakan formal. Oleh karena itu, perlu menggunakan diskresi untuk menafsirkan aturan serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang ada di lapangan. Keputusan yang diambil dalam situasi tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan publik benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

2. Diskresi dalam Konteks Kebijakan Pendidikan

Diskresi dalam konteks kebijakan pendidikan merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan di tingkat lapangan untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan pendidikan dengan kondisi nyata yang dihadapi. Dalam sistem pendidikan nasional, kebijakan biasanya dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi, standar pendidikan, atau kurikulum nasional yang berlaku bagi seluruh lembaga pendidikan. Kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai tujuan pendidikan, standar kompetensi, serta mekanisme penyelenggaraan pendidikan. Namun dalam praktiknya, kondisi setiap sekolah dan daerah sering kali berbeda, baik dari segi fasilitas pendidikan, karakteristik siswa, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perbedaan kondisi tersebut membuat pelaksanaan kebijakan pendidikan tidak selalu dapat dilakukan secara seragam di semua tempat.

Pada situasi seperti ini, pelaksana kebijakan pendidikan seperti guru, kepala sekolah, serta pejabat pendidikan di tingkat daerah sering kali perlu menggunakan diskresi untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang ada di lapangan. Diskresi memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk mengambil keputusan yang lebih fleksibel ketika menghadapi situasi yang tidak sepenuhnya diatur dalam kebijakan formal. Misalnya, banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas yang terbatas, kurangnya sarana pembelajaran, atau akses teknologi yang belum memadai. Selain itu, guru juga sering menghadapi perbedaan kemampuan akademik siswa dalam satu kelas, serta berbagai tantangan yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga siswa. Dalam kondisi seperti ini, pelaksana kebijakan pendidikan perlu menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan cara terbaik dalam menerapkan kebijakan pendidikan agar tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Salah satu contoh penggunaan diskresi dalam pendidikan dapat dilihat dalam penerapan kurikulum nasional. Pemerintah biasanya menetapkan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik melalui kurikulum nasional. Namun dalam praktiknya, guru sering menyesuaikan metode pembelajaran, strategi pengajaran, serta materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa di kelas. Guru dapat memilih pendekatan pembelajaran yang berbeda,

menyesuaikan tempo pembelajaran, atau memberikan materi tambahan bagi siswa yang membutuhkan dukungan lebih. Penyesuaian tersebut merupakan bentuk diskresi yang dilakukan oleh guru untuk memastikan bahwa kebijakan kurikulum dapat diterapkan secara efektif dalam proses pembelajaran.

3. Faktor yang Mendorong Terjadinya Diskresi

Diskresi dalam implementasi kebijakan pendidikan tidak muncul secara kebetulan, tetapi biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam praktik administrasi publik, kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah sering kali bersifat umum dan dirancang untuk berlaku secara luas. Namun ketika kebijakan tersebut diterapkan dalam berbagai situasi yang berbeda, pelaksana kebijakan sering menghadapi kondisi yang tidak sepenuhnya diatur dalam aturan formal. Oleh karena itu, perlu menggunakan diskresi untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kebutuhan serta kondisi yang dihadapi. Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya diskresi dalam implementasi kebijakan pendidikan antara lain ketidakjelasan aturan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kompleksitas masalah pendidikan, serta interaksi langsung antara pelaksana kebijakan dan masyarakat.

Salah satu faktor yang mendorong munculnya diskresi adalah ketidakjelasan aturan kebijakan. Banyak kebijakan publik dirumuskan dalam bentuk pedoman atau aturan umum yang memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan kebijakan, tetapi tidak selalu mengatur secara rinci semua situasi yang mungkin terjadi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, pelaksana kebijakan perlu menafsirkan aturan yang ada agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Misalnya, dalam kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan kurikulum atau standar pembelajaran, pemerintah biasanya menetapkan tujuan dan standar kompetensi secara umum. Namun, guru dan kepala sekolah perlu menyesuaikan penerapan kebijakan tersebut dengan kondisi siswa, lingkungan sekolah, serta sumber daya yang tersedia.

Faktor kedua yang mendorong terjadinya diskresi adalah keterbatasan sumber daya. Dalam banyak kasus, pelaksana kebijakan pendidikan menghadapi keterbatasan anggaran, jumlah tenaga pendidik,

maupun fasilitas pendidikan. Kondisi ini memaksa pelaksana kebijakan untuk membuat keputusan mengenai prioritas penggunaan sumber daya yang tersedia. Misalnya, kepala sekolah harus menentukan bagaimana anggaran sekolah digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan, atau guru harus menyesuaikan metode pembelajaran ketika sarana pembelajaran yang tersedia terbatas. Keputusan-keputusan tersebut sering kali membutuhkan pertimbangan profesional yang tidak sepenuhnya diatur dalam kebijakan formal.

Kompleksitas masalah pendidikan juga menjadi faktor penting yang mendorong penggunaan diskresi. Permasalahan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda di setiap daerah. Kondisi sosial ekonomi keluarga siswa, tingkat pendidikan masyarakat, serta nilai-nilai budaya lokal dapat mempengaruhi proses pendidikan secara signifikan. Karena kondisi tersebut sangat beragam, kebijakan pendidikan yang dirancang di tingkat nasional sering kali perlu disesuaikan dengan kondisi lokal agar dapat diterapkan secara efektif.

Faktor lain yang mendorong terjadinya diskresi adalah interaksi langsung antara pelaksana kebijakan pendidikan dan masyarakat. Guru, kepala sekolah, serta pejabat pendidikan di tingkat daerah merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Melalui interaksi tersebut, sering menghadapi berbagai situasi yang memerlukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada. Misalnya, guru mungkin perlu menyesuaikan metode pembelajaran untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, atau sekolah perlu menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

C. Hambatan Struktural dan Kultural

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor, struktur organisasi, serta kondisi sosial budaya yang berbeda di setiap wilayah. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan pendidikan sering kali tidak berjalan sesuai dengan desain awal yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan. Hal

ini disebabkan oleh berbagai faktor penghambat yang muncul selama proses implementasi berlangsung. Secara umum, hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu hambatan struktural dan hambatan kultural. Kedua jenis hambatan ini saling berkaitan dan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan pendidikan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga pada kapasitas organisasi, koordinasi antar lembaga, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Administrasi publik berfungsi sebagai mekanisme yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui pengorganisasian sumber daya, pengelolaan birokrasi, dan koordinasi antar aktor kebijakan. Tanpa sistem administrasi yang efektif, kebijakan pendidikan akan sulit diimplementasikan secara optimal (Mahardhani, 2023; Cairney, 2019).

Implementasi kebijakan pendidikan sering kali menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan interpretasi kebijakan di tingkat lokal, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada kondisi struktural dan kultural yang melingkupinya (Dunn, 2017; Hill & Hupe, 2014).

1. Hambatan Struktural dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Hambatan struktural dalam implementasi kebijakan pendidikan merujuk pada berbagai kendala yang berkaitan dengan sistem organisasi pemerintahan, struktur birokrasi, regulasi, serta ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Hambatan ini sering muncul karena kompleksitas struktur kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta ketidakseimbangan distribusi sumber daya di berbagai daerah. Dalam banyak kasus, kebijakan pendidikan yang dirancang secara nasional menghadapi berbagai tantangan ketika diterapkan di tingkat daerah karena kondisi administratif, ekonomi, dan sosial yang berbeda-beda. Akibatnya, proses implementasi kebijakan pendidikan

sering kali tidak berjalan secara optimal dan menimbulkan kesenjangan dalam kualitas layanan pendidikan.

Salah satu hambatan struktural yang paling umum dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah keterbatasan sumber daya. Kebijakan pendidikan biasanya membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup besar, baik dalam bentuk anggaran, tenaga pendidik yang kompeten, maupun infrastruktur pendidikan yang memadai. Namun dalam kenyataannya, tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam menyediakan sumber daya tersebut. Beberapa daerah memiliki fasilitas pendidikan yang relatif lengkap, sementara daerah lain masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, sarana pembelajaran, serta akses terhadap teknologi pendidikan. Ketimpangan ini menyebabkan implementasi kebijakan pendidikan sering kali menghasilkan hasil yang berbeda di setiap daerah. Daerah yang memiliki sumber daya yang lebih memadai cenderung mampu melaksanakan kebijakan pendidikan secara lebih efektif dibandingkan daerah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik.

Hambatan struktural juga dapat muncul akibat birokrasi yang terlalu hierarkis dan prosedural. Dalam teori birokrasi klasik yang dikemukakan oleh Max Weber (1922), organisasi pemerintahan dirancang dengan struktur yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta sistem aturan yang ketat untuk menjamin efisiensi administrasi publik. Namun dalam praktiknya, struktur birokrasi yang terlalu kaku sering kali justru memperlambat proses pengambilan keputusan dan menghambat inovasi dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian administrasi publik modern juga menunjukkan bahwa birokrasi yang terlalu prosedural dapat mengurangi fleksibilitas organisasi dalam merespons perubahan dan kebutuhan masyarakat (Christopher Pollitt & Geert Bouckaert, 2017).

2. Hambatan Kultural dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor kultural yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, budaya organisasi, serta pola perilaku masyarakat dan birokrasi. Hambatan kultural sering kali lebih sulit diatasi karena berkaitan dengan pola pikir dan kebiasaan yang telah mengakar dalam sistem sosial. Salah satu hambatan kultural yang

sering muncul dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk melakukan reformasi sistem pendidikan, seperti perubahan kurikulum, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran, atau penerapan metode pembelajaran baru. Namun, perubahan tersebut tidak selalu diterima dengan mudah oleh para pelaksana kebijakan di lapangan, terutama jika merasa tidak siap atau tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Resistensi terhadap perubahan sering kali terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Pembuat kebijakan cenderung melihat reformasi pendidikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sementara pelaksana kebijakan di tingkat sekolah mungkin melihatnya sebagai tambahan beban kerja atau perubahan yang sulit diterapkan dalam kondisi yang terbatas. Selain itu, budaya organisasi dalam birokrasi pendidikan juga dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Budaya organisasi yang terlalu birokratis, kurang inovatif, dan cenderung mempertahankan status quo dapat menghambat proses reformasi kebijakan. Dalam situasi seperti ini, pelaksana kebijakan mungkin lebih fokus pada pemenuhan prosedur administratif daripada pada pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri.

Faktor kultural lainnya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses implementasi kebijakan pendidikan. Dalam paradigma tata kelola modern, kebijakan publik seharusnya melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi sosial. Pendekatan ini dikenal sebagai *Governance* kolaboratif, yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah publik (Ansell & Gash, 2008; Sørensen & Torfing, 2017).

D. Adaptasi Lokal terhadap Kebijakan Nasional

Implementasi kebijakan pendidikan pada dasarnya tidak berlangsung dalam ruang yang seragam. Setiap wilayah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang berbeda

sehingga kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional sering kali memerlukan penyesuaian ketika diterapkan di tingkat daerah. Oleh karena itu, adaptasi lokal terhadap kebijakan nasional menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pada perspektif kebijakan publik, proses adaptasi lokal menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak bersifat mekanis, melainkan merupakan proses dinamis yang melibatkan interpretasi, negosiasi, serta penyesuaian oleh para aktor di tingkat lokal. Kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat biasanya bersifat umum dan memberikan kerangka kerja normatif bagi pelaksanaan kebijakan di daerah. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi lokal yang ada.

Menurut Cairney (2019), kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi masyarakat. Proses kebijakan tersebut melibatkan berbagai tahapan mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Dalam proses implementasi, kebijakan sering mengalami modifikasi atau penyesuaian karena adanya perbedaan kondisi di tingkat lokal.

Pada konteks kebijakan pendidikan, adaptasi lokal menjadi sangat penting karena sistem pendidikan melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Setiap aktor memiliki kepentingan, pengalaman, dan kapasitas yang berbeda dalam melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan tidak dapat dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi lokal yang beragam.

1. Konsep Adaptasi Lokal dalam Implementasi Kebijakan

Konsep adaptasi lokal dalam implementasi kebijakan merujuk pada proses penyesuaian kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional agar sesuai dengan kondisi nyata di daerah. Dalam praktik administrasi

publik, kebijakan yang dirancang oleh pemerintah pusat biasanya bersifat umum dan berlaku secara nasional. Namun setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah sering memerlukan penyesuaian agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Adaptasi lokal menjadi mekanisme penting yang memungkinkan kebijakan nasional tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah yang memiliki kondisi yang berbeda.

Pada sistem pemerintahan yang menganut prinsip desentralisasi, seperti di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan turunan atau program daerah yang mendukung pelaksanaan kebijakan nasional. Dengan adanya kewenangan ini, pemerintah daerah dapat merancang program pendidikan yang lebih sesuai dengan kondisi dan prioritas pembangunan di wilayahnya. Hal ini penting karena permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh setiap daerah sering kali berbeda, misalnya terkait akses pendidikan, kualitas tenaga pendidik, atau ketersediaan fasilitas pendidikan.

Adaptasi lokal dalam kebijakan pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme. Salah satu bentuk adaptasi adalah penyesuaian program pendidikan agar sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Misalnya, daerah yang memiliki karakteristik geografis terpencil mungkin perlu mengembangkan model pembelajaran yang lebih fleksibel atau berbasis komunitas agar layanan pendidikan tetap dapat menjangkau peserta didik. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat melakukan penyesuaian dalam pengalokasian sumber daya pendidikan, seperti distribusi tenaga pendidik, pengembangan fasilitas sekolah, serta penggunaan anggaran pendidikan yang lebih tepat sasaran. Melalui penyesuaian tersebut, kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan mampu mengatasi berbagai permasalahan pendidikan yang spesifik di setiap daerah.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Adaptasi Lokal

Proses adaptasi lokal terhadap kebijakan nasional dalam bidang pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Adaptasi lokal tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat struktural, seperti kapasitas institusi pemerintah daerah dan ketersediaan sumber daya pendidikan, maupun bersifat kultural, seperti nilai-nilai sosial, budaya lokal, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Interaksi antara berbagai faktor ini menentukan sejauh mana kebijakan pendidikan nasional dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses adaptasi lokal adalah kapasitas institusi pemerintah daerah. Kapasitas institusi mencakup kemampuan administratif, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas sistem pengelolaan pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki aparatur yang kompeten, sistem perencanaan yang baik, serta kemampuan manajerial yang kuat cenderung lebih mampu mengadaptasi kebijakan nasional ke dalam kebijakan dan program pendidikan di tingkat lokal, dapat menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan. Sebaliknya, daerah yang memiliki kapasitas administratif yang terbatas sering mengalami kesulitan dalam memahami, menafsirkan, dan melaksanakan kebijakan nasional secara efektif.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi adaptasi lokal adalah ketersediaan sumber daya pendidikan di daerah. Sumber daya ini mencakup berbagai aspek penting seperti jumlah dan kualitas tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas pendidikan, anggaran pendidikan, serta akses terhadap teknologi pembelajaran. Ketimpangan sumber daya antar daerah merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan. Beberapa daerah memiliki infrastruktur pendidikan yang relatif lengkap, seperti gedung sekolah yang memadai,

fasilitas laboratorium, serta akses internet yang baik. Namun di daerah lain, terutama di wilayah terpencil, fasilitas pendidikan sering kali masih terbatas dan jumlah tenaga pendidik yang tersedia juga tidak mencukupi. Kondisi ini menyebabkan kemampuan daerah dalam mengadaptasi dan melaksanakan kebijakan pendidikan menjadi tidak merata.

Faktor sosial dan budaya juga berperan penting dalam proses adaptasi kebijakan pendidikan di tingkat lokal. Nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat, pola hubungan sosial, serta sikap masyarakat terhadap pendidikan dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan pendidikan diterima dan dilaksanakan. Setiap daerah memiliki karakteristik budaya yang berbeda, sehingga pendekatan implementasi kebijakan pendidikan sering kali perlu disesuaikan dengan konteks sosial yang ada. Misalnya, dalam masyarakat yang memiliki tradisi gotong royong dan solidaritas komunitas yang kuat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan biasanya lebih tinggi.

E. Implementasi dan Kualitas Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dirancang secara baik tidak akan memberikan dampak yang signifikan apabila proses implementasinya tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan dapat dipandang sebagai tahap krusial yang menentukan apakah tujuan kebijakan pendidikan dapat tercapai atau tidak. Dalam konteks administrasi publik, implementasi kebijakan merupakan proses operasional yang menghubungkan antara keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah dengan realitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat.

Kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengatur serta mempengaruhi sistem pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, pembiayaan pendidikan, pengelolaan tenaga pendidik, infrastruktur pendidikan, serta sistem evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, kualitas pendidikan

yang dihasilkan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan dalam praktik pendidikan sehari-hari (Mahardhani, 2023).

Pada perspektif kebijakan publik, implementasi merupakan tahap yang sering kali paling kompleks dalam siklus kebijakan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, lembaga, serta sumber daya yang harus bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut Dunn (2017), implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga mencakup proses koordinasi, pengawasan, serta evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat .

1. Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Kualitas Pendidikan

Hubungan antara implementasi kebijakan dan kualitas pendidikan merupakan aspek penting dalam kajian administrasi publik dan kebijakan pendidikan. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Dalam sistem pendidikan, berbagai faktor seperti kualitas guru, kurikulum yang digunakan, ketersediaan fasilitas pendidikan, serta sistem manajemen sekolah memang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Namun, faktor yang sering menjadi penentu utama adalah efektivitas implementasi kebijakan pendidikan di tingkat sekolah dan daerah. Kebijakan pendidikan yang dirancang secara baik tidak akan memberikan dampak yang signifikan apabila tidak diimplementasikan secara konsisten dan efektif oleh para pelaksana kebijakan di lapangan.

Salah satu cara implementasi kebijakan mempengaruhi kualitas pendidikan adalah melalui penerapan standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah biasanya menetapkan berbagai standar pendidikan nasional yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan keseragaman sistem pendidikan. Standar tersebut meliputi standar kurikulum, standar kompetensi guru, standar sarana dan prasarana pendidikan, serta standar penilaian dan evaluasi pembelajaran. Implementasi kebijakan yang efektif memastikan bahwa standar-standar tersebut benar-benar diterapkan oleh lembaga pendidikan di berbagai

daerah. Apabila standar pendidikan dilaksanakan dengan baik, proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih terarah dan sistematis, sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik.

Implementasi kebijakan juga berperan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya pendidikan. Dalam perspektif administrasi publik, pengelolaan sumber daya merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam menjalankan kebijakan pendidikan. Administrasi publik dapat dipahami sebagai mekanisme yang menjalankan kebijakan pemerintah melalui pengorganisasian sumber daya serta koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pelayanan publik. Melalui sistem administrasi yang baik, sumber daya pendidikan seperti tenaga pendidik, anggaran pendidikan, serta fasilitas pembelajaran dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien. Pengelolaan sumber daya yang optimal memungkinkan sekolah dan lembaga pendidikan untuk menyediakan lingkungan belajar yang lebih mendukung bagi peserta didik.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kualitas implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam sistem pendidikan. Implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, tetapi juga pada kemampuan lembaga pendidikan dan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan tersebut secara efektif. Dalam praktik administrasi publik, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti kapasitas institusi pendidikan, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya pendidikan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Keempat faktor ini saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana kebijakan pendidikan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Salah satu faktor yang paling penting dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah kapasitas institusi pendidikan. Sekolah sebagai lembaga utama yang melaksanakan kebijakan pendidikan harus memiliki sistem manajemen yang baik agar berbagai program pendidikan dapat berjalan secara efektif. Kapasitas institusi mencakup

kemampuan manajerial kepala sekolah, sistem administrasi yang tertata dengan baik, serta mekanisme koordinasi yang efektif antara berbagai unsur di dalam sekolah. Manajemen sekolah yang profesional dapat membantu mengoordinasikan berbagai kegiatan pendidikan, seperti pengelolaan kurikulum, pengembangan kompetensi guru, pengelolaan kegiatan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar siswa. Dengan manajemen yang baik, kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat diterjemahkan ke dalam program sekolah yang lebih terarah dan sistematis.

Kualitas tenaga pendidik juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Guru merupakan aktor utama dalam sistem pendidikan karena berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, keberhasilan berbagai kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menerapkan kebijakan tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pendidikan, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan profesional guru. Program pelatihan pedagogik, peningkatan kompetensi akademik, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa guru memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan pendidikan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya pendidikan. Sumber daya pendidikan mencakup berbagai aspek seperti anggaran pendidikan, fasilitas sekolah, teknologi pembelajaran, serta bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kebijakan pendidikan yang dirancang dengan baik sering kali memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat dilaksanakan secara optimal. Tanpa dukungan fasilitas yang cukup, tenaga pendidik yang memadai, serta anggaran pendidikan yang memadai, pelaksanaan kebijakan pendidikan dapat mengalami berbagai kendala. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa distribusi sumber daya pendidikan dilakukan secara adil dan merata agar semua lembaga pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

BAB X

EVALUASI DAN FRAGMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Evaluasi dan fragmentasi kebijakan pendidikan merupakan dua aspek penting dalam memahami bagaimana kebijakan pendidikan dirancang, dilaksanakan, dan dinilai keberhasilannya dalam sistem pemerintahan. Evaluasi kebijakan pendidikan bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak kebijakan terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Sementara itu, fragmentasi kebijakan merujuk pada kondisi ketika kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan tersebar di berbagai lembaga atau aktor yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan masalah koordinasi dalam implementasi kebijakan. Menurut Dunn (2018), evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk menilai nilai dan manfaat suatu kebijakan berdasarkan kriteria tertentu seperti efektivitas, efisiensi, dan dampak sosial. Dalam konteks pendidikan, evaluasi menjadi penting karena kebijakan pendidikan melibatkan banyak aktor serta tingkat pemerintahan yang berbeda, sehingga diperlukan mekanisme evaluasi yang mampu memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kompleksitas hubungan antaraktor dalam sistem pemerintahan juga dapat menyebabkan fragmentasi kebijakan yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang kuat agar kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

A. Model Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan yang berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks pendidikan, evaluasi

kebijakan sangat diperlukan karena kebijakan pendidikan menyangkut pembangunan sumber daya manusia, kualitas pembelajaran, serta pemerataan akses pendidikan. Tanpa evaluasi yang sistematis, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menilai efektivitas program pendidikan yang telah dijalankan serta menentukan langkah perbaikan kebijakan di masa depan.

Secara konseptual, evaluasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai proses analisis yang dilakukan secara sistematis untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan kriteria tertentu seperti efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak sosial. Menurut Dunn (2018), evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menentukan nilai suatu kebijakan dengan menggunakan standar atau indikator tertentu guna mengetahui apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya, karena hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki, melanjutkan, atau bahkan menghentikan suatu kebijakan.

Pada administrasi publik, evaluasi kebijakan juga dipandang sebagai mekanisme akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks pendidikan, evaluasi kebijakan dapat membantu pemerintah menilai keberhasilan program-program seperti peningkatan kualitas guru, reformasi kurikulum, perluasan akses pendidikan, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

Pada perspektif kebijakan pendidikan, evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir kebijakan tetapi juga proses pelaksanaannya. Implementasi kebijakan pendidikan sering kali melibatkan banyak aktor seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, guru, dan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian administrasi publik, implementasi kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dinamika kelembagaan dan interaksi antaraktor dalam sistem pemerintahan. Kebijakan pendidikan sering kali

mengalami perubahan atau penyesuaian ketika diterapkan dalam konteks lokal yang berbeda-beda.

1. Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kajian administrasi publik, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran keberhasilan suatu kebijakan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kebijakan di masa mendatang. Melalui proses evaluasi, pemerintah dapat memperoleh informasi yang objektif mengenai dampak kebijakan, efektivitas implementasi, serta berbagai kendala yang muncul selama proses pelaksanaan kebijakan.

Salah satu tujuan utama evaluasi kebijakan publik adalah untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap kebijakan publik dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu atau mencapai tujuan pembangunan tertentu. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang diharapkan. Dalam proses ini, evaluasi biasanya menggunakan berbagai indikator kinerja yang dapat menggambarkan sejauh mana kebijakan tersebut memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan kebijakan telah tercapai, maka kebijakan tersebut dapat dianggap efektif. Sebaliknya, jika tujuan kebijakan belum tercapai, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.

Tujuan kedua dari evaluasi kebijakan publik adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Dalam praktik implementasi kebijakan, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan, seperti kapasitas institusi pemerintah, ketersediaan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta tingkat partisipasi masyarakat. Melalui evaluasi yang sistematis, pemerintah dapat mengetahui faktor-faktor mana yang mendukung keberhasilan kebijakan dan faktor mana yang justru menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Informasi ini sangat penting

sebagai dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam proses implementasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan bagi kebijakan yang sedang berjalan. Kebijakan publik sering kali memerlukan penyesuaian karena kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Hasil evaluasi dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki desain kebijakan, menyempurnakan mekanisme implementasi, atau bahkan merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif. Dengan demikian, evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik secara berkelanjutan.

2. Model-model Evaluasi Kebijakan Publik

Pada studi kebijakan publik, evaluasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan berbagai model analisis yang dikembangkan oleh para ahli untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan secara sistematis. Model-model evaluasi ini memberikan kerangka konseptual yang membantu peneliti maupun pembuat kebijakan dalam memahami bagaimana suatu kebijakan bekerja, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuannya, serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Setiap model evaluasi memiliki fokus analisis yang berbeda, mulai dari penilaian terhadap pencapaian tujuan, proses pelaksanaan kebijakan, dampak jangka panjang kebijakan, hingga keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi.

Salah satu model evaluasi yang paling umum digunakan adalah model evaluasi berbasis tujuan (*goal-oriented evaluation*). Model ini menilai keberhasilan kebijakan berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan ini banyak digunakan karena relatif sederhana dan mudah diterapkan dalam berbagai program kebijakan. Menurut Ralph W. Tyler (2013), evaluasi berbasis tujuan menekankan pentingnya kesesuaian antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks pendidikan, model ini sering digunakan untuk menilai keberhasilan berbagai program pendidikan seperti peningkatan angka partisipasi sekolah, peningkatan hasil belajar

siswa, atau peningkatan kualitas guru. Misalnya, kebijakan wajib belajar dapat dievaluasi dengan melihat indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat kelulusan, serta penurunan angka putus sekolah. Namun demikian, model ini memiliki keterbatasan karena cenderung hanya berfokus pada hasil akhir tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap proses implementasi kebijakan.

Model kedua adalah evaluasi proses (*Process Evaluation*), yang berfokus pada bagaimana kebijakan dilaksanakan di lapangan. Pendekatan ini menilai apakah prosedur, mekanisme, serta kegiatan implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Peter H. Rossi, Mark W. Lipsey, dan Howard E. Freeman (2019), evaluasi proses sangat penting untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, seperti kapasitas organisasi, koordinasi antar lembaga, serta ketersediaan sumber daya. Dalam kebijakan pendidikan, evaluasi proses dapat dilakukan dengan menilai bagaimana kurikulum diterapkan oleh guru, bagaimana pemerintah daerah mengelola program pendidikan, serta bagaimana sekolah melaksanakan berbagai kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan.

Model berikutnya adalah evaluasi dampak (*impact evaluation*), yang bertujuan untuk menilai pengaruh jangka panjang suatu kebijakan terhadap masyarakat. Evaluasi ini biasanya dilakukan setelah kebijakan berjalan dalam jangka waktu tertentu sehingga dampaknya dapat diukur secara lebih komprehensif. Menurut Paul J. Gertler dan rekan-rekannya (2016), evaluasi dampak digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi sebagai akibat langsung dari suatu kebijakan atau program. Metode evaluasi ini sering menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif atau eksperimen sosial untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Dalam kebijakan pendidikan, evaluasi dampak dapat menilai pengaruh kebijakan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, peluang kerja lulusan, serta mobilitas sosial masyarakat.

3. Pentingnya Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sistem pendidikan secara berkelanjutan. Dalam siklus kebijakan publik, evaluasi berfungsi sebagai

mekanisme untuk menilai apakah kebijakan yang telah dirancang dan diimplementasikan benar-benar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan pendidikan biasanya dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan, serta menciptakan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti tanpa adanya proses evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pendidikan menjadi alat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa berbagai program pendidikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan evaluasi kebijakan pendidikan, pemerintah dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi memungkinkan pemerintah untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari segi peningkatan hasil belajar siswa, peningkatan kompetensi guru, maupun peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. Dengan adanya data dan informasi yang diperoleh dari proses evaluasi, pemerintah dapat mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan rencana atau masih memerlukan perbaikan. Informasi ini sangat penting sebagai dasar bagi pengambilan keputusan dalam pengembangan kebijakan pendidikan di masa depan.

Evaluasi juga berperan penting dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul selama proses implementasi kebijakan pendidikan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan pendidikan sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, serta lemahnya koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem pendidikan. Melalui evaluasi yang komprehensif, pemerintah dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan memahami berbagai kendala yang ada, pemerintah dapat merumuskan strategi perbaikan yang lebih tepat untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan.

Evaluasi kebijakan pendidikan juga menjadi semakin penting dalam konteks reformasi dan desentralisasi pendidikan. Dalam sistem pendidikan yang terdesentralisasi, kewenangan pengelolaan pendidikan tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan

pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kondisi ini menyebabkan sistem pendidikan menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai aktor dengan tanggung jawab dan kewenangan yang berbeda. Tanpa adanya mekanisme evaluasi yang kuat, pelaksanaan kebijakan pendidikan dapat mengalami fragmentasi atau ketidaksinambungan antara kebijakan di tingkat pusat dan pelaksanaannya di tingkat daerah.

B. Fragmentasi dan Koordinasi Antar Aktor

Pada proses kebijakan publik, implementasi dan evaluasi kebijakan tidak pernah berlangsung dalam ruang yang sederhana. Kebijakan publik selalu melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran, kepentingan, serta kewenangan yang berbeda. Dalam sektor pendidikan, kompleksitas ini semakin terlihat karena sistem pendidikan melibatkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta sektor swasta. Kondisi ini sering menimbulkan fenomena yang disebut sebagai fragmentasi kebijakan, yaitu keadaan ketika kewenangan, tanggung jawab, dan proses pengambilan keputusan tersebar di berbagai lembaga atau aktor yang berbeda tanpa koordinasi yang efektif.

Fragmentasi kebijakan dapat berdampak pada kurangnya konsistensi dalam implementasi kebijakan pendidikan. Ketika berbagai lembaga menjalankan kebijakan yang berbeda atau tidak terkoordinasi dengan baik, tujuan kebijakan yang telah dirumuskan dapat sulit dicapai secara optimal. Oleh karena itu, koordinasi antaraktor menjadi faktor yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan pendidikan.

1. Konsep Fragmentasi Kebijakan

Konsep fragmentasi kebijakan merujuk pada kondisi ketika proses perumusan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan tersebar di berbagai lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan berbeda. Dalam konteks administrasi publik modern, fragmentasi merupakan fenomena yang cukup umum karena sistem pemerintahan saat ini melibatkan banyak aktor dan institusi dalam pengelolaan

kebijakan publik. Berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu bidang kebijakan. Kondisi ini dapat memberikan keuntungan berupa pembagian tugas yang lebih spesifik, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi dan konsistensi kebijakan.

Menurut B. Guy Peters (2018), fragmentasi kebijakan merupakan konsekuensi dari struktur pemerintahan modern yang kompleks dan melibatkan banyak institusi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan terdesentralisasi, kewenangan pemerintah tidak hanya terpusat pada satu lembaga, melainkan dibagi ke berbagai institusi yang memiliki fungsi dan tanggung jawab tertentu. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, pada saat yang sama, pembagian kewenangan tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam proses kebijakan apabila tidak disertai dengan mekanisme koordinasi yang kuat.

Fragmentasi kebijakan dapat terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Fragmentasi horizontal terjadi ketika beberapa lembaga pemerintah pada tingkat pemerintahan yang sama memiliki kewenangan dalam suatu bidang kebijakan tertentu. Misalnya, dalam suatu sektor kebijakan, beberapa kementerian atau lembaga pemerintah dapat memiliki tanggung jawab yang saling berkaitan. Jika koordinasi antar lembaga tersebut tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi tidak sinkron atau bahkan saling tumpang tindih. Sementara itu, fragmentasi vertikal terjadi ketika kewenangan kebijakan tersebar di berbagai tingkat pemerintahan, seperti antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lokal lainnya. Dalam sistem pemerintahan yang menerapkan desentralisasi atau otonomi daerah, pembagian kewenangan secara vertikal ini merupakan hal yang umum terjadi.

Pada sektor pendidikan, fragmentasi kebijakan sering muncul karena pengelolaan pendidikan melibatkan berbagai tingkat pemerintahan yang memiliki tanggung jawab berbeda. Pemerintah pusat

biasanya memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional, seperti penetapan kurikulum nasional, standar pendidikan, serta kebijakan pendanaan pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseragaman standar pendidikan di seluruh wilayah negara. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal. Tugas pemerintah daerah biasanya mencakup pengelolaan sekolah, distribusi tenaga pendidik, pengelolaan fasilitas pendidikan, serta pengembangan berbagai program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Fragmentasi dalam Kebijakan Pendidikan

Fragmentasi dalam kebijakan pendidikan merupakan fenomena yang sering terjadi karena sistem pendidikan melibatkan banyak aktor dengan peran dan kewenangan yang berbeda. Dalam praktik administrasi publik, kebijakan pendidikan tidak hanya dirancang dan dilaksanakan oleh satu lembaga saja, melainkan melibatkan berbagai institusi yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Keberagaman aktor ini mencerminkan kompleksitas sistem pendidikan modern yang menuntut adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, serta sektor swasta. Meskipun keterlibatan berbagai pihak dapat memperkaya proses pengembangan pendidikan, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan fragmentasi apabila koordinasi antaraktor tidak berjalan dengan baik.

Pada sistem pendidikan, terdapat beberapa aktor utama yang memiliki peran penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pemerintah pusat biasanya bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional, termasuk menetapkan kurikulum, standar pendidikan, serta kebijakan pendanaan. Peran pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan memiliki standar yang sama di seluruh wilayah negara. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola implementasi kebijakan pendidikan di wilayahnya. Pemerintah daerah berperan dalam mengelola sekolah, mengatur distribusi guru, menyediakan fasilitas pendidikan, serta mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas juga merupakan aktor penting dalam sistem pendidikan. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan pendidikan sehari-hari, termasuk proses pembelajaran, pengelolaan kurikulum di tingkat sekolah, serta pembinaan peserta didik. Lembaga pendidikan merupakan pihak yang secara langsung menerjemahkan kebijakan pendidikan menjadi praktik pembelajaran di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kapasitas lembaga pendidikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif.

Aktor lain yang turut berperan dalam sistem pendidikan adalah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Organisasi-organisasi ini sering terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan pendidikan, seperti program pemberdayaan masyarakat, penyediaan beasiswa, atau kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran. Selain itu, sektor swasta juga memiliki peran yang cukup signifikan melalui penyediaan layanan pendidikan alternatif, seperti sekolah swasta, lembaga pelatihan, serta berbagai program pendidikan nonformal. Keterlibatan sektor swasta dapat membantu memperluas akses pendidikan serta memberikan pilihan layanan pendidikan yang lebih beragam bagi masyarakat.

3. Pentingnya Koordinasi Antar Aktor

Koordinasi antaraktor merupakan proses penting dalam pelaksanaan kebijakan publik karena melibatkan upaya untuk menyelaraskan tindakan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam suatu kebijakan. Dalam sistem pemerintahan modern, kebijakan publik jarang dilaksanakan oleh satu lembaga saja. Sebaliknya, kebijakan biasanya melibatkan berbagai institusi pemerintah, organisasi masyarakat, serta aktor nonpemerintah lainnya. Oleh karena itu, koordinasi menjadi mekanisme yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat bekerja secara terpadu dalam mencapai tujuan kebijakan yang sama. Tanpa koordinasi yang baik, berbagai aktor yang terlibat dalam kebijakan publik dapat bekerja secara terpisah atau bahkan saling bertentangan, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan tersebut.

Pada sektor pendidikan, koordinasi antaraktor memiliki peran yang sangat penting karena sistem pendidikan melibatkan berbagai lembaga dengan fungsi yang berbeda. Pemerintah pusat biasanya memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional, menetapkan standar pendidikan, serta mengatur sistem pendanaan pendidikan. Sementara itu, pemerintah daerah bertugas mengelola pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal, termasuk pengelolaan sekolah, distribusi tenaga pendidik, serta penyediaan fasilitas pendidikan. Selain kedua aktor tersebut, lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas juga memiliki peran penting dalam melaksanakan proses pembelajaran serta menerapkan berbagai kebijakan pendidikan dalam praktik sehari-hari. Di samping itu, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta juga sering terlibat dalam berbagai program pengembangan pendidikan. Keberagaman aktor ini membuat koordinasi menjadi sangat penting agar seluruh pihak dapat bekerja secara harmonis dan saling mendukung.

Menurut Michael Howlett dan M. Ramesh (2018), koordinasi kebijakan publik diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta memastikan bahwa berbagai program pemerintah dapat berjalan secara terpadu. Tanpa adanya koordinasi yang baik, berbagai lembaga pemerintah mungkin merancang program yang memiliki tujuan serupa tetapi dilaksanakan secara terpisah, sehingga menimbulkan pemborosan sumber daya dan menurunkan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, koordinasi merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan efisien.

Koordinasi antaraktor dalam kebijakan pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme. Salah satu bentuk koordinasi adalah koordinasi administratif, yaitu koordinasi yang dilakukan melalui struktur birokrasi pemerintahan yang jelas dan terorganisasi. Dalam mekanisme ini, setiap lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan secara formal sehingga proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara teratur. Selain itu, terdapat pula koordinasi kebijakan yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang berbeda agar tidak terjadi konflik atau ketidaksesuaian kebijakan.

C. Ketimpangan Akses dan Mutu Pendidikan

Ketimpangan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu permasalahan utama dalam sistem pendidikan di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Meskipun berbagai kebijakan pendidikan telah dirancang untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kelompok masyarakat tertentu, wilayah geografis, serta lembaga pendidikan yang berbeda. Ketimpangan ini tidak hanya berkaitan dengan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga menyangkut kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik.

Pada perspektif kebijakan publik, ketimpangan pendidikan merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan pendidikan suatu negara. Kebijakan pendidikan yang efektif tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis.

Menurut UNESCO (2022), ketimpangan pendidikan dapat terjadi karena berbagai faktor struktural seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur pendidikan, perbedaan kualitas tenaga pendidik, serta kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dirancang secara inklusif agar mampu mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

1. Konsep Akses Pendidikan

Konsep akses pendidikan merujuk pada kesempatan yang dimiliki oleh setiap individu untuk memperoleh layanan pendidikan secara adil dan merata. Dalam perspektif kebijakan publik, akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan lembaga pendidikan seperti sekolah atau universitas, tetapi juga mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengikuti proses pendidikan. Faktor-faktor tersebut meliputi biaya pendidikan, jarak antara tempat tinggal dan sekolah, ketersediaan

fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta dukungan sosial dan ekonomi dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Dengan demikian, akses pendidikan dapat dipahami sebagai kondisi yang memungkinkan setiap individu memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa menghadapi hambatan yang signifikan.

Di banyak negara berkembang, permasalahan akses pendidikan sering kali berkaitan dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang belum merata. Wilayah terpencil atau daerah pedesaan sering menghadapi keterbatasan dalam hal ketersediaan sarana pendidikan. Jumlah sekolah di daerah tersebut biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah perkotaan, sehingga jarak yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk mencapai sekolah menjadi lebih jauh. Selain itu, daerah terpencil juga sering mengalami kekurangan tenaga pendidik serta fasilitas pembelajaran yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, atau teknologi pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan anak-anak yang tinggal di daerah terpencil memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur pendidikan lebih lengkap.

Kondisi ekonomi keluarga juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi akses pendidikan. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pendidikan. Hambatan tersebut dapat berupa biaya pendidikan yang harus dikeluarkan untuk membayar uang sekolah, membeli buku pelajaran, atau memenuhi kebutuhan perlengkapan belajar lainnya. Selain itu, biaya transportasi menuju sekolah juga dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam beberapa kasus, anak-anak dari keluarga kurang mampu juga harus membantu orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga waktu untuk mengikuti pendidikan menjadi terbatas. Kondisi ini sering menyebabkan sebagian anak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada kajian administrasi publik, pemerataan akses pendidikan merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan pendidikan yang dirumuskan oleh pemerintah. Pendidikan dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara yang harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat

tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Oleh karena itu, pemerintah biasanya merancang berbagai kebijakan untuk memperluas akses pendidikan, seperti pembangunan sekolah di daerah terpencil, pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta pengembangan program pendidikan berbasis teknologi untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau secara fisik.

2. Ketimpangan Mutu Pendidikan

Ketimpangan mutu pendidikan merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem pendidikan di banyak negara. Mutu pendidikan berkaitan dengan kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, yang mencakup berbagai aspek seperti kompetensi guru, kurikulum yang digunakan, fasilitas pendidikan, metode pembelajaran, serta lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik. Pendidikan yang bermutu tidak hanya dilihat dari keberhasilan siswa dalam menyelesaikan pendidikan, tetapi juga dari kemampuan sistem pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang baik. Namun dalam praktiknya, kualitas pendidikan sering kali tidak merata di berbagai wilayah, sehingga muncul ketimpangan mutu pendidikan antara kelompok masyarakat yang berbeda.

Salah satu bentuk ketimpangan mutu pendidikan yang paling sering terlihat adalah perbedaan kualitas sekolah antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Sekolah yang berada di wilayah perkotaan umumnya memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan memadai. Fasilitas tersebut dapat berupa laboratorium sains, perpustakaan dengan koleksi buku yang lebih banyak, ruang kelas yang lebih nyaman, serta akses terhadap teknologi pendidikan seperti komputer dan internet. Lingkungan perkotaan juga biasanya menyediakan akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber belajar, seperti pusat pendidikan tambahan, lembaga kursus, serta kegiatan pengembangan akademik lainnya. Kondisi ini memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa di kota untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih berkualitas.

Sekolah di daerah perkotaan juga cenderung memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Banyak guru di kota yang

memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik serta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti pelatihan profesional dan pengembangan kompetensi. Hal ini disebabkan oleh tersedianya berbagai lembaga pendidikan tinggi serta program pelatihan guru yang lebih mudah diakses di wilayah perkotaan. Dengan adanya guru yang memiliki kompetensi profesional yang baik, proses pembelajaran di sekolah dapat berlangsung secara lebih efektif dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa.

Sekolah yang berada di daerah pedesaan atau wilayah terpencil sering menghadapi berbagai keterbatasan yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Keterbatasan tersebut dapat berupa kurangnya fasilitas pendidikan, jumlah guru yang tidak mencukupi, serta minimnya akses terhadap teknologi pendidikan. Dalam beberapa kasus, satu guru bahkan harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus karena keterbatasan tenaga pendidik. Kondisi ini tentu dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran yang diterima oleh siswa. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti akses transportasi dan jaringan internet juga dapat menghambat pengembangan metode pembelajaran yang lebih modern dan inovatif.

3. Faktor Penyebab Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan pendidikan, baik dalam hal akses maupun mutu, merupakan permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural serta kebijakan yang ada dalam sistem pendidikan. Ketimpangan ini tidak muncul secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai kondisi sosial, ekonomi, geografis, serta kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dalam banyak negara, termasuk negara berkembang, perbedaan kondisi antarwilayah dan kelompok sosial sering menyebabkan sebagian masyarakat memiliki peluang pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan pendidikan adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga sangat mempengaruhi kemampuan anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Keluarga dengan tingkat pendapatan yang rendah sering

menghadapi berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Biaya pendidikan seperti uang sekolah, buku pelajaran, seragam, serta biaya transportasi dapat menjadi beban yang cukup besar bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, dalam beberapa kasus anak-anak dari keluarga miskin juga harus membantu orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga memiliki waktu yang terbatas untuk mengikuti kegiatan belajar. Kondisi ini menyebabkan banyak anak dari keluarga kurang mampu tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga memperbesar kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat.

Faktor geografis juga menjadi penyebab penting ketimpangan pendidikan. Wilayah yang terpencil atau sulit dijangkau sering mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur pendidikan. Jumlah sekolah di daerah tersebut biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan daerah perkotaan, sehingga siswa harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai sekolah. Selain itu, daerah terpencil juga sering mengalami kekurangan tenaga pengajar serta fasilitas pendidikan yang memadai. Kondisi geografis yang sulit, seperti wilayah pegunungan atau daerah yang terpisah oleh laut, juga dapat menghambat distribusi sumber daya pendidikan. Akibatnya, akses pendidikan di daerah tersebut menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan wilayah yang memiliki infrastruktur yang lebih baik.

Faktor lain yang turut mempengaruhi ketimpangan pendidikan adalah keterbatasan sumber daya pendidikan. Sumber daya pendidikan mencakup berbagai aspek seperti jumlah dan kualitas guru, fasilitas sekolah, bahan ajar, serta teknologi pembelajaran. Sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan tenaga pendidik yang berkualitas biasanya mampu menyediakan proses pembelajaran yang lebih efektif. Sebaliknya, sekolah yang kekurangan sumber daya sering menghadapi kesulitan dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal kepada siswa. Keterbatasan fasilitas seperti ruang kelas yang tidak memadai, kurangnya laboratorium atau perpustakaan, serta minimnya akses terhadap teknologi pendidikan dapat menghambat proses pembelajaran dan mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

D. Dampak Kebijakan terhadap Guru dan Peserta Didik

Kebijakan pendidikan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai komponen dalam sistem pendidikan, terutama guru dan peserta didik sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Setiap kebijakan yang dirancang oleh pemerintah, baik yang berkaitan dengan kurikulum, manajemen sekolah, sistem evaluasi pendidikan, maupun pengembangan profesional guru, akan mempengaruhi bagaimana proses pendidikan berlangsung di dalam kelas. Oleh karena itu, dalam evaluasi kebijakan pendidikan penting untuk menilai bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap kondisi kerja guru, kualitas pembelajaran, serta pengalaman belajar peserta didik.

Pada perspektif kebijakan publik, guru dan peserta didik merupakan kelompok sasaran utama dari kebijakan pendidikan. Kebijakan yang efektif seharusnya mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, mendukung profesionalitas guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan peserta didik. Namun dalam praktiknya, tidak semua kebijakan pendidikan memberikan dampak yang positif. Beberapa kebijakan justru dapat menimbulkan berbagai tantangan baru dalam proses pembelajaran jika tidak dirancang dan diimplementasikan secara tepat.

1. Dampak Kebijakan terhadap Guru

Guru merupakan salah satu komponen paling penting dalam keberhasilan sistem pendidikan karena berperan langsung dalam proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi, motivasi, serta kondisi kerja guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan profesional guru, kesejahteraan tenaga pendidik, serta sistem penilaian kinerja guru memiliki dampak yang sangat besar terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Kebijakan pendidikan yang dirancang oleh pemerintah tidak hanya mempengaruhi struktur sistem pendidikan, tetapi juga mempengaruhi bagaimana guru bekerja, berinteraksi dengan siswa, serta mengembangkan metode pembelajaran di dalam kelas.

Salah satu bentuk kebijakan yang banyak diterapkan di berbagai negara adalah program peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kompetensi guru biasanya mencakup kemampuan pedagogik, profesional, sosial, serta kepribadian yang diperlukan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Melalui pelatihan dan sertifikasi, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan yang terus berkembang. Program pelatihan juga memberikan kesempatan bagi guru untuk memperbarui pengetahuannya, mempelajari metode pembelajaran yang lebih inovatif, serta menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan siswa yang semakin beragam.

Menurut Linda Darling-Hammond (2021), peningkatan kualitas guru melalui pelatihan profesional yang berkelanjutan merupakan salah satu strategi paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru yang memperoleh pelatihan secara terus-menerus cenderung lebih mampu mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selain itu, juga lebih siap untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan belajar peserta didik yang semakin kompleks. Dengan demikian, kebijakan yang berfokus pada pengembangan profesional guru dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Kebijakan pendidikan juga dapat mempengaruhi kondisi kerja guru secara langsung. Kebijakan yang berkaitan dengan beban kerja, sistem evaluasi kinerja, serta kesejahteraan guru memiliki pengaruh besar terhadap motivasi dan kinerja. Guru yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung, memiliki beban kerja yang seimbang, serta memperoleh penghargaan yang layak atas pekerjaannya cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan juga dapat membantu guru untuk lebih fokus pada pengembangan kegiatan pembelajaran yang berkualitas.

2. Dampak Kebijakan terhadap Peserta Didik

Peserta didik merupakan pihak yang paling langsung merasakan dampak dari berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum, metode pembelajaran, sistem evaluasi, serta lingkungan sekolah akan mempengaruhi pengalaman belajar siswa selama menjalani proses pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan tidak hanya menentukan bagaimana sistem pendidikan dikelola, tetapi juga mempengaruhi perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Dampak kebijakan pendidikan terhadap siswa dapat terlihat dari perubahan dalam akses pendidikan, kualitas proses pembelajaran, serta kondisi psikologis yang dialami selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Salah satu dampak utama kebijakan pendidikan terhadap peserta didik adalah perubahan dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum merupakan kerangka dasar yang mengatur tujuan pendidikan, materi pelajaran yang diajarkan, serta metode evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Ketika pemerintah melakukan reformasi kurikulum, perubahan tersebut akan mempengaruhi cara siswa belajar dan keterampilan yang dikembangkan selama proses pendidikan. Kurikulum yang dirancang dengan baik dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman serta mempersiapkannya untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Sebagai contoh, banyak sistem pendidikan saat ini mulai menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi yang menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan memecahkan masalah. Pendekatan ini berbeda dengan metode pembelajaran tradisional yang lebih berfokus pada penguasaan materi secara teoritis dan hafalan. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, peserta didik didorong untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, misalnya melalui diskusi kelompok, proyek pembelajaran, serta kegiatan yang melibatkan pemecahan masalah nyata. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2021), sistem pendidikan yang menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau *student-centered Learning* cenderung menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tidak hanya menjadi penerima informasi secara pasif, tetapi juga berperan sebagai individu yang aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Melalui proses pembelajaran yang partisipatif, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, serta kemampuan bekerja sama dengan orang lain.

E. Tantangan Evaluasi di Era Desentralisasi

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu kebijakan penting dalam reformasi sistem pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan agar kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Namun, di sisi lain, desentralisasi juga menimbulkan berbagai tantangan dalam proses evaluasi kebijakan pendidikan.

Evaluasi kebijakan pendidikan di Era desentralisasi menjadi lebih kompleks karena kewenangan pengelolaan pendidikan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Sebaliknya, kewenangan tersebut tersebar di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten atau kota. Kondisi ini menyebabkan proses pengumpulan data, pemantauan program, serta penilaian keberhasilan kebijakan pendidikan menjadi lebih sulit dilakukan secara terintegrasi.

Menurut Pollitt dan Bouckaert (2017), desentralisasi dalam administrasi publik dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas kebijakan publik, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dalam koordinasi dan evaluasi kebijakan karena adanya perbedaan kapasitas

antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi kebijakan yang kuat agar kebijakan pendidikan yang diterapkan di berbagai daerah tetap sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

1. Konsep Desentralisasi dalam Kebijakan Pendidikan

Konsep desentralisasi dalam kebijakan pendidikan merujuk pada proses pemindahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem pendidikan. Dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, pemerintah daerah diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek pendidikan di wilayahnya. Kewenangan tersebut dapat mencakup pengelolaan sekolah, pengalokasian anggaran pendidikan, pengelolaan tenaga pendidik, serta pengembangan program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya karena memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal.

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sistem pendidikan. Dalam sistem yang sangat terpusat, proses pengambilan keputusan sering kali memerlukan waktu yang lama karena harus melalui berbagai tahapan birokrasi di tingkat nasional. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini memungkinkan kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan secara lebih responsif terhadap berbagai permasalahan yang muncul di tingkat lokal. Selain itu, desentralisasi juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi kebijakan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Desentralisasi pendidikan juga bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Ketika kewenangan pengambilan keputusan berada lebih dekat dengan masyarakat, berbagai kelompok masyarakat seperti orang tua siswa, tokoh masyarakat, organisasi pendidikan, serta lembaga swadaya

masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Partisipasi masyarakat dapat membantu menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, pengelolaan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Penerapan desentralisasi dalam kebijakan pendidikan juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan di berbagai daerah tetap sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Karena setiap daerah memiliki kondisi dan kapasitas yang berbeda, terdapat kemungkinan munculnya variasi dalam kualitas pengelolaan pendidikan antar wilayah. Beberapa daerah mungkin memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola pendidikan secara efektif, sementara daerah lain mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran, tenaga pendidik, maupun infrastruktur pendidikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah apabila tidak dikelola dengan baik.

2. Tantangan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Tantangan dalam evaluasi kebijakan pendidikan di Era desentralisasi merupakan isu penting dalam kajian administrasi publik dan manajemen pendidikan. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan, namun pada saat yang sama juga menghadirkan berbagai kendala dalam proses evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan pendidikan menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai aktor, tingkat pemerintahan, serta kondisi daerah yang berbeda-beda.

Salah satu tantangan utama dalam evaluasi kebijakan pendidikan adalah perbedaan kapasitas antar daerah. Setiap daerah memiliki kondisi sumber daya yang berbeda, baik dari segi anggaran pendidikan, kualitas tenaga pendidik, maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Daerah yang memiliki sumber daya lebih baik biasanya mampu mengembangkan program pendidikan yang lebih efektif, sementara

daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya sering menghadapi kesulitan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi ini dapat menyebabkan ketimpangan mutu pendidikan antar wilayah, sehingga proses evaluasi kebijakan menjadi sulit dilakukan secara seragam. Pemerintah pusat harus mempertimbangkan berbagai kondisi lokal sebelum menarik kesimpulan mengenai keberhasilan suatu kebijakan pendidikan.

Tantangan berikutnya adalah ketidakkonsistenan implementasi kebijakan pendidikan di berbagai daerah. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun fleksibilitas ini dapat meningkatkan relevansi kebijakan, dalam praktiknya sering muncul perbedaan dalam cara penerapan program pendidikan nasional di setiap daerah. Perbedaan tersebut membuat indikator keberhasilan kebijakan tidak selalu sama, sehingga menyulitkan proses evaluasi secara komparatif antar wilayah.

Keterbatasan sistem data pendidikan juga menjadi hambatan dalam evaluasi kebijakan. Evaluasi yang efektif memerlukan data yang akurat dan komprehensif mengenai berbagai aspek pendidikan, seperti jumlah peserta didik, kinerja guru, hasil belajar siswa, serta kondisi fasilitas sekolah. Namun dalam praktiknya, tidak semua daerah memiliki sistem pengelolaan data pendidikan yang baik. Ketidakteraturan dalam pengumpulan dan pengolahan data dapat menyebabkan informasi yang digunakan dalam evaluasi menjadi kurang lengkap atau kurang akurat.

BAB XI

MERANCANG ULANG ARSITEKTUR KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Merancang ulang arsitektur kebijakan pendidikan merupakan langkah strategis dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan politik yang semakin kompleks di Era modern. Arsitektur kebijakan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perumusan kebijakan, tetapi juga mencakup struktur kelembagaan, tata kelola, mekanisme implementasi, serta sistem evaluasi yang mengatur bagaimana kebijakan pendidikan dijalankan secara efektif. Dalam konteks ini, perancangan ulang kebijakan pendidikan perlu didasarkan pada pembelajaran dari praktik kebijakan sebelumnya, penggunaan bukti empiris, integrasi antara dimensi politik dan tata kelola, serta komitmen terhadap prinsip keadilan sosial dalam pendidikan. Menurut Dunn (2018), kebijakan publik yang efektif harus dirancang melalui proses analisis yang sistematis dengan mempertimbangkan dinamika implementasi serta dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, Mahardhani (2023) menekankan bahwa dalam sistem pemerintahan kolaboratif, kebijakan pendidikan memerlukan koordinasi dan sinergi antaraktor agar mampu merespons kebutuhan masyarakat secara adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, merancang ulang arsitektur kebijakan pendidikan menjadi upaya penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan.

A. Pembelajaran dari Praktik Kebijakan

Pembelajaran dari praktik kebijakan (*Policy Learning*) merupakan salah satu pendekatan penting dalam proses perumusan dan perbaikan kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan. Konsep ini menekankan bahwa kebijakan tidak hanya disusun berdasarkan teori

atau rencana normatif, tetapi juga harus belajar dari pengalaman implementasi kebijakan sebelumnya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Dalam konteks pendidikan, praktik kebijakan memberikan informasi empiris mengenai bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan, bagaimana aktor pendidikan merespons kebijakan tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan. Dengan demikian, proses pembelajaran dari praktik kebijakan menjadi dasar penting dalam merancang ulang arsitektur kebijakan pendidikan agar lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut William N. Dunn (2018), pembelajaran kebijakan merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi dari pengalaman kebijakan sebelumnya untuk memperbaiki kebijakan yang akan datang. Dalam perspektif ini, pengalaman implementasi kebijakan menjadi sumber pengetahuan yang sangat penting untuk memahami dinamika kebijakan di dunia nyata. Dunn menekankan bahwa kebijakan publik sering kali menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas, sehingga pembelajaran dari praktik kebijakan menjadi mekanisme untuk mengurangi kesalahan dalam perumusan kebijakan di masa depan.

Pada studi kebijakan pendidikan, pembelajaran dari praktik kebijakan sering kali dilakukan melalui evaluasi program pendidikan, penelitian kebijakan, serta refleksi terhadap implementasi kebijakan di berbagai daerah atau negara. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pendidikan. Misalnya, kebijakan kurikulum, kebijakan sertifikasi guru, maupun kebijakan desentralisasi pendidikan sering kali menunjukkan hasil yang berbeda di setiap wilayah karena perbedaan kapasitas institusi, sumber daya, serta kondisi sosial masyarakat.

1. Praktik Kebijakan sebagai Sumber Pengetahuan

Praktik kebijakan merupakan laboratorium nyata bagi para pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana kebijakan bekerja dalam kehidupan sosial. Dalam kebijakan pendidikan, praktik implementasi kebijakan sering kali menghasilkan berbagai pembelajaran

penting terkait dengan efektivitas desain kebijakan, kesiapan lembaga pelaksana, serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Michael Howlett dan M. Ramesh (2020), pembelajaran kebijakan dapat terjadi melalui tiga mekanisme utama, yaitu pembelajaran instrumental, pembelajaran sosial, dan pembelajaran politik. Pembelajaran instrumental berkaitan dengan penggunaan pengalaman kebijakan untuk memperbaiki instrumen atau alat kebijakan. Pembelajaran sosial berkaitan dengan perubahan pemahaman atau paradigma mengenai suatu masalah kebijakan. Sementara itu, pembelajaran politik berkaitan dengan perubahan strategi politik dalam proses pembuatan kebijakan.

Pada kebijakan pendidikan, pembelajaran instrumental dapat terlihat pada perubahan metode evaluasi pembelajaran, perbaikan sistem akreditasi sekolah, atau pengembangan model pelatihan guru. Pembelajaran sosial dapat terjadi ketika pemerintah mengubah paradigma pendidikan dari sekadar orientasi pada hasil akademik menjadi pendekatan yang lebih holistik dan berpusat pada peserta didik. Sementara itu, pembelajaran politik dapat terjadi ketika pemerintah menyadari pentingnya melibatkan berbagai aktor, seperti masyarakat, organisasi pendidikan, dan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan pendidikan.

2. Evaluasi Kebijakan sebagai Mekanisme Pembelajaran

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu instrumen utama dalam proses pembelajaran dari praktik kebijakan. Melalui evaluasi kebijakan, pemerintah dapat menilai apakah suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Menurut Carol H. Weiss (2017), evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi untuk menilai keberhasilan program, tetapi juga untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan dalam perbaikan kebijakan di masa depan. Evaluasi yang efektif dapat memberikan informasi mengenai dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran, efisiensi penggunaan sumber daya, serta relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada konteks kebijakan pendidikan, evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti evaluasi kinerja program

pendidikan, evaluasi dampak kebijakan terhadap kualitas pembelajaran, serta evaluasi terhadap kesenjangan akses pendidikan. Hasil evaluasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam proses reformasi kebijakan pendidikan. Sebagai contoh, evaluasi terhadap kebijakan peningkatan kompetensi guru dapat memberikan informasi mengenai efektivitas program pelatihan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Jika evaluasi menunjukkan bahwa program tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan, maka pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap desain program, metode pelatihan, atau sistem insentif bagi guru.

3. Pembelajaran Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pendidikan

Pada sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, pembelajaran dari praktik kebijakan menjadi semakin penting karena implementasi kebijakan pendidikan dilakukan oleh berbagai aktor di tingkat lokal. Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Menurut Ardhana Januar Mahardhani (2023), dalam sistem pemerintahan kolaboratif, proses pembelajaran kebijakan tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Kolaborasi antaraktor tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan pengetahuan yang dapat memperkaya proses perumusan kebijakan pendidikan.

Pada konteks Indonesia, praktik kebijakan pendidikan di berbagai daerah menunjukkan variasi yang cukup besar dalam hal inovasi dan efektivitas kebijakan. Beberapa daerah berhasil mengembangkan program-program pendidikan inovatif yang meningkatkan kualitas pendidikan, sementara daerah lain masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Pembelajaran dari praktik kebijakan di berbagai daerah dapat membantu pemerintah pusat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*Best Practices*) yang dapat direplikasi di daerah lain. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan dapat menjadi sumber inovasi kebijakan yang memperkaya sistem pendidikan nasional.

B. Prinsip Arsitektur Adaptif dan Responsif

Pada upaya merancang ulang arsitektur kebijakan pendidikan, salah satu pendekatan yang semakin banyak digunakan dalam kajian kebijakan publik adalah prinsip arsitektur kebijakan yang adaptif dan responsif. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang terus berkembang serta mempengaruhi sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak lagi dapat dirancang secara statis dan kaku, melainkan harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan serta merespons kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, arsitektur kebijakan pendidikan yang adaptif dan responsif menjadi elemen penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pendidikan di masa depan.

Secara konseptual, arsitektur kebijakan dapat dipahami sebagai kerangka institusional, regulatif, dan operasional yang mengatur bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Dalam konteks pendidikan, arsitektur kebijakan mencakup struktur kelembagaan, mekanisme koordinasi antaraktor, sistem pendanaan pendidikan, regulasi pendidikan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan. Menurut Michael Howlett (2019), desain kebijakan publik harus mampu mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan secara sistematis sehingga kebijakan dapat berfungsi secara efektif dalam menghadapi kompleksitas masalah publik. Dengan kata lain, arsitektur kebijakan yang baik harus mampu menciptakan keseimbangan antara stabilitas kebijakan dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan.

1. Konsep Arsitektur Kebijakan Adaptif

Arsitektur kebijakan adaptif merujuk pada kemampuan sistem kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lingkungan serta belajar dari pengalaman implementasi kebijakan sebelumnya. Konsep ini sangat relevan dalam kebijakan pendidikan karena sistem pendidikan sering kali menghadapi perubahan yang cepat,

seperti perkembangan teknologi digital, perubahan kebutuhan pasar kerja, serta dinamika sosial masyarakat.

Menurut Brian W. Head (2022), kebijakan adaptif merupakan kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan ketidakpastian masa depan dan menyediakan ruang bagi penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, kebijakan adaptif memungkinkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi dan pembelajaran dari implementasi kebijakan.

Salah satu contoh penerapan pendekatan adaptif dalam kebijakan pendidikan adalah pengembangan kurikulum yang fleksibel dan dinamis. Kurikulum yang adaptif memungkinkan sistem pendidikan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan model kurikulum yang bersifat rigid dan sulit diubah dalam jangka waktu yang panjang.

2. Konsep Kebijakan Responsif

Arsitektur kebijakan pendidikan juga harus bersifat responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kebijakan responsif adalah kebijakan yang mampu merespons kebutuhan berbagai kelompok masyarakat secara adil dan inklusif. Dalam konteks pendidikan, kebijakan responsif berarti bahwa sistem pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan peserta didik, guru, orang tua, serta masyarakat secara luas.

Menurut Guy Peters (2021), kebijakan publik yang responsif merupakan kebijakan yang mampu merespons perubahan tuntutan masyarakat serta memperhatikan keberagaman kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sistem pendidikan yang demokratis, kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai aktor seperti masyarakat sipil, organisasi pendidikan, dan lembaga pendidikan.

Responsivitas kebijakan pendidikan juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai ketimpangan dalam sistem pendidikan. Misalnya, ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, ketimpangan kualitas

pendidikan antar sekolah, serta kesenjangan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan pendekatan kebijakan yang responsif, pemerintah dapat merancang program-program pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara.

3. Integrasi Antara Aktor Kebijakan

Prinsip penting lainnya dalam arsitektur kebijakan adaptif dan responsif adalah integrasi antaraktor dalam sistem kebijakan pendidikan. Sistem pendidikan modern melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta sektor swasta. Menurut Ardhana Januar Mahardhani (2023), dalam perspektif pemerintahan kolaboratif, kebijakan publik yang efektif memerlukan kerja sama antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan sumber daya yang berbeda. Kolaborasi antaraktor memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, sumber daya, serta pengalaman yang dapat memperkuat implementasi kebijakan pendidikan.

Pada konteks pendidikan, integrasi antaraktor dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti forum koordinasi kebijakan pendidikan, kemitraan antara pemerintah dan lembaga pendidikan, serta kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Melalui integrasi yang baik, berbagai aktor dalam sistem pendidikan dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan kebijakan pendidikan.

C. Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Kebijakan berbasis bukti (*Evidence-Based Policy*) merupakan pendekatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang menekankan penggunaan data, penelitian ilmiah, serta bukti empiris sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan kebijakan. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini menjadi semakin penting karena sistem pendidikan menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti ketimpangan akses pendidikan, kualitas pembelajaran yang beragam,

perubahan kebutuhan keterampilan di Era digital, serta keterbatasan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang dirancang tanpa dasar bukti yang kuat berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak efektif atau bahkan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Konsep *Evidence-Based Policy* berkembang dari kesadaran bahwa kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, ideologi, atau kepentingan kelompok tertentu sehingga tidak selalu didasarkan pada analisis empiris yang memadai. Menurut William N. Dunn (2018), kebijakan publik yang efektif memerlukan proses analisis kebijakan yang sistematis dengan memanfaatkan data, penelitian, serta evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah publik yang dihadapi. Dalam perspektif ini, bukti empiris menjadi komponen penting dalam proses perumusan kebijakan karena memberikan dasar rasional bagi pengambilan keputusan pemerintah.

Pada kebijakan pendidikan, *Evidence-Based Policy* tidak hanya berarti menggunakan data statistik pendidikan, tetapi juga mencakup penggunaan hasil penelitian pendidikan, evaluasi program pendidikan, serta praktik terbaik (*Best Practices*) yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kebijakan berbasis bukti membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang nyata.

1. Konsep Dasar Kebijakan Berbasis Bukti

Kebijakan berbasis bukti merupakan pendekatan yang menekankan integrasi antara penelitian ilmiah dan proses pengambilan keputusan kebijakan. Pendekatan ini pertama kali berkembang secara luas dalam bidang kesehatan publik, kemudian diadopsi dalam berbagai bidang kebijakan publik lainnya, termasuk pendidikan. Menurut Brian W. Head (2022), kebijakan berbasis bukti melibatkan tiga sumber pengetahuan utama, yaitu bukti ilmiah dari penelitian, pengalaman praktis dari para pelaksana kebijakan, serta nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Integrasi ketiga sumber pengetahuan tersebut memungkinkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang

tidak hanya berbasis data, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.

Pada konteks pendidikan, bukti yang digunakan dalam perumusan kebijakan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti data statistik pendidikan nasional, hasil penelitian akademik mengenai metode pembelajaran, laporan evaluasi program pendidikan, serta pengalaman praktis dari guru dan lembaga pendidikan. Dengan memanfaatkan berbagai sumber bukti tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sistem pendidikan serta strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kebijakan berbasis bukti juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Ketika kebijakan didasarkan pada bukti yang jelas dan dapat diverifikasi, masyarakat dapat memahami alasan di balik kebijakan tersebut serta menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat bagi kepentingan publik.

2. Peran Data dalam Kebijakan Pendidikan

Data merupakan komponen utama dalam kebijakan berbasis bukti. Dalam sistem pendidikan modern, data pendidikan digunakan untuk memantau kondisi pendidikan, mengidentifikasi masalah pendidikan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan. Menurut OECD (2021), sistem pendidikan yang efektif memerlukan sistem informasi pendidikan yang kuat dan terintegrasi. Sistem informasi pendidikan memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai berbagai aspek pendidikan, seperti tingkat partisipasi pendidikan, kualitas pembelajaran, kinerja siswa, serta kondisi tenaga pendidik.

Data pendidikan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam sistem pendidikan. Misalnya, data mengenai tingkat partisipasi sekolah dapat menunjukkan apakah terdapat perbedaan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Data mengenai hasil belajar siswa juga dapat digunakan untuk menilai kualitas pembelajaran di berbagai sekolah. Dengan memanfaatkan data pendidikan secara sistematis, pemerintah dapat merancang kebijakan pendidikan yang

lebih tepat sasaran. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa daerah tertentu memiliki tingkat putus sekolah yang tinggi, maka pemerintah dapat merancang program intervensi khusus untuk mengatasi masalah tersebut.

3. Peran Penelitian dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Penelitian ilmiah merupakan sumber bukti penting dalam kebijakan berbasis bukti. Penelitian pendidikan dapat memberikan informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran, efektivitas metode pengajaran, serta dampak kebijakan pendidikan terhadap hasil belajar siswa. Menurut John W. Creswell (2019), penelitian pendidikan memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena pendidikan secara sistematis dan ilmiah. Hasil penelitian pendidikan dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Sebagai contoh, penelitian mengenai metode pembelajaran aktif menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif siswa dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir kritis siswa. Temuan penelitian semacam ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan kebijakan kurikulum yang mendorong penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Selain itu, penelitian juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan yang telah dilaksanakan. Dengan melakukan penelitian evaluatif terhadap program pendidikan, pemerintah dapat mengetahui apakah program tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

D. Integrasi Politik, Tata Kelola, dan Implementasi

Pada proses perancangan ulang arsitektur kebijakan pendidikan, integrasi antara politik, tata kelola (*Governance*), dan implementasi kebijakan merupakan faktor yang sangat penting. Kebijakan pendidikan tidak hanya merupakan hasil dari proses teknokratis atau analisis akademik semata, tetapi juga merupakan produk dari proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan, aktor, serta dinamika kekuasaan. Oleh

karena itu, keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dikelola dan diimplementasikan dalam sistem pemerintahan yang kompleks.

Secara konseptual, kebijakan publik selalu berada dalam interaksi antara tiga dimensi utama, yaitu dimensi politik, dimensi tata kelola, dan dimensi implementasi. Dimensi politik berkaitan dengan proses perumusan kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan aktor politik, partai politik, kelompok kepentingan, serta opini publik. Dimensi tata kelola berkaitan dengan struktur kelembagaan, mekanisme koordinasi antaraktor, serta sistem pengelolaan kebijakan dalam pemerintahan. Sementara itu, dimensi implementasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan dijalankan oleh lembaga pelaksana di lapangan.

Menurut James E. Anderson (2021), kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Namun, kebijakan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai dokumen formal, melainkan harus dilihat sebagai proses yang melibatkan interaksi antara aktor politik, lembaga pemerintahan, serta masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara politik, tata kelola, dan implementasi menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat berjalan secara efektif.

1. Dimensi Politik dalam Kebijakan Pendidikan

Politik memiliki peran yang sangat besar dalam proses perumusan kebijakan pendidikan. Pendidikan merupakan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia, identitas nasional, serta legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan sering kali menjadi isu politik yang penting dalam agenda pemerintahan. Menurut B. Guy Peters (2020), proses kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik karena kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil dari proses negosiasi antara berbagai kepentingan yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, aktor politik seperti pemerintah, parlemen, partai politik, serta kelompok kepentingan memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan pendidikan.

Sebagai contoh, keputusan mengenai alokasi anggaran pendidikan, reformasi kurikulum, atau kebijakan sertifikasi guru sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Dalam beberapa kasus, kebijakan pendidikan dapat digunakan sebagai alat politik untuk memperoleh dukungan publik atau memperkuat legitimasi pemerintah. Pengaruh politik dalam kebijakan pendidikan tidak selalu bersifat negatif. Politik juga dapat berperan positif dalam mendorong reformasi pendidikan serta memperjuangkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Dalam sistem demokrasi, tekanan politik dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan pendidikan yang dianggap tidak adil atau tidak efektif.

2. Tata Kelola Kebijakan Pendidikan

Tata kelola kebijakan juga memiliki peran penting dalam keberhasilan kebijakan pendidikan. Tata kelola kebijakan berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikelola, dikoordinasikan, serta diawasi dalam sistem pemerintahan. Menurut Mark Bevir (2019), tata kelola (*Governance*) merujuk pada pola interaksi antara berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan pendidikan, tata kelola melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta sektor swasta.

Sistem tata kelola pendidikan yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai aktor tersebut. Tanpa koordinasi yang efektif, kebijakan pendidikan dapat mengalami fragmentasi yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan. Dalam banyak negara, sistem pendidikan diatur melalui mekanisme desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendidikan. Desentralisasi pendidikan dapat memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan lokal. Namun, desentralisasi juga dapat menimbulkan tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi merupakan tahap yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik. Banyak kebijakan yang dirancang dengan baik pada tahap perumusan, tetapi mengalami kegagalan dalam tahap implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kapasitas lembaga pelaksana serta kondisi implementasi di lapangan. Menurut Merilee S. Grindle (2017), implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta kondisi sosial yang berbeda. Dalam kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan melibatkan berbagai lembaga seperti kementerian pendidikan, dinas pendidikan daerah, sekolah, serta tenaga pendidik.

Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan sumber daya, kapasitas organisasi, komitmen pelaksana kebijakan, serta dukungan masyarakat. Misalnya, kebijakan reformasi kurikulum hanya dapat berhasil jika guru memiliki pemahaman yang memadai mengenai kurikulum tersebut serta memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkannya dalam proses pembelajaran. Selain itu, implementasi kebijakan juga memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Dengan sistem monitoring yang baik, pemerintah dapat memantau pelaksanaan kebijakan pendidikan serta mengidentifikasi masalah implementasi secara lebih cepat.

E. Pendidikan sebagai Tanggung Jawab Publik dan Keadilan Sosial

Pendidikan merupakan salah satu sektor fundamental dalam pembangunan manusia dan pembangunan sosial suatu negara. Dalam perspektif kebijakan publik, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai layanan sosial yang disediakan oleh negara, tetapi juga sebagai tanggung jawab publik yang memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Oleh karena itu, dalam merancang ulang arsitektur kebijakan pendidikan, penting untuk menempatkan pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif

negara dan masyarakat serta sebagai instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial.

Konsep pendidikan sebagai tanggung jawab publik berangkat dari pemahaman bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Hak atas pendidikan telah diakui secara luas dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun kebijakan nasional di berbagai negara. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial yang memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

Menurut UNESCO (2022), pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan gender, serta memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas.

1. Pendidikan sebagai Hak Publik

Pada perspektif kebijakan publik, pendidikan dipandang sebagai *public good* atau barang publik yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Berbeda dengan barang privat yang manfaatnya hanya dirasakan oleh individu tertentu, pendidikan memiliki dampak sosial yang luas, termasuk peningkatan produktivitas ekonomi, penguatan demokrasi, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial.

Menurut Amartya Sen (2019), pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan kapabilitas manusia (*human capabilities*). Kapabilitas merujuk pada kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang dinilai berharga. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Pendekatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Sen menekankan bahwa pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kebebasan dan

kesempatan bagi individu untuk mengembangkan potensinya. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi instrumen penting dalam memperluas kesempatan hidup masyarakat. Selain itu, pendidikan juga memiliki fungsi sosial dalam membentuk nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan solidaritas dalam masyarakat. Sistem pendidikan yang inklusif dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis dengan mengurangi diskriminasi serta memperkuat rasa kebersamaan antar kelompok sosial.

2. Peran Negara dalam Menjamin Pendidikan

Sebagai tanggung jawab publik, negara memiliki peran utama dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Peran negara dalam pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan, pengembangan kurikulum, pelatihan tenaga pendidik, hingga penyediaan pembiayaan pendidikan. Menurut B. Guy Peters (2020), dalam sistem kebijakan publik modern, negara berfungsi sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam penyediaan layanan publik yang esensial bagi masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu layanan publik yang paling penting karena memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Pada banyak negara, pemerintah menetapkan kebijakan pendidikan wajib sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin hak atas pendidikan. Kebijakan pendidikan wajib bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar yang memadai. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam menyediakan pembiayaan pendidikan yang memadai. Investasi dalam pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat daya saing ekonomi suatu negara.

3. Pendidikan dan Keadilan Sosial

Salah satu tujuan utama kebijakan pendidikan adalah mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Keadilan sosial dalam pendidikan berkaitan dengan upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan

yang berkualitas, tanpa dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, gender, atau latar belakang budaya. Menurut John Rawls (2018), keadilan sosial menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dalam masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung. Dalam konteks pendidikan, prinsip keadilan Rawls menekankan bahwa sistem pendidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan.

Ketimpangan pendidikan merupakan salah satu tantangan besar dalam banyak sistem pendidikan di dunia. Ketimpangan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah, perbedaan akses pendidikan antara kelompok kaya dan miskin, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Kebijakan pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial harus mampu mengatasi berbagai bentuk ketimpangan tersebut melalui berbagai program intervensi, seperti bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, pembangunan sekolah di daerah terpencil, serta program inklusi pendidikan bagi kelompok berkebutuhan khusus.

BAB XII

REORIENTASI TEORETIK DAN AGENDA RISET MASA DEPAN

Reorientasi teoretik dalam kajian kebijakan pendidikan menjadi penting seiring dengan semakin kompleksnya tantangan tata kelola pendidikan di Era modern. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dinamika politik, serta tuntutan peningkatan kualitas pendidikan mendorong perlunya pembaruan perspektif teoritis dalam memahami hubungan antara administrasi publik dan kebijakan pendidikan. Pendekatan yang sebelumnya bersifat sektoral dan administratif kini perlu diperluas menjadi lebih integratif dengan mempertimbangkan dimensi politik, tata kelola, implementasi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, agenda riset kebijakan pendidikan di masa depan diarahkan pada pengembangan model analisis yang lebih komprehensif, berbasis bukti, serta mampu menjelaskan interaksi antara berbagai aktor, institusi, dan konteks kebijakan dalam membentuk sistem pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan.

A. Sintesis Teoretik Administrasi Publik dan Pendidikan

Sintesis teoretik antara administrasi publik dan pendidikan merupakan pendekatan penting dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan di Era modern. Pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai proses pedagogis yang terjadi di ruang kelas, tetapi sebagai sistem kebijakan publik yang kompleks yang melibatkan berbagai aktor, institusi, dan mekanisme tata kelola. Oleh karena itu, kajian kebijakan pendidikan memerlukan integrasi antara teori administrasi publik yang berfokus pada pengelolaan kebijakan dan organisasi pemerintahan dengan teori pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, serta pengelolaan lembaga pendidikan.

Integrasi kedua perspektif ini memungkinkan analisis kebijakan pendidikan dilakukan secara lebih komprehensif dan sistematis.

Pada perspektif administrasi publik, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, pemerataan kesempatan pendidikan, serta peningkatan kualitas pendidikan nasional. Menurut James E. Anderson (2021), kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik tertentu. Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik mencakup berbagai keputusan yang berkaitan dengan kurikulum, pembiayaan pendidikan, manajemen sekolah, serta pengembangan tenaga pendidik.

Pada perspektif ilmu pendidikan, sistem pendidikan dipahami sebagai proses sosial yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu serta membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Pendidikan memiliki dimensi pedagogis, psikologis, sosial, dan kultural yang mempengaruhi proses pembelajaran serta perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan tidak hanya harus memperhatikan aspek administratif dan kelembagaan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pedagogis dan kebutuhan peserta didik.

Sintesis teoretik antara administrasi publik dan pendidikan bertujuan untuk mengintegrasikan kedua perspektif tersebut sehingga kebijakan pendidikan dapat dirancang dan dikelola secara lebih efektif. Dengan menggabungkan pendekatan administrasi publik dan pendidikan, para pembuat kebijakan dapat memahami bagaimana kebijakan pendidikan dirumuskan, diimplementasikan, serta berdampak terhadap proses pembelajaran di lembaga pendidikan.

1. Pendidikan sebagai Sistem Kebijakan Publik

Pada pendekatan administrasi publik, pendidikan dipahami sebagai bagian dari sistem kebijakan publik yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia. Sistem pendidikan nasional merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Menurut William N. Dunn (2018), kebijakan publik merupakan proses yang melibatkan perumusan, implementasi, serta

evaluasi kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, siklus kebijakan ini mencakup proses perencanaan kebijakan pendidikan, pelaksanaan program pendidikan, serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut.

Pendekatan administrasi publik memberikan kerangka analitis untuk memahami berbagai aspek kebijakan pendidikan, seperti proses pengambilan keputusan kebijakan, koordinasi antar lembaga pemerintah, serta mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Dengan menggunakan perspektif administrasi publik, kebijakan pendidikan dapat dianalisis sebagai bagian dari sistem tata kelola negara yang lebih luas. Selain itu, pendekatan administrasi publik juga menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan pendidikan. Prinsip-prinsip ini menjadi penting karena sistem pendidikan melibatkan penggunaan sumber daya publik yang besar serta memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan masyarakat.

2. Perspektif Pendidikan dalam Kebijakan Publik

Perspektif ilmu pendidikan menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan peserta didik serta dinamika proses pembelajaran. Kebijakan pendidikan yang terlalu berfokus pada aspek administratif tanpa mempertimbangkan aspek pedagogis berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Paulo Freire (2018), pendidikan merupakan proses pembebasan yang memungkinkan individu untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial. Dalam perspektif ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan individu dan masyarakat.

Pendekatan pendidikan juga menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, seperti kualitas guru, kurikulum, metode pembelajaran, serta lingkungan sekolah. Integrasi antara perspektif pendidikan dan administrasi publik memungkinkan kebijakan pendidikan dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara

kebutuhan administratif sistem pendidikan dan kebutuhan pedagogis peserta didik.

3. Paradigma Administrasi Publik dalam Pengelolaan Pendidikan

Perkembangan teori administrasi publik juga memberikan pengaruh besar terhadap pengelolaan sistem pendidikan. Dalam sejarah administrasi publik, terdapat beberapa paradigma utama yang mempengaruhi kebijakan pendidikan. Paradigma pertama adalah administrasi publik klasik, yang menekankan pada struktur birokrasi yang hierarkis serta pembagian tugas yang jelas dalam organisasi pemerintahan. Dalam paradigma ini, pengelolaan pendidikan dilakukan melalui sistem birokrasi yang terpusat dengan kontrol yang kuat dari pemerintah pusat.

Paradigma kedua adalah *New Public Management* (NPM), yang muncul pada akhir abad ke-20 dan menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, serta orientasi pada hasil dalam pengelolaan sektor publik. Dalam konteks pendidikan, paradigma NPM mendorong penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dalam pengelolaan lembaga pendidikan, seperti sistem evaluasi kinerja sekolah serta penggunaan indikator kinerja pendidikan. Paradigma ketiga adalah *governance* atau tata kelola kolaboratif, yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dalam pengelolaan kebijakan publik. Dalam sistem pendidikan modern, paradigma *governance* semakin penting karena sistem pendidikan melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran dalam pengembangan pendidikan.

4. Pendidikan dalam Perspektif Tata Kelola Kolaboratif

Pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi semakin penting dalam sistem pendidikan modern karena kompleksitas masalah pendidikan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Tantangan seperti ketimpangan pendidikan, perkembangan teknologi digital, serta perubahan kebutuhan pasar kerja memerlukan kerja sama antara berbagai aktor dalam masyarakat. Menurut Ardhana Januar Mahardhani (2023), dalam perspektif pemerintahan kolaboratif, penyelesaian

masalah publik memerlukan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki sumber daya dan kapasitas yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, serta sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan.

Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kemitraan, seperti kerja sama antara sekolah dan dunia industri, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah, serta keterlibatan organisasi masyarakat dalam program pendidikan. Pendekatan kolaboratif juga memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara berbagai aktor dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat dirancang secara lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Model Arsitektur Kebijakan yang Integratif

Untuk menghadapi kompleksitas sistem pendidikan modern, diperlukan suatu model arsitektur kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai komponen dalam sistem pendidikan secara menyeluruh. Model arsitektur kebijakan yang integratif merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya keterpaduan antara proses perumusan kebijakan, tata kelola kelembagaan, mekanisme implementasi, serta sistem evaluasi kebijakan pendidikan. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan kebijakan pendidikan yang sering kali bersifat terfragmentasi, tidak terkoordinasi, dan kurang efektif dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Arsitektur kebijakan dapat dipahami sebagai kerangka sistemik yang mengatur hubungan antara berbagai aktor, institusi, dan instrumen kebijakan dalam suatu sistem kebijakan publik. Dalam konteks pendidikan, arsitektur kebijakan mencakup struktur kelembagaan pendidikan, mekanisme koordinasi antar lembaga, sistem pembiayaan pendidikan, regulasi pendidikan, serta sistem monitoring dan evaluasi kebijakan. Dengan kata lain, arsitektur kebijakan pendidikan merupakan desain menyeluruh dari sistem kebijakan yang mengatur bagaimana pendidikan dikelola dalam suatu negara.

Menurut Michael Howlett (2019), desain kebijakan publik harus mempertimbangkan hubungan antara tujuan kebijakan, instrumen kebijakan, serta kapasitas implementasi kebijakan. Pendekatan desain kebijakan yang integratif memungkinkan berbagai instrumen kebijakan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif. Dalam sistem pendidikan, integrasi ini sangat penting karena kebijakan pendidikan melibatkan berbagai sektor dan aktor yang saling berinteraksi.

Model arsitektur kebijakan yang integratif bertujuan untuk menciptakan sistem kebijakan pendidikan yang koheren, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan adanya integrasi yang baik antara berbagai komponen kebijakan, pemerintah dapat menghindari duplikasi kebijakan, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai tingkat pemerintahan.

1. Konsep Integrasi dalam Arsitektur Kebijakan

Konsep integrasi dalam arsitektur kebijakan merujuk pada upaya untuk menghubungkan berbagai elemen kebijakan yang sebelumnya terpisah atau terfragmentasi. Dalam banyak sistem pendidikan, kebijakan sering kali dikembangkan secara sektoral tanpa mempertimbangkan hubungan antara berbagai kebijakan yang saling terkait. Sebagai contoh, kebijakan kurikulum sering kali dirancang tanpa mempertimbangkan kebijakan pengembangan guru, kebijakan pembiayaan pendidikan, atau kebijakan evaluasi pembelajaran. Akibatnya, implementasi kebijakan tersebut menjadi kurang efektif karena tidak didukung oleh kebijakan lain yang relevan.

Menurut B. Guy Peters (2020), integrasi kebijakan merupakan proses penyelarasan berbagai kebijakan yang berbeda untuk mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas. Dalam konteks pendidikan, integrasi kebijakan dapat mencakup penyelarasan antara kebijakan pendidikan nasional dengan kebijakan pembangunan ekonomi, kebijakan sosial, serta kebijakan teknologi. Pendekatan integratif juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan. Dalam banyak negara, sistem pendidikan melibatkan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah, seperti

kementerian pendidikan, kementerian keuangan, serta kementerian perencanaan pembangunan. Tanpa koordinasi yang efektif, kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga tersebut dapat saling bertentangan atau tidak sinkron.

2. Komponen Utama Arsitektur Kebijakan Integratif

Model arsitektur kebijakan pendidikan yang integratif biasanya terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan. Komponen-komponen tersebut membentuk suatu sistem kebijakan yang memungkinkan berbagai kebijakan pendidikan dapat bekerja secara terpadu. Komponen pertama adalah perumusan kebijakan strategis. Pada tahap ini, pemerintah menentukan tujuan dan prioritas kebijakan pendidikan berdasarkan analisis terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan nasional. Proses perumusan kebijakan strategis biasanya melibatkan berbagai aktor, termasuk lembaga pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, serta sektor swasta.

Komponen kedua adalah desain instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam kebijakan pendidikan, instrumen kebijakan dapat berupa regulasi pendidikan, program pendidikan, insentif keuangan, serta sistem evaluasi pendidikan. Komponen ketiga adalah struktur kelembagaan. Struktur kelembagaan menentukan bagaimana kebijakan pendidikan dikelola dan diimplementasikan oleh berbagai lembaga dalam sistem pendidikan. Struktur ini mencakup pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peran lembaga pendidikan, serta mekanisme koordinasi antar lembaga.

Komponen keempat adalah mekanisme implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan dalam praktik melalui berbagai program dan kegiatan pendidikan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, ketersediaan sumber daya, serta dukungan dari para pelaksana kebijakan. Komponen kelima adalah sistem monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi kebijakan diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan pendidikan serta mengidentifikasi kebutuhan perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan sistem evaluasi yang kuat, pemerintah dapat memastikan bahwa

kebijakan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Integrasi Kebijakan dalam Sistem Pendidikan

Pada sistem pendidikan modern, integrasi kebijakan menjadi semakin penting karena sistem pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Misalnya, masalah kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kurikulum atau metode pembelajaran, tetapi juga berkaitan dengan kualitas guru, fasilitas pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurut William N. Dunn (2018), kebijakan publik yang efektif memerlukan pendekatan sistemik yang mempertimbangkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi suatu masalah kebijakan. Dalam konteks pendidikan, pendekatan sistemik memungkinkan pembuat kebijakan untuk memahami hubungan antara berbagai komponen dalam sistem pendidikan.

Sebagai contoh, upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tidak dapat dilakukan hanya dengan mengubah kurikulum. Kebijakan tersebut juga harus didukung oleh program pelatihan guru, penyediaan sumber belajar yang memadai, serta sistem evaluasi pembelajaran yang efektif. Dengan pendekatan integratif, kebijakan pendidikan dapat dirancang secara lebih komprehensif sehingga berbagai kebijakan yang berbeda dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan.

C. Agenda Riset Kebijakan Pendidikan Kontemporer

Agenda riset kebijakan pendidikan kontemporer berkembang seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang mempengaruhi sistem pendidikan di berbagai negara. Penelitian kebijakan pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada efektivitas program, tetapi juga pada kompleksitas tata kelola, keadilan sosial, inovasi kebijakan, serta keterkaitan antara kebijakan pendidikan dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, agenda riset masa depan perlu dirumuskan secara sistematis untuk menjawab berbagai tantangan

baru dalam tata kelola pendidikan. Berikut beberapa agenda riset kebijakan pendidikan kontemporer yang relevan untuk dikembangkan:

1. Riset tentang Tata Kelola Kebijakan Pendidikan (*Education Governance*)

Riset tentang tata kelola kebijakan pendidikan (*Education Governance*) merupakan bidang kajian penting dalam studi kebijakan publik dan administrasi pendidikan. Penelitian dalam bidang ini berfokus pada bagaimana sistem pendidikan dikelola melalui interaksi antara berbagai aktor, institusi, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam lingkungan pemerintahan yang semakin kompleks. Dalam sistem pendidikan modern, pengelolaan pendidikan tidak lagi bersifat sepenuhnya terpusat pada pemerintah pusat, tetapi melibatkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan yang memiliki peran berbeda dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, riset mengenai tata kelola kebijakan pendidikan bertujuan untuk memahami bagaimana struktur kelembagaan, hubungan antaraktor, serta mekanisme koordinasi dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan.

Salah satu fokus utama dalam riset tata kelola pendidikan adalah mengkaji bagaimana struktur tata kelola pendidikan bekerja dalam sistem pemerintahan yang semakin kompleks. Sistem pendidikan biasanya melibatkan berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat yang menetapkan kebijakan nasional, hingga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Penelitian dalam bidang ini juga meneliti hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Interaksi antaraktor tersebut sangat menentukan bagaimana kebijakan pendidikan dirumuskan, diimplementasikan, serta dievaluasi dalam praktik.

Riset tata kelola kebijakan pendidikan juga menganalisis efektivitas model desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, keberhasilan

desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Riset mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan

Riset mengenai implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam kajian kebijakan publik karena berfokus pada bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah benar-benar dijalankan dalam praktik. Dalam konteks pendidikan, kebijakan tidak hanya berhenti pada tahap perumusan di tingkat pusat, tetapi harus diterjemahkan dan dilaksanakan oleh berbagai aktor di tingkat daerah dan sekolah. Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan berupaya memahami bagaimana kebijakan tersebut diinterpretasikan, diadaptasi, serta diterapkan dalam situasi nyata yang sering kali berbeda dengan asumsi yang terdapat dalam perencanaan kebijakan.

Salah satu fokus utama dalam riset implementasi kebijakan pendidikan adalah meneliti bagaimana kebijakan pendidikan diterjemahkan ke dalam praktik oleh lembaga pendidikan dan pemerintah daerah. Kebijakan pendidikan biasanya dirumuskan dalam bentuk regulasi, pedoman program, atau kebijakan nasional yang bersifat umum. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi lokal, seperti ketersediaan sumber daya, kapasitas lembaga pendidikan, serta karakteristik sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian implementasi kebijakan berusaha memahami bagaimana proses penyesuaian tersebut terjadi serta bagaimana para pelaksana kebijakan menafsirkan aturan yang ada dalam praktik sehari-hari.

Riset implementasi kebijakan pendidikan juga berfokus pada identifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi kapasitas birokrasi pendidikan, ketersediaan sumber daya manusia dan finansial, kualitas kepemimpinan sekolah, serta dukungan masyarakat. Dalam proses implementasi kebijakan, birokrasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena merupakan aktor utama yang

bertanggung jawab menjalankan berbagai program pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Riset tentang Ketimpangan dan Keadilan Pendidikan

Riset tentang ketimpangan dan keadilan pendidikan merupakan bidang kajian penting dalam studi kebijakan pendidikan karena pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam banyak sistem pendidikan, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam akses dan kualitas pendidikan antara berbagai kelompok sosial. Oleh karena itu, penelitian dalam bidang ini berupaya mengkaji berbagai bentuk ketimpangan pendidikan serta mengidentifikasi kebijakan yang dapat mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Salah satu fokus utama dalam riset ketimpangan pendidikan adalah mengkaji perbedaan akses pendidikan antar wilayah, kelompok sosial, dan tingkat ekonomi. Ketimpangan tersebut sering terlihat pada perbedaan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta akses terhadap sumber belajar dan teknologi pendidikan. Selain itu, latar belakang sosial dan ekonomi keluarga juga sangat mempengaruhi peluang individu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, penelitian dalam bidang ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang menyebabkan ketimpangan pendidikan dan mencari solusi kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan tersebut.

Riset mengenai keadilan pendidikan juga meneliti dampak kebijakan pendidikan terhadap kelompok masyarakat yang rentan, seperti masyarakat miskin, masyarakat di daerah terpencil, serta kelompok minoritas. Kelompok-kelompok ini sering menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan, baik karena keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, maupun faktor sosial dan budaya. Melalui penelitian kebijakan pendidikan, para peneliti dapat menilai apakah kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat atau justru memperkuat ketimpangan yang sudah ada.

D. Implikasi bagi Reformasi Administrasi Publik

Reformasi administrasi publik menjadi aspek penting dalam pengembangan kebijakan pendidikan modern. Perubahan lingkungan sosial, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih berkualitas menuntut sistem administrasi publik untuk beradaptasi secara berkelanjutan. Kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sistem administrasi publik karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi, kualitas birokrasi, serta mekanisme tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, perkembangan kajian kebijakan pendidikan memberikan sejumlah implikasi penting bagi proses reformasi administrasi publik. Berikut beberapa implikasi utama kebijakan pendidikan terhadap reformasi administrasi publik:

1. Penguatan Kapasitas Birokrasi Pendidikan

Penguatan kapasitas birokrasi pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam reformasi administrasi publik yang bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Dalam sistem pemerintahan modern, birokrasi pendidikan memiliki peran strategis dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai kebijakan pendidikan yang dirancang oleh pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada kualitas desain kebijakan, tetapi juga pada kemampuan birokrasi dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif di berbagai tingkat pemerintahan.

Reformasi administrasi publik menuntut adanya peningkatan kapasitas birokrasi agar mampu menghadapi tantangan pengelolaan pendidikan yang semakin kompleks. Aparatur birokrasi pendidikan perlu memiliki kompetensi yang memadai dalam berbagai aspek, seperti perencanaan program pendidikan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi program pendidikan. Kompetensi tersebut sangat penting karena kebijakan pendidikan sering kali melibatkan berbagai program yang kompleks dan membutuhkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu faktor utama dalam penguatan kapasitas birokrasi pendidikan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Aparatur pendidikan, seperti pejabat dinas pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, serta tenaga administrasi pendidikan, perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang tugasnya. Penguatan kapasitas sumber daya manusia ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, karena aparatur birokrasi merupakan pelaksana utama kebijakan pendidikan yang berinteraksi langsung dengan lembaga pendidikan dan masyarakat.

2. Penguatan Tata Kelola Kolaboratif dalam Pendidikan

Penguatan tata kelola kolaboratif dalam pendidikan merupakan salah satu konsekuensi dari perkembangan reformasi administrasi publik yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengelolaan kebijakan publik. Dalam paradigma pemerintahan modern, pemerintah tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya aktor yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik, termasuk dalam sektor pendidikan. Kompleksitas permasalahan pendidikan, seperti ketimpangan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, serta kebutuhan pengembangan keterampilan abad ke-21, menuntut adanya kerja sama yang lebih luas antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang pendidikan.

Pada konteks tata kelola pendidikan, pendekatan kolaboratif menekankan pentingnya interaksi dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil. Pemerintah tetap memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan kerangka regulasi yang mengatur sistem pendidikan. Namun, pelaksanaan kebijakan pendidikan sering kali melibatkan kontribusi dari berbagai aktor non-pemerintah yang memiliki sumber daya, keahlian, dan pengalaman yang dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, sektor swasta dapat berkontribusi dalam penyediaan teknologi pendidikan, pengembangan program pelatihan keterampilan, serta dukungan terhadap inovasi pembelajaran. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dapat berperan

dalam advokasi kebijakan pendidikan, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan program pendidikan berbasis komunitas.

Kolaborasi antaraktor dalam tata kelola pendidikan juga dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan. Ketika berbagai pihak terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, cenderung memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program pendidikan. Hal ini dapat memperkuat koordinasi antar lembaga serta meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, kerja sama antaraktor juga memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan.

3. Penguatan Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan

Penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan merupakan salah satu arah penting dalam reformasi administrasi publik yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan sektor pendidikan. Dalam pendekatan ini, pengelolaan pendidikan tidak lagi sepenuhnya terpusat pada pemerintah pusat, tetapi sebagian kewenangan dialihkan kepada pemerintah daerah agar kebijakan pendidikan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Desentralisasi pendidikan dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi, partisipasi masyarakat, serta kualitas layanan pendidikan karena pengambilan keputusan dilakukan lebih dekat dengan kondisi nyata di lapangan.

Pada sistem desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan berbagai program pendidikan di wilayahnya. Kewenangan tersebut dapat mencakup pengelolaan anggaran pendidikan daerah, pengembangan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat setempat.

Salah satu keunggulan utama desentralisasi pendidikan adalah kemampuannya untuk membuat kebijakan pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kondisi ekonomi, budaya, maupun infrastruktur pendidikan. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah dapat merancang program pendidikan yang lebih relevan dengan kondisi masyarakatnya, misalnya dengan mengembangkan pendidikan berbasis potensi lokal atau menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi geografis wilayah tertentu.

E. Pendidikan dan Masa Depan Tata Kelola Negara

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan tata kelola negara. Sistem pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun kapasitas institusi negara, memperkuat demokrasi, serta menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan partisipatif. Dalam konteks administrasi publik modern, pendidikan menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola negara yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan pendidikan memiliki implikasi jangka panjang terhadap kualitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan nasional. Berikut beberapa aspek penting yang menunjukkan hubungan antara pendidikan dan masa depan tata kelola negara:

1. Pendidikan sebagai Fondasi Pembangunan Kapasitas Negara

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi dalam pembangunan kapasitas negara. Dalam perspektif pembangunan dan administrasi publik, kapasitas negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusi pemerintahan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut. Sistem pendidikan berperan dalam membentuk individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan profesional. Oleh karena itu, pembangunan sistem pendidikan yang berkualitas

menjadi salah satu prasyarat penting dalam memperkuat kapasitas negara.

Salah satu kontribusi utama pendidikan terhadap pembangunan kapasitas negara adalah dalam menciptakan aparatur negara yang profesional dan kompeten. Aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan publik, mengelola program pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut secara efektif, aparatur negara memerlukan kemampuan analitis, keterampilan manajerial, serta pemahaman yang baik mengenai sistem pemerintahan dan kebijakan publik. Kompetensi tersebut umumnya dibangun melalui sistem pendidikan yang berkualitas, baik melalui pendidikan formal di perguruan tinggi maupun melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional.

Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kapasitas negara dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik memerlukan analisis yang mendalam terhadap berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh masyarakat. Individu yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam melakukan analisis kebijakan, merancang program pembangunan, serta mengevaluasi dampak kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, kualitas sistem pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan negara dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sistem pendidikan yang kuat juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas birokrasi dan institusi pemerintahan secara keseluruhan. Birokrasi yang profesional membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknis, integritas, serta komitmen terhadap pelayanan publik. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membantu menanamkan nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

2. Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat sistem demokrasi karena pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan kesadaran kewargaan. Dalam masyarakat demokratis, warga negara diharapkan memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, memahami isu-isu publik, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Sistem pendidikan yang berkualitas dapat membantu membentuk warga negara yang memiliki kemampuan tersebut sehingga mampu berkontribusi secara konstruktif dalam proses demokrasi.

Salah satu kontribusi utama pendidikan terhadap penguatan demokrasi adalah dalam membentuk warga negara yang kritis dan rasional. Melalui proses pendidikan, individu dilatih untuk menganalisis informasi, memahami berbagai sudut pandang, serta mengevaluasi kebijakan publik secara objektif. Kemampuan berpikir kritis ini sangat penting dalam sistem demokrasi karena warga negara perlu membuat keputusan yang rasional dalam berbagai proses politik, seperti pemilihan umum, diskusi publik, maupun partisipasi dalam organisasi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap kehidupan demokratis.

Sistem pendidikan yang baik juga dapat meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Pendidikan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam negara demokratis. Pengetahuan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan politik, seperti mengikuti pemilu, terlibat dalam diskusi kebijakan publik, serta berpartisipasi dalam organisasi sosial dan politik. Partisipasi masyarakat yang luas merupakan salah satu indikator penting dari demokrasi yang sehat.

Pendidikan juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, seperti toleransi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, serta tanggung jawab sosial. Dalam masyarakat yang plural dan beragam, nilai-nilai tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik yang dapat mengganggu kehidupan demokrasi. Melalui pendidikan, individu belajar untuk menghargai

keberagaman, bekerja sama dengan orang lain, serta memahami pentingnya aturan dan institusi dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial.

3. Pendidikan sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Pendidikan memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif pembangunan sosial, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga sebagai mekanisme penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memperluas kesempatan hidup bagi seluruh warga negara. Ketimpangan sosial sering kali berkaitan dengan perbedaan akses terhadap sumber daya penting, termasuk akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang dirancang secara inklusif dan berkeadilan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Salah satu fungsi utama pendidikan dalam mewujudkan keadilan sosial adalah sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan antara berbagai kelompok masyarakat. Individu yang memiliki akses terhadap pendidikan yang baik cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan taraf hidup, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan pendidikan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang kurang beruntung, seperti masyarakat miskin, masyarakat di daerah terpencil, serta kelompok sosial yang mengalami marginalisasi.

Kebijakan pendidikan yang inklusif menjadi salah satu strategi penting dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan inklusif menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi fisik. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti bantuan pendidikan bagi

siswa dari keluarga kurang mampu, pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil, serta penyediaan layanan pendidikan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal.

Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan mobilitas sosial dalam masyarakat. Mobilitas sosial merujuk pada kemampuan individu untuk memperbaiki posisi sosial dan ekonomi melalui kesempatan yang tersedia. Pendidikan memberikan individu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan peluang ekonomi. Dengan demikian, sistem pendidikan yang terbuka dan merata dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih dinamis dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. (2019). *The Narrow Corridor*.
- Allouche, E. (2024). *Digital Transformation of Education*.
- Anderson, J. E. (2015). *Public Policy Making* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of *Public Administration Research and Theory*.
- Apple, M. (2018). Educating the “Right” Way.
- Arifin, F., Marini, A., & Zulela. (2024). *Enhancing Educational Governance*.
- Atikah, C., Handayani, H., & Mariyanto. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan.
- Ball, S. (2017). *The Education Debate*.
- Ball, S. J. (2012). *Global Education* inc. Routledge.
- Bardach, E., & Patashnik, E. (2019). *A practical guide for Policy Analysis* (6th ed.). CQ Press.
- Barrett, S., & Fudge, C. (2017). *Policy and action*. Routledge.
- Berman, P. (1980). *Thinking about programmed and adaptive Implementation*.
- Bevir, M. (2018). *Governance: A Very Short Introduction*.
- Biesta, G. (2020). *Educational Research: An Unorthodox Introduction*.
- Birkland, T. (2019). *An Introduction to the Policy Process*.
- Boeskens, L., & Meyer, K. (2025). *Policies for the Digital Transformation of School Education*. OECD.
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (2016). *Public Management and Governance*.
- Bovens, M. (2010). *Two Concepts of Accountability*. *Public Administration Review*.
- Brodkin, E. Z. (2011). *Policy work: Street-Level organizations under New managerialism*.
- Cairney, P. (2019). *Understanding Public Policy: Theories and issues*. Palgrave Macmillan.
- Cairney, P., & Weible, C. (2017). *New Directions in Public Policy Theory*.

- Christensen, T., & Lægreid, P. (2017). *The Ashgate Research Companion to New Public Management*.
- Colebatch, H. (2018). *Policy*.
- Dunleavy, P., *et al.* (2006). *New Public Management is Dead—Long Live Digital Era Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson.
- Easton, D. (2016). *A Systems Analysis of Political Life*.
- Elfert, M., & Ydesen, C. (2023). *Global Governance of Education*. Springer.
- Faguet, J. (2014). *Decentralization and Governance*. World Development.
- Farra, F., & Pissarides, C. (2023). *Quantum Governance*. Emerald Publishing.
- Fischer, F. (2019). *Politics, Values and Public Policy*.
- Fischer, F., Miller, G., & Sidney, M. (2015). *Handbook of Public Policy Analysis*.
- Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C., & Licari, M. (2019). *The Public administration Theory primer*. Westview Press.
- Fukuyama, F. (2013). *What is Governance?*. *Governance Journal*.
- Fukuyama, F. (2014). *Political Order and Political Decay*.
- Fullan, M. (2016). *The New meaning of Educational Change*. Teachers College Press.
- Fullan, M. (2020). *Leading in a Culture of Change*.
- Gibbons, M., *et al.* (2024). *Home in Early Childhood Education*.
- Hall, P., & Taylor, R. (2016). *Political Science and the Three New Institutionalisms*.
- Hanushek, E., & Woessmann, L. (2020). *Education, Knowledge Capital, and Economic Growth*.
- Hargreaves, A., & Shirley, D. (2018). *The Global Fourth Way*.
- Head, B. (2016). *Toward More Evidence-Informed Policy Making*.
- Hill, M. (2013). *The Public Policy Process*. Routledge.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing Public Policy*. Sage Publications.

- Hood, C. (2015). *The Blame Game: Spin, Bureaucracy, and Self-Preservation in Government*.
- Hood, C., & Dixon, R. (2015). *A Government that Worked Better and Cost Less?*.
- Hoppe, R. (2018). *The Governance of Problems*.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy*. Oxford University Press.
- Hupe, P. (2014). *What happens on the ground*. Edward Elgar.
- Jian, N., & Mustafa, N. (2024). *Digital Transformation in Education Policy Implementation*.
- Kettl, D. F. (2018). *The Transformation of Governance*. Johns Hopkins University Press.
- Kingdon, J. (2014). *Agendas, Alternatives and Public Policies*.
- Levin, B. (2010). *Governments and Education Reform*.
- Lewis, S. (2020). *PISA, Policy and the OECD*. Springer.
- Li, C., Zhao, C., Wang, Y., & Hua, Y. (2026). *AI Knowledge Governance*.
- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*.
- Mahardhani, A. J. (2025). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Administrasi Publik Teori dan Praktik*.
- Mahardhani, A. J. (2023). *Pemerintahan Kolaboratif (Menjawab Tantangan Masa Depan)*.
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). *The Second Wave of Digital Era Governance*.
- Maryasih, N. L. K., et al. (2024). *Evaluation of Government Policy in Governance of Educational Cooperation*.
- Matland, R. (1995). *Synthesizing the Implementation Literature*.
- Moran, M., Rein, M., & Goodin, R. (2016). *The Oxford Handbook of Public Policy*.
- Mundy, K., Green, A., Lingard, B., & Verger, A. (2016). *Handbook of Global Education Policy*.
- North, D. (2017). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*.
- Nutley, S., Walter, I., & Davies, H. (2017). *Using Evidence*.
- O'Toole, L. J. (2014). *Policy Implementation*. Oxford University Press.

- OECD. (2020). *Improving Governance with Policy Evaluation*.
- OECD. (2021). *Education at a Glance*.
- OECD. (2025). *Government at a Glance 2025*. OECD Publishing.
- OECD. (2025). *Trends Shaping Education 2025*. OECD Publishing.
- Ojanen, A., *et al.* (2025). *Governing Rapid Technological Change*.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (2015). *Reinventing Government*.
- Osborne, S. P. (2021). *Public service logic: Creating value for Public service users*. Routledge.
- Ostrom, E. (2010). *Beyond Markets and States*.
- Ostrom, E. (2015). *Governing the Commons*.
- Parsons, W. (2018). *Public Policy: An introduction to the Theory and practice of Policy Analysis*. Edward Elgar.
- Peters, B. G. (2015). *Institutional Theory in Political Science*.
- Peters, B. G. (2018). *Advanced Introduction to Public Policy*.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2019). *The Next Public Administration*.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2021). *Handbook of Public Administration*.
- Peters, M. A. (2019). *Digital University*.
- Peters, M. A. (2020). *Education in a Post-Truth World*.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, Politics and the State*. Palgrave Macmillan.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. Oxford University Press.
- Pressman, J., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation*. University of California Press.
- Ranson, S. (2018). *Education Governance and social integration*.
- Reckhow, S. (2013). *Follow the Money: How Foundation Dollars Change Public School Politics*.
- Rhodes, R. A. W. (2017). *Understanding Governance*.
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2019). *Globalizing Education Policy*.
- Rodrik, D. (2020). *Straight Talk on Trade*.
- Sabatier, P. (2019). *Theories of the Policy Process* (4th ed.). Westview Press.
- Sabatier, P., & Weible, C. (2018). *The Advocacy Coalition Framework*.
- Saltelli, A., & Di Fiore, M. (2023). *The Politics of Modelling*. Oxford University Press.
- Sanderson, I. (2018). *Evidence-Based Policy Making*.

- Scott, J. (2017). *Seeing Like a State*.
- Selwyn, N. (2022). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Bloomsbury.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Spillane, J. P. (2006). *Distributed leadership*. Jossey-Bass.
- Steiner-Khamsi, G. (2018). *The Global Politics of Educational Borrowing and Lending*.
- Stiglitz, J. (2019). *People, Power and Profits*.
- Stone, D. (2017). *Policy paradox: The art of political Decision Making* (3rd ed.). W.W. Norton.
- Tesar, M. (2023). *Reframing the Everyday in Early Childhood Pedagogy*.
- Tesar, M., Peters, M., & Jackson, L. (2022). *The University as an Ethical Academy*.
- Tikly, L. (2020). *Education for sustainable development in Africa*.
- Tiwari, S., Kostenko, O., & Yekhanurov, Y. (2025). *Understanding Technology in the Context of National Development*.
- UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*.
- UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report*.
- UNESCO. (2024). *Education for Sustainable Development Report*.
- Verger, A., Novelli, M., & Altinyelken, H. (2018). *Global Education Policy and International Development*.
- Wagenaar, H. (2017). *Meaning in Action*.
- Weible, C., & Sabatier, P. (2017). *Theories of the Policy Process*.
- Winter, S. C. (2012). *Implementation perspectives: Status and reconsideration*.
- World Bank. (2018). *World Development Report: Learning to Realize Education's Promise*.
- World Bank. (2020). *Realizing the Future of Learning*.
- Ydesen, C. (2019). *The OECD's Historical Rise in Education*. Springer.
- Young, M. (2019). *Knowledge and the Future School*.

GLOSARIUM

Hak	Wewenang dasar yang dimiliki individu atau kelompok untuk memperoleh layanan pendidikan secara adil dalam sistem kebijakan publik.
Taat	Kepatuhan aktor kebijakan terhadap norma, aturan, dan regulasi dalam proses tata kelola pendidikan.
Sah	Status legal suatu kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Arah	Orientasi strategis kebijakan pendidikan dalam mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia.
Tinjau	Proses peninjauan kembali kebijakan guna memastikan relevansi dan keberlanjutan program pendidikan.
Uji	Proses pengujian atau penilaian sistematis terhadap rancangan maupun pelaksanaan kebijakan pendidikan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, serta kesesuaiannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dalam kerangka administrasi publik.
Nilai	Nilai dasar yang menjadi landasan normatif dalam perumusan kebijakan pendidikan, mencakup prinsip keadilan, pemerataan,

akuntabilitas, dan keberlanjutan yang memandu pengambilan keputusan dalam tata kelola pendidikan.

Dasar

Prinsip dasar atau fondasi konseptual yang menjadi pijakan dalam merancang arsitektur kebijakan pendidikan, termasuk kerangka hukum, ideologi kebijakan, serta orientasi pembangunan sumber daya manusia.

Bing

Kerangka konseptual atau struktur analitis yang digunakan untuk memahami hubungan antara aktor, institusi, dan proses dalam penyusunan serta implementasi kebijakan pendidikan dalam administrasi publik.

Rangka

Susunan komponen kebijakan yang terorganisasi secara sistematis, meliputi tujuan, strategi, instrumen kebijakan, serta mekanisme pelaksanaan yang saling berkaitan dalam sistem tata kelola pendidikan.

Jejaringan

Jaringan hubungan antaraktor kebijakan, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, yang berperan dalam proses perumusan, koordinasi, dan implementasi kebijakan pendidikan.

Umpan

Mekanisme umpan balik yang berasal dari masyarakat, lembaga pendidikan, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kinerja kebijakan pendidikan serta menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Siklus

Siklus kebijakan yang menggambarkan tahapan proses kebijakan pendidikan mulai dari

identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Baur

Proses integrasi berbagai kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan administratif dalam penyusunan kebijakan pendidikan agar tercapai keseimbangan antara aspirasi publik dan tujuan pembangunan nasional.

Selaras

Tingkat keselarasan antara perencanaan kebijakan pendidikan dengan praktik implementasi di lapangan, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan dalam sistem administrasi publik.

INDEKS

A

akademik, 3, 6, 9, 11, 42, 43,
44, 76, 81, 100, 101, 102,
103, 118, 129, 131, 139, 146,
161, 172, 188, 199, 204, 206
audit, 58

D

distribusi, 9, 14, 15, 16, 17, 18,
36, 59, 69, 72, 73, 74, 77, 78,
79, 94, 97, 121, 125, 129,
164, 168, 173, 182, 183, 184,
189, 211
domestik, 41

E

ekonomi, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 35,
36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 47,
48, 50, 51, 52, 53, 62, 66, 69,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 88, 90, 92, 93, 94,
95, 96, 99, 100, 108, 111,
112, 113, 131, 139, 147, 148,
155, 160, 161, 162, 164, 166,
167, 177, 186, 187, 189, 194,
197, 201, 210, 211, 214, 218,
219, 220, 222, 223, 226, 227,
229, 230, 238
empiris, 9, 12, 197, 198, 203

F

finansial, 52, 66, 75, 112, 122,
124, 128, 222

fiskal, 28, 38, 80, 84
fleksibilitas, 30, 38, 40, 84, 93,
132, 165, 196, 201, 208, 226
fundamental, 2, 209

G

geografis, 95, 109, 166, 167,
168, 185, 186, 187, 189, 223,
226
globalisasi, 3, 41, 42, 43

I

implikasi, 23, 71, 77, 223, 226
infrastruktur, 4, 8, 13, 17, 20,
38, 70, 72, 75, 80, 84, 113,
164, 169, 170, 186, 188, 189,
195, 226
inklusif, 1, 19, 33, 43, 71, 137,
138, 150, 152, 153, 186, 197,
202, 209, 210, 222, 229, 230
inovatif, 28, 80, 84, 108, 114,
131, 132, 142, 165, 188, 191,
200
integrasi, 15, 35, 43, 107, 116,
117, 131, 197, 202, 203, 204,
206, 207, 213, 217, 218, 219,
238
integritas, 102, 228
interaktif, 206
investasi, 3, 80, 81, 88, 211

K

kolaborasi, 23, 32, 42, 44, 48,
60, 111, 113, 117, 121, 127,
128, 129, 130, 133, 137, 138,

139, 141, 145, 149, 175, 203,
216
komparatif, 196
komprehensif, 34, 45, 53, 64,
104, 107, 130, 131, 138, 139,
142, 151, 179, 180, 196, 204,
213, 220
konsistensi, 62, 75, 83, 96, 181

M

manajerial, 23, 27, 29, 32, 135,
155, 168, 172, 227

N

negosiasi, 14, 15, 34, 57, 71,
105, 121, 123, 124, 127, 128,
129, 138, 155, 166, 207

O

otoritas, 4, 25, 35, 36, 60, 62,
73, 74, 75, 110, 117, 123,
125, 126, 132, 140

P

pedagogis, 1, 14, 18, 69, 100,
104, 107, 213, 214, 215
politik, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
14, 15, 16, 23, 26, 27, 28, 38,
39, 49, 50, 54, 55, 56, 59, 62,
69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 81, 82, 86, 87, 88, 89,

96, 122, 123, 124, 125, 128,
139, 155, 156, 166, 170, 177,
197, 199, 201, 203, 206, 207,
209, 213, 220, 227, 228, 238

R

rasional, 9, 10, 11, 12, 13, 23,
25, 26, 50, 54, 56, 57, 64, 71,
86, 90, 96, 204, 228
regulasi, 1, 4, 16, 18, 26, 31,
35, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 65, 66, 72, 74, 89,
90, 91, 95, 96, 160, 164, 201,
217, 219, 222, 225, 237
relevansi, 34, 65, 70, 113, 142,
176, 196, 199, 237
revolusi, 87

S

stabilitas, 7, 24, 27, 73, 75, 79,
201, 229

T

teoretis, 64, 157
transformasi, 23, 30, 41, 43, 87,
107, 116
transparansi, 34, 101, 149, 151,
152, 204

U

universal, 42

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Ardhana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP.

Lahir di Tulungagung, 23 Januari 1987. Lulus S1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, S2 Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya, dan S3 Administrasi Publik di Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan bidang kepakaran Kebijakan Pendidikan. Mengampu mata kuliah Kebijakan Publik, Kebijakan Pendidikan, dan Advokasi Kebijakan Publik. Penulis aktif menjadi sekretaris di Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) Provinsi Jawa Timur. Beberapa karya yang sudah diterbitkan antara lain: Pemerintahan Kolaboratif (2023), Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan (2024), Kebijakan Pendidikan Inklusi untuk Anak Usia Dini (2024), Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Administrasi Publik: Teori dan Praktik (2025).

SINOPSIS

Buku referensi “Arsitektur Kebijakan Pendidikan dalam Administrasi Publik (Tinjauan dalam Politik, Tata Kelola, dan Implementasinya)” ini membahas secara komprehensif mengenai proses perumusan, pengelolaan, dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam kerangka administrasi publik. Buku referensi ini menempatkan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, struktur kelembagaan, serta interaksi berbagai aktor kebijakan. Buku referensi ini membahas landasan konseptual kebijakan publik dan administrasi publik, proses politik dalam perumusan kebijakan pendidikan, prinsip-prinsip tata kelola kebijakan, serta strategi implementasi dan evaluasi kebijakan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan. Melalui pendekatan teoritis dan analitis, buku referensi ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana arsitektur kebijakan pendidikan dibangun untuk menghasilkan kebijakan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

ARSITEKTUR KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

(TINJAUAN DALAM POLITIK, TATA KELOLA, DAN IMPLEMENTASINYA)

Buku referensi Arsitektur Kebijakan Pendidikan dalam Administrasi Publik (Tinjauan dalam Politik, Tata Kelola, dan Implementasinya) ini membahas secara komprehensif mengenai proses perumusan, pengelolaan, dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam kerangka administrasi publik. Buku referensi ini menempatkan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, struktur kelembagaan, serta interaksi berbagai aktor kebijakan. Buku referensi ini membahas landasan konseptual kebijakan publik dan administrasi publik, proses politik dalam perumusan kebijakan pendidikan, prinsip-prinsip tata kelola kebijakan, serta strategi implementasi dan evaluasi kebijakan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan. Melalui pendekatan teoritis dan analitis, buku referensi ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana arsitektur kebijakan pendidikan dibangun untuk menghasilkan kebijakan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.